



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2017**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada *stakeholder*, mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Penyusunan Laporan Keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka:

- Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai pelaksanaan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- Membantu para pengguna Laporan Keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat;
- Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
- Membantu para pengguna Laporan Keuangan dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah selama periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan, dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Bantul Tahun 2016, sesuai Standar Akuntansi Pemerintah adalah:

- Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;



- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 59 Tahun 2007 dan Permendagri No 21 tahun 2011.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan standart akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan standart akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah, yang dibagi ke dalam tujuh bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab ini memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan APBD, kebijakan keuangan yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul dan penjelasan mengenai pencapaian target kinerja APBD.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Bab ini memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD menurut urusan pemda, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi



Bab ini disajikan informasi mengenai Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah, informasi mengenai basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan, informasi mengenai penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos keuangan daerah, dan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Bab ini memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos Laporan Keuangan, dan pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual.

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi non Keuangan

Bab ini berisi informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan Keuangan.

Bab VII Informasi Lainnya

Memuat tambahan informasi mengenai adanya kegiatan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh dinas instansi yang bersumber dari non APBD.

Bab VIII Penutup

Memuat uraian penutup yang dapat berupa simpulan-simpulan penting tentang Laporan Keuangan.

BAB II



EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Realisasi makro ekonomi tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,56% (data sementara dari BPS)
- Laju inflasi sebesar 3,96% (data sementara dari BPS)
- Angka pengangguran terbuka diperkirakan turun menjadi 3,12% dari angkatan kerja
- Jumlah penduduk miskin dari target di RPJM diperkirakan turun menjadi 13,66% pada akhir tahun 2017 (data perkiraan sementara dari BPS)
- Prediksi Indeks Gini Ratio tahun 2017 sebesar 0,3985 (data perkiraan sementara dari BPS)
- Prediksi PDRB tahun 2017 atas dasar harga berlaku berdasarkan angka sangat sementara dari BPS tahun 2017 sebesar Rp22.816.236 (jutaan) dan PDRB atas dasar harga konstan Rp17.117.854 (jutaan) data sangat sementara
- Terpenuhinya perkiraan penerimaan pendapatan daerah dan, Perkiraan kebutuhan belanja daerah dapat mendanai program-program strategis daerah yang mendukung target indikator yang telah ditetapkan.
- Tingkat Kemiskinan Daerah setempat
Menurut BPS persentase tingkat kemiskinan tahun 2017 sebesar 14,07%, lebih rendah dari tahun 2016 yaitu sebesar 14,55%.
- Tingkat Pengangguran
Jumlah pengangguran pada tahun 2016 sebanyak 3%, meningkat menjadi 3,12% pada tahun 2017.
- Indeks Pengembangan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul tahun 2017 sebesar 78,48, lebih tinggi dari DIY (78,38.).
- Angka Putus Sekolah
Tahun 2017 Angka putus sekolah untuk:
jenjang SD/MI sebesar 0,01% ,
jenjang SMP/MTs tahun 2017 sebesar 0,02%,
- Tingkat Kematian Ibu, Tingkat Gizi Buruk
angka kematian ibu pada tahun 2017 sebesar 73,4 per 100.000 kelahiran hidup (9 kasus kematian ibu), lebih rendah atau lebih baik daripada target kematian ibu 87,5 per 100,000 kelahiran hidup. sedangkan status gizi buruk pada Balita sebesar 0,415% yaitu sebanyak 202 Balita gizi buruk dari 48.865 Balita yang diukur.

2.2 Kebijakan Keuangan.



Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk tahun 2017 tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilakukan dengan menekankan prinsip *money follow function* sebagai konsekuensi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang bertumpu pada hal-hal sebagai berikut:

- Pengelolaan keuangan Kabupaten Bantul mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;
- APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dan jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis Belanja;
- Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah. Penyusunan APBD ditekankan pada penerapan anggaran terpadu (*unified budget*, yaitu penyusunan rencana keuangan tahunan dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan. Dalam penyusunan APBD terkandung prinsip partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektifitas anggaran serta saat azas.
- Semua pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain pendapatan yang sah;
- Sumber PAD terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang sah;
- Sumber Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan yang meliputi: Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya berupa dana penyesuaian dan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya antara lain Bagi Hasil Pajak.
- Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Pendapatan Lainnya.
- Belanja Daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer.
- Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
- Belanja Modal terdiri belanja modal tanah, belanja modal Peralatan dan Mesin, belanja modal Gedung dan Bangunan, belanja modal Jalan, Irigasi dan jaringan serta belanja modal aset tetap lainnya.
- Khusus untuk Belanja Modal software pada tahun 2017 pada system aplikasi SIMDA di golongan dalam Belanja Modal aset lainnya
- Penggunaan anggaran Belanja tidak Terduga, ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1(satu) bulan terhitung sejak Keputusan Bupati ditetapkan.



- Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai berikut:
 - Tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa, seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan;
 - Tidak mengharapkan akan diterima kembali dimasa yang akan datang seperti lazimnya piutang;
 - Tidak mengharapkan adanya hasil, seperti lazimnya suatu penyertaan modal atau investasi.
- Belanja Tidak Terduga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dikelola di DPPKAD selaku PPKD Kab Bantul dengan memperhatikan peraturan yang ada.
- Surplus Anggaran dimanfaatkan antara lain untuk , Pembayaran Pokok Utang, Penyertaan Modal (Investasi), dan atau Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Bersangkutan yang dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran daerah.
- Defisit Anggaran dibiayai antara lain dari Sisa Anggaran Tahun yang Lalu, Pinjaman Daerah, Penjualan Obligasi Daerah, Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang dipisahkan, Transfer dari Dana Cadangan yang dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan Jenis Penerimaan Daerah.

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2017 yang dijabarkan dalam rencana pembangunan seoptimal mungkin memperhatikan permasalahan daerah yang mendesak dan harus segera diatasi terutama risiko bencana pada setiap aspek, aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, prediksi perkembangan penyelenggaraan otonomi daerah, dan kemampuan pendanaan daerah Berdasarkan kajian terhadap kondisi terkini di wilayah Kabupaten Bantul, permasalahan mendesak yang teridentifikasi adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul terutama masyarakat miskin melalui pengembangan ekonomi lokal.

Capaian kinerja berdasarkan sasaran pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1) Penurunan kemiskinan dan peningkatan kesempatan kerja

Capaian indikator yang mencerminkan sasaran ini terlihat antara lain pada:

- Menurunnya angka kemiskinan dari 14,55 pada tahun 2016 menjadi 14,07% di tahun 2017
- Pertumbuhan ekonomi terealisasi 4,52.% pada tahun 2017.
- PDRB sesuai harga konstan mencapai Rp17.117.854 (jutaan) pada tahun 2017 (angka sangat sementara)
- Tingkat pengangguran 2017 terealisasi 3,12%

2) Infrastruktur yang semakin baik

Capaian indikator yang mencerminkan capaian sasaran ini terlihat antara lain:

- Saluran irigasi semakin baik kondisi fisiknya



- Peningkatan kondisi dan mutu jalan yang semakin baik
 - Semakin banyak kondisi jalan kabupaten yang baik
 - Kondisi sarana dan prasarana kesehatan yang semakin baik
 - Kondisi Pasar yang semakin membaik
- 3) Lingkungan hidup dan sumberdaya alam terkelola dengan baik
 - 4) Penataan ruang kawasan perumahan dan permukiman yang semakin baik
 - 5) Kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh meningkat

Capaian Indikator yang mencerminkan sasaran ini antara lain nampak pada capaian indikator sebagai berikut:

- Usia Harapan Hidup tercapai 73,58. tahun
 - Semakin banyaknya penduduk yang memiliki jaminan kesehatan
 - Angka Kematian Bayi tercapai sebesar 8,32./1000 KH lebih rendah dari target 8,75/1000 KH
 - Gizi buruk , realisasi tahun 2017 sebesar 0,41%
 - Puskesmas yang sudah melaksanakan BLUD 100.% Puskesmas dari target 27 Puskesmas
 - Meningkatnya Desa Siaga kategori baik (Purnama dan Mandiri)
 - Menurunnya angka kesakitan penyakit berbasis lingkungan
- 6) Kesenjangan gender yang semakin baik, semakin meningkatnya pemahaman PUG, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak disemua lapisan masyarakat
 - 7) Meningkatnya ketahanan pangan daerah
 - Meningkatnya ketersediaan energi
 - Meningkatnya ketersediaan protein
 - Meningkatnya pola pangan harapan
 - Meningkatnya ketersediaan ikan untuk konsumsi
 - 8) Pengembangan dunia usaha dan koperasi
 - 9) Pengembangan pariwisata
 - Tercapainya target pendapatan disektor Pariwisata
 - Meningkatnya investor dibidang pariwisata

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN



Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

Pencapaian target kinerja keuangan (APBD) tahun anggaran 2017 dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pendapatan.

Secara garis besar komposisi anggaran pendapatan dalam APBD Kabupaten Bantul tahun 2017 adalah Rp458.042.255.770,19 untuk Pendapatan Asli Daerah, Rp1.628.151.082.518,49 Pendapatan Transfer dan Rp8.880.122.258 untuk Lain- Lain Pendapatan yang Sah dari total anggaran pendapatan sebesar Rp2.095.073.460.546,68

Dibanding dengan anggaran yang ditetapkan, realisasi pendapatan mencapai Rp 2.086.739.683.071,45 dengan komposisi realisasi Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp 494.039.761.972,97 Pendapatan Transfer Rp1.582.101.156.370,48 dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Rp10.598.764.728 dengan rasio realisasi pendapatan sebagai berikut:

NO	Komponen Pendapatan	Realisasi	%
1	Pendapatan Asli Daerah	494,039,761,972.97	23.68
2	Pendapatan Transfer	1,582,101,156,370.48	75.82
3	Lain-lain Pendapatan Yang sah	10,598,764,728.00	0.51
		2,086,739,683,071.45	100

a. Rasio Komponen Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah :

NO	Komponen Pendapatan	Realisasi	%
1	Pajak Daerah	165,562,359,004.37	33.51
2	Retribusi Daerah	31,575,738,483.00	6.39
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	20,140,166,955.94	4.08
4	Lain-lain PAD	276,761,497,529.66	56.02
		494,039,761,972.97	100.00



b. Rasio Komponen Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan Transfer :

NO	Komponen Pendapatan	Realisasi	%
1	Dana Bagi Hasil Pajak	30,047,703,100.00	1.90
2	Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (SDA)	4,823,475,870.00	0.30
3	Dana Alokasi Umum	982,250,842,000.00	62.09
4	Dana Alokasi khusus Fisik	68,459,917,286.00	4.33
5	Dana Alokasi khusus non Fisik	201,674,324,302.00	12.75
6	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	131,691,087,000.00	8.32
7	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi	145,068,714,991.48	9.17
8	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya – LRA	18,085,091,821.00	1.14
		1,582,101,156,370.48	100.00

c. Rasio Komponen Lain-lain Pendapatan Yang Sah atas Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

NO	Komponen Pendapatan	Realisasi	%
1	Pendapatan Hibah	10,598,764,728.00	100
2	Pendapatan Dana Darurat		
3	Pendapatan Lainnya	-	
		10,598,764,728.00	100

d. Rasio Kemandirian Daerah :

Pendapatan Asli Daerah (Dana Transfer + Pinjaman Daerah)		X	100%	
=	$\frac{494,039,761,972.97}{2,086,739,683,071.45}$	X	100%	= 23.68 %

Pendapatan Asli Daerah Total Belanja dan transfer		X	100%	
=	$\frac{494,039,761,972.97}{2,076,251,515,418.60}$	X	100%	= 23.79 %

2) Belanja. Dan Transfer

Secara garis besar komposisi anggaran belanja dan transfer dalam APBD Kabupaten Bantul tahun 2017 adalah Rp 2.330.695.497.939,22, Belanja Operasi Rp1.692.182.527.316,80 Belanja Modal Rp



358.060.931.911 Belanja Tidak Terduga Rp34.319.269.126,42 dan Transfer ke Kabupaten/Kota/Desa sebesar Rp 246.132.769.585,00

Dibanding dengan anggaran yang telah ditetapkan, realisasi belanja dan transfer mencapai Rp2.076.251.515.418,60 dengan komposisi realisasi belanja operasi mencapai Rp 1.504.413.765.736,46 belanja modal mencapai Rp 332.626.017.914,14 belanja tidak terduga Rp 2.121.325.557 dan transfer ke Kabupaten/Kota/Desa .Rp237.090.406.211,00

a. Rasio Belanja dan transfer terhadap Total Belanja dan transfer :

NO	Komponen Belanja dan transfer	Realisasi	%
1	Belanja operasi	1,504,413,765,736.46	72.46
2	Belanja modal	332,626,017,914.14	16.02
3	Belanja tak terduga	2,121,325,557.00	0.10
4	Transfer ke kab/kota/desa	237,090,406,211.00	11.42
		2,076,251,515,418.60	100

b. Rasio Komponen Belanja Operasi terhadap Total Belanja :

NO	Komponen Belanja operasi	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	895,233,267,232.00	59.51
2	Belanja Barang dan Jasa	541,118,874,445.46	35.97
3	Belanja Bunga	0	-
4	Belanja Subsidi	0	
5	Belanja Hibah	66,411,324,059.00	4.41
6	Belanja Bantuan Sosial	1,650,300,000.00	0.11
		1,504,413,765,736.46	100.00

c. Rasio Belanja Bantuan Sosial terhadap Total Belanja dan transfer

$$= \frac{1,650,300,000.00}{2,076,251,515,418.00} \times 100\% = 0.08 \%$$

d. Rasio Belanja Tidak Terduga terhadap Total Belanja dan Transfer

$$= \frac{2,121,325,557.00}{2,076,251,515,418.00} \times 100\% = 0.10 \%$$

e. Rasio Belanja Hibah terhadap Total Belanja dan Transfer

$$= \frac{66,411,324,059.00}{2,076,251,515,418.00} \times 100\% = 3.20 \%$$

f. Rasio Belanja Transfer terhadap Total Belanja dan Transfer

$$= \frac{237,090,406,211.00}{2,076,251,515,418.60} \times 100\% = 11.42 \%$$



g. Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja dan Transfer

=	$\frac{895,233,267,232.00}{2,076,251,515,418.60}$	X	100%	=	43.12 %
---	---	---	------	---	---------

h. Rasio Belanja Barang dan Jasa terhadap Total Belanja dan Transfer

=	$\frac{541,118,874,445.46}{2,076,251,515,418.60}$	X	100%	=	26.06 %
---	---	---	------	---	---------

3) Pembiayaan.

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah dalam tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp261.384.639.408,54 berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun 2016 Rp254.772.037.392,54 hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp0 dan dari penerimaan kembali investasi non permanen lainnya Rp6.612.602.016,00

Realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2017 adalah sebesar Rp24.364.800.000,00 untuk penyertaan modal Rp17.150.000.000,00 dan untuk pemberian pinjaman Rp7.214.800.000,00

a. Rasio SiLPA terhadap Total Penerimaan Pembiayaan :

$$\frac{254,772,037,392.54}{261,384,639,408.54} \times 100\% = 97.47 \%$$

b. Rasio Penerimaan kembali investasi non permanen lainnya terhadap Total Penerimaan Pembiayaan

$$\frac{6,612,602,016.00}{261,384,639,408.54} \times 100\% = 2.53 \%$$

c. Rasio Pengeluaran Pembiayaan untuk Pemberian Pinjaman Daerah terhadap Total Pengeluaran Pembiayaan :

$$\frac{7,214,800,000.00}{24,364,800,000.00} \times 100\% = 29.61 \%$$



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 1 tahun 2004), Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa Laporan Keuangan, sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah di wilayahnya merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan adalah basis akrual yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

4.3 Basis Pengungkapan dan Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

a) Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten terdiri atas:

- Kas Pemerintah Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah, terdiri atas saldo rekening di Kas Daerah, setara kas dan uang tunai yang ada di Bendahara Umum Daerah.

Saldo rekening di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten yang berada di rekening Kas Daerah pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.

Setara kas, antara lain berupa deposito kurang dari tiga bulan yang dikelola Bendahara Umum Daerah.

- Kas Pemerintah Daerah yang dikuasai dan dibawah tanggungjawab selain Bendahara Umum Daerah meliputi Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLUD

Kas di Bendahara Pengeluaran yang merupakan kas yang menjadi tanggungjawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran berupa sisa UP/TU yang per tanggal neraca belum disetor ke Kas Daerah.



Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo penerimaan yang bersumber dari pelaksanaan tugas pemerintahan Bendahara tersebut (saldo pungutan yang diterima) yang per tanggal neraca belum disetor ke Kas Daerah

Kas di BLUD adalah besaran kas per tanggal neraca yang menjadi tanggung jawab pengelola BLUD yang menjadi bagian dari laporan pertanggungjawaban laporan keuangan daerah.

Kas di Sekolah (BOSNAS) adalah besaran kas per tanggal neraca yang menjadi tanggung jawab pengelola BOSNAS dimasing masing sekolah yang menjadi bagian dari laporan pertanggungjawaban laporan keuangan daerah.

Setara Kas merupakan kas yang bukan merupakan bagian dari Silpa yang harus dicantumkan dalam laporan keuangan dalam rangka memenuhi aturan perundangan yang berasal dari unsur antara lain dana-dana dari blockgrant dll

Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika terdapat transaksi kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

b) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi Pemerintah Daerah yang segera dapat dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam jangka pendek (selama dua belas bulan atau kurang), antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (duabelas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Investasi jangka pendek dicatat/diukur sebesar nilai perolehan.

Investasi Jangka Pendek harus memiliki karakteristik:

- Dapat segera diperjual belikan/dicairkan
- Ditujukan dalam rangka manajemen kas
- Beresiko rendah

c) Piutang

Piutang merupakan hak pemerintah kabupaten untuk menerima pembayaran dari entitas lain, termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten, atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.

Piutang terdiri atas:

- Piutang Pajak dan Piutang Retribus dan Piutang PAD Lainnya;
- Piutang Yang berasal dari Perikatan(al dana bergulir,);
- Piutang Transfer antar pemerintahan
- Bagian Lancar Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Daerah
- Piutang Denda

Piutang dinilai sebesar nilai nominal/bruto dan diakui pada akhir periode akuntansi bersama penyisihannya.



Piutang Pendapatan akan diakui sebagai piutang bila sudah ada ketetapannya dan timbul adanya hak bagi Pemerintah Daerah. Contoh untuk Piutang Pajak harus ada SKP/SKPT.

Piutang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pencatatan pemerintah kabupaten kecuali piutang kabupaten yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.

Piutang yang berasal dari perikatan khususnya dana bergulir sesuai dengan tata pengelolaan yang ada di Pemerintah Kabupaten Bantul dan mengacu pada Buletin Teknis Nomor 7 Standart Akuntansi Pemerintahan pada pos neraca tercantum dan ditempatkan pada aset lancar pos piutang lainnya, termasuk dalam penyajian dan pengungkapan penyisihannya.

Dalam pelaksanaan pemberian piutang mekanisme pengguliran masih berdasarkan Perbup no 7 tahun 2012 dan Perbup 8 Tahun 2012 tentang mekanisme pencairan dana bergulir.

Piutang denda merupakan jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari keterlambatan bayar atas tagihan piutang pokok yang sudah jatuh tempo yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Dalam pelaksanaan dan penerapan piutang denda di Pemerintah Kabupaten Bantul perhitungan dan piutang denda serta penyisihannya sudah disajikan dalam laporan keuangan.

Pelaksanaan pengelolaan piutang yang ada di Pemerintah Kabupaten Bantul sampai saat ini baru sebatas melakukan dan menghitung penyisihan piutang. Mengenai tata cara dan mekanisme penghapusan piutang dari piutang yang sudah termasuk kategori macet sudah diatur dalam Peraturan Bupati No 148 Tahun 2016, tetapi dalam pelaksanaan pengelolaan piutang, penghapusan belum dilakukan.

Dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta meningkatkan transparansi dan kejelasan informasi maka dalam pencantuman/tampilan/face di Neraca untuk nilai piutang ditampilkan beriringan antara nilai nominal/bruto piutang dengan penyisihan piutang dan disajikan berdasarkan jenis piutang.

d) Belanja Dibayar Dimuka

Belanja dibayar dimuka adalah bagian dari aset lancar yang merupakan hak pemerintah atas layanan dari entitas lain

e) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bagian lancar TGR merupakan aset lancar yang merupakan hak dari Pemerintah atas pengembalian kewajiban dari entitas lain atas kerugian daerah.

f) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan (*physical inventory taking*) dan untuk persediaan obat dengan menggunakan metode perpetual. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah dan dinilai dalam neraca dengan cara:



- Biaya perolehan terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
- Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
- Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar atau dengan standart harga yang telah ditentukan dengan aturan pelaksanaan mengenai persediaan tersebut.
- Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar

Beban Persediaan

- a) Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan.
- b) Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.
- c) Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.
- d) Metode perpetual, untuk persediaan yang sifatnya continues dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/ jumlah persediaan selalu ter-update.
- e) Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, dan kas opname untuk mendapatkan saldo akhir persediaan kemudian dikalikan nilai per unit dengan harga terakhir.
- f) Dalam hal persediaan masuk masa kadaluarsa, hilang atau mati maka beban diukur berdasarkan harga wajar atau harga pembelian apabila masih terdapat informasi mengenai persediaan tersebut

Dalam pelaporan persediaan diinformasikan saldo awal, penambahan, penggunaan, saldo akhir. Untuk perhitungan beban persediaan belum secara maksimal dan dihitung secara real pertransaksi, sehingga perhitungan beban dihitung berdasarkan stockopname terakhir.

g) **Investasi Jangka Panjang.**

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut maksud/sifat penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan permanen.

▪ **Investasi Non Permanen**

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, antara lain dalam bentuk, obligasi atau surat utang, penyertaan modal dalam proyek pembangunan.

Obligasi dinilai sebesar nilai nominal.



Penyertaan modal pada proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya perencanaan dan biaya lain dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek diserahkan kepada pihak ketiga.

▪ **Investasi Permanen**

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Bentuk investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah kabupaten pada perusahaan negara/daerah, lembaga keuangan negara/daerah, atau badan hukum lainnya, serta investasi permanen lainnya yang tidak tercakup diatas.

- ✓ Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada perusahaan negara/daerah dinilai sebagai berikut:
 - jika kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendali yang signifikan, investasi dinilai sebesar nilai perolehan.
 - Jika kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 20% atau lebih, investasi dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan.
- ✓ Investasi permanen lainnya dinilai berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

h) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah kabupaten atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Aset tetap berwujud harus memenuhi kriteria:

- mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan
- biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara handal
- tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Klasifikasi aset tetap yang digunakan adalah:

- Tanah
- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi dan Jaringan
- Aset Tetap Lainnya.
- Konstruksi dalam Pengerjaan



Aset tetap diakui pada saat diterima dan kepemilikan berpindah serta dinyatakan dalam neraca dengan harga perolehan. Apabila aset tetap dinilai dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi atau harga pasar yang wajar.

Bila harga/biaya perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset tersebut ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Batas biaya/belanja yang dapat dikapitalisasi (*capitalization threshold*) untuk masing-masing aset adalah sebagai berikut:

- pengeluaran per satuan aset tetap peralatan mesin, dan alat olah raga yang sama atau lebih dari Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- untuk aset tanah, jalan, irigasi dan jembatan dan aset tetap lainnya dikecualikan dari kapitalisasi diatas.

Pelaksanaan pengelolaan Aset pada Tahun 2017 dilakukan dengan Sistem berbasis Komputer (SIM BMD). Dalam SIM BMD untuk Beban Penyusutan Aset Tetap dilakukan langsung setelah tahun perolehan tanpa ada tenggang waktu, sehingga penyajian akumulasi penyusutan aset tetap di Neraca dan beban penyusutan di Laporan Operasi merupakan akumulasi penyusutan dari tahun pertama aset tersebut diperoleh.

Dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta meningkatkan transparansi dan kejelasan informasi maka dalam pencantuman/tampilan/face di Neraca untuk nilai aset ditampilkan beserta penyusutannya.

i) Dana Cadangan

Dana cadangan adalah dana yang dibentuk untuk membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran atau dana yang dibentuk untuk tujuan tertentu. Pembentukan dan peruntukannya diatur dengan Peraturan Daerah. Dana Cadangan dinilai sebesar nilai nominalnya.

j) Aset Lainnya.

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri dari:

1. Aset Tak Berwujud
2. Tagihan Penjualan Angsuran
3. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
4. Kemitraan dengan pihak ketiga



5. Aset lain-lain
6. Aset lain yang dibatasi penggunaannya
7. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud
 - Aset tak berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.
Pengukuran untuk aset tidak berwujud sudah memperhitungkan penyusutan/amortisasi aset, meskipun belum adanya standart secara pasti dalam pengukuran umur aset tidak terwujud .
Untuk pengungkapan aset tak berwujud baru yang berasal dari *software* komputer
 - Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal kontrak/berita acara penjualan aset dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar.
 - Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nominal dalam Surat Ketetapan Tuntutan Perbendaharaan dikurangi setoran bendaharawan yang bersangkutan ke Kas Daerah.
Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dikurangi setoran yang bersangkutan ke Kas Daerah.
 - Bangun Kelola Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah kabupaten kepada pihak ketiga untuk membangun aset BKS tersebut.
Bangun Serah Kelola dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah kabupaten ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan pihak ketiga untuk membangun aset tersebut.
 - Aset lain-lain, Saldo aset lainnya berasal dari barang yang sudah tercatat tetapi tidak ditemukan berdasarkan hasil sensus barang milik daerah pada Sekolah Dasar se Kabupaten Bantul Tahun 2015 terdiri dari
 - Aset lainnya yang dibatasi merupakan kas yang ada dipengelola kegiatan yang tersimpan dalam rekening pengelola yang penggunaannya (pemasukan dan pengeluaran) melalui mekanisme yang telah diatur dalam kegiatan tersebut dan dimungkinkan dapat menjadi potensi pendapatan daerah
 - Nilai dari akumulasi amortisasi merupakan hasil perhitungan secara sistematis yang berasal dari seluruh aset tidak berwujud yang sudah diatur amortisasinya secara umur dan teknis penyusutannya.

k) Kewajiban.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul dan dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kewajiban diklasifikasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.



Kewajiban jangka pendek terdiri dari:

- Utang kepada Pihak Ketiga/Utang Beban
- Pendapatan Dibayar Dimuka
- Utang Bunga
- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

l) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban Pemerintah kabupaten pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah/dikurangi oleh surplus/defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi persediaan, selisih evaluasi tetap dan lain-lain.

yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara jumlah nilai Aset Lancar dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Pendek.

Ekuitas Dana Investasi merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang tertanam dalam Investasi Jangka Panjang, dan Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) dikurangi dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Panjang.

Ekuitas Dana Cadangan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu.

Penyajian ekuitas dineraca disajikan hanya sebatas nilai ekuitas dana

m) Pendapatan

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah, Rekening BLUD dan Rekening BOSNAS disekolah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah kabupaten dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah kabupaten.

Basis pengakuan pendapatan adalah basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk Laporan Neraca dan Laporan operasional

n) Belanja dan beban

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Daerah, kas BLUD dan Rekening BOSNAS disekolah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi beban daerah. Basis pengakuan biaya adalah basis kas yaitu biaya diakui pada saat terjadi pengeluaran dan diukur sebesar kas yang dikeluarkan untuk Laporan realisasi anggaran dan basis akrual yaitu beban diakui pada saat terjadinya kewajiban yang ditanggung Pemerintah atas terjadinya transaksi



o) Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah kabupaten, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah kabupaten dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Khusus Pembiayaan pada Pos Penerimaan pembiayaan maupun Pengeluaran pembiayaan, sesuai dengan amanat SE mendagri No 910/106/SJ tertanggal 11 Januari 2017 perihal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/kota pada APBD, maka untuk anggaran dan realisasi pada Pos Pembiayaan Tahun 2017 baik anggaran maupun realisasi telah disesuaikan. Jumlah realisasi Silpa Tahun 2016 yang sudah di Sahkan ditambah dengan sisa dari BOSNAS Tahun 2016

p) Laporan Operasional

Laporan operasional yang dicantumkan dalam laporan keuangan daerah merupakan laporan transaksi operasional baik transaksi pendapatan yang merupakan hak penambah nilai kekayaan daerah maupun beban atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Unsur dari transaksi pendapatan maupun beban tidak hanya berdasarkan kas yang masuk tetapi juga termasuk transaksi-transaksi yang mengakibatkan perubahan pengakuan kas baik yang terdahulu maupun yang akan terjadi dimasa yang akan datang.

q) Laporan Aliran Kas

Laporan kas yang dicantumkan dalam laporan keuangan daerah merupakan Laporan konsolidasian antara Kas di Kas daerah dengankas yang ada di SKPD selaku BLUD maupun unit SKPD yang menjadi BLUD. Laporan kas mencakup seluruh transaksi –transaksi yang langsung berpengaruh terhadap aktivitas kas (transaksi KAS) maupun tidak secara langsung. Unsur dari LAK berasal dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir. Penyusunan dan penyajian Laporan Arus Kas dilakukan dengan menggabungkan aliran dari transaksi di Kas Daerah dan kas di BLUD secara manual belum tersistem walaupun dalam pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengelolaan keuangan memakai SIMDA yang sudah tersistem

r) Laporan Perubahan SAL

Laporan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya atas pos-pos: Saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan saldo anggaran lebih akhir

s) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Penerapan kebijakan akuntansi yang belum mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan dilakukan secara bertahap dikarenakan penerapan basis akrual baru pertama kali dilaksanakan dan untuk perhitungan umur penyusutan piutang masih konsisten berdasarkan perhitungan yang telah diterapkan dimasa yang lalu terutama menyangkut penilaian aset tetap yang belum sepenuhnya berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5 RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS-POS LAPORAN KEUANGAN	ANGGARAN Tahun 2017	REALISASI Tahun 2017	REALISASI Tahun 2016
5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
5.1.1 Pendapatan LRA	2,095,073,460,546.68	2,086,878,989,570.45	2,000,334,166,353.84
a. Pendapatan Asli Daerah	458,042,255,770.19	494,179,068,471.97	404,454,703,746.07
Jumlah tersebut adalah realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2017 dan 2016 yang terdiri atas:			
1) Pajak Daerah	131,491,500,000.00	165,562,359,004.37	133,474,742,165.22
2) Retribusi Daerah	26,399,376,280.00	31,575,738,483.00	26,613,085,433.67
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20,184,427,489.19	20,130,437,131.20	21,068,269,986.18
4) Lain – Lain PAD yang Sah	279,966,952,001.00	276,910,533,853.40	223,298,606,161.00
Jumlah	458,042,255,770.19	494,179,068,471.97	404,454,703,746.07
1) Pendapatan atas Pajak Daerah terdiri atas:			
a) Pajak hotel	1,250,000,000.00	1,569,261,167.00	1,349,735,081.00
b) Pajak restoran	5,800,000,000.00	8,975,258,421.00	7,013,976,166.37
c) Pajak hiburan	500,000,000.00	664,967,875.00	799,304,711.00
d) Pajak reklame	1,750,000,000.00	2,196,366,698.00	2,398,413,203.00
e) Pajak penerangan jalan	32,500,000,000.00	36,105,826,697.00	29,754,039,669.00
f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	700,000,000.00	1,909,569,372.12	677,507,436.50
g) Pajak parkir	90,000,000.00	121,015,120.00	102,216,396.00
h) Pajak Air Tanah	500,000,000.00	638,031,158.00	315,818,495.00
i) Pajak Sarang Burung Walet	1,500,000.00	1,500,000.00	1,850,000.00
j) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	57,000,000,000.00	76,862,647,864.25	60,948,254,097.35
j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	31,400,000,000.00	36,517,914,632.00	30,113,326,910.00
Jumlah	131,491,500,000.00	165,562,359,004.37	133,474,742,165.22
2) Retribusi daerah terdiri atas:			
a) Retribusi jasa umum	4,921,005,500.00	6,239,001,228.00	5,266,720,369.67
b) Retribusi jasa usaha	19,031,102,450.00	23,248,983,673.00	17,909,839,199.00
c) Retribusi perizinan tertentu	2,447,268,330.00	2,087,753,582.00	3,436,525,865.00
Jumlah	26,399,376,280.00	31,575,738,483.00	26,613,085,433.67
Retribusi terinci dari			
a) Retribusi jasa umum			
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA	916,500,000.00	1,153,627,859.00	976,137,804.00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	89,049,000.00	121,025,000.00	61,285,000.00
Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	2,125,000,000.00	2,391,197,869.00	2,306,255,950.00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	704,542,000.00	775,946,500.00	824,846,500.00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	115,565,000.00	130,014,500.00	125,287,500.00
Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan - LRA	115,000,000.00	138,738,000.00	764,254,230.00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Laboratorium Pengawasan Kualitas Air -	85,000,000.00	115,383,000.00	109,416,000.00
Retribusi Pengolahan Limbah Cair	90,349,500.00	108,009,500.00	-
Retribusi Pelayanan Pendidikan - LRA	6,000,000.00	7,727,000.00	-
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	674,000,000.00	1,297,332,000.00	4,239,000.00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Laboratorium Pengawasan Kualitas Air -	-	-	101,493,500.00
Jumlah	4,921,005,500.00	6,239,001,228.00	5,273,215,484.00
b) Retribusi jasa usaha			
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	490,000,000.00	662,625,000.00	674,277,115.67
Retribusi Tempat Pelelangan - LRA	30,000,000.00	75,994,773.00	197,069,500.00
Retribusi Terminal - LRA	31,364,250.00	30,856,600.00	48,479,449.00
Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	122,000,000.00	161,085,000.00	32,803,100.00
Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA	95,000,000.00	66,827,500.00	143,479,200.00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga - LRA	16,029,000,000.00	19,719,499,500.00	106,427,500.00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA	2,223,838,200.00	2,516,245,300.00	15,177,382,750.00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Vill	9,900,000.00	15,850,000.00	-
Jumlah	19,031,102,450.00	23,248,983,673.00	16,379,918,614.67
c) Retribusi perizinan tertentu			
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	2,000,000,000.00	1,556,836,132.00	2,204,197,700.00
Retribusi Izin Gangguan - LRA	197,268,330.00	198,081,250.00	2,495,445,335.00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) -	250,000,000.00	332,836,200.00	176,826,300.00
Jumlah	2,447,268,330.00	2,087,753,582.00	4,876,469,335.00
3) Pendapatan atas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri atas:			
- PD Aneka Dharma	50,000,000.00	-	24,175,500.00
- BPR Bank Bantul	3,172,506,102.46	3,172,506,102.46	3,386,429,636.02
- PDAM	324,639,050.00	324,639,050.00	295,989,500.00
- BUKP	195,679,587.61	191,689,229.62	210,567,476.73
- Bagian laba atas penyertaan modal pada BPD	16,441,602,749.12	16,441,602,749.12	17,151,107,873.43
Jumlah	20,184,427,489.19	20,130,437,131.20	21,068,269,986.18
4) Lain-lain PAD yang sah terdiri atas:			
a) Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA	60,000,000.00	79,950,000.00	429,192,000.00
b) Penerimaan Jasa Giro - LRA	1,200,000,000.00	1,600,730,232.00	850,197,083.00
c) Pendapatan Bunga Deposito - LRA	20,000,000,000.00	24,573,688,024.39	25,131,953,010.82
d) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA	280,000,000.00	304,646,949.15	283,765,232.00
e) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	-	229,154,499.55	1,152,141.00
f) Pendapatan Denda Pajak - LRA	-	1,056,542,156.31	952,063,304.49
g) Pendapatan Denda Retribusi - LRA	-	19,021,815.00	106,941,662.00
h) Pendapatan dari Pengembalian	-	4,138,202.00	2,784,494,119.58
i) Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA	-	-	1,025,000,000.00
j) Pendapatan BLUD - LRA	186,593,592,451.00	175,865,104,949.00	183,192,675,134.00
k) Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	55,000,000.00	59,876,750.00	72,588,500.00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

l) Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LRA	517,514,800.00	716,573,200.00	803,571,200.00
m) Hasil dari pengelolaan dana bergulir	124,200,000.00	210,363,340.00	280,865,452.00
n) Pendapatan dari sewa kapal dan sewa kawasan BAT - LRA	90,833,037.00	10,433,550.00	81,969,195.00
o) Pendapatan dari Sewa Gedung - LRA		-	3,850,000.00
p) Pungutan Dalam Rangka Penempatan Kios Baru - LRA	866,500,000.00	891,875,000.00	121,950,000.00
q) Penerimaan Lain-lain - LRA	-	1,060,828,180.00	7,176,378,127.11
r) Pendapatan dari BOS	70,179,311,713.00	70,227,607,006.00	
Jumlah	279,966,952,001.00	276,910,533,853.40	223,298,606,161.00

Hasil pengujian data saldo awal pendapatan dari Bos hanya berdasarkan saldo yang ada di Rekening Bank belum memperhitungkan saldo kas yang ada di BKU per 1 Januari 2017 dari masing-masing sekolah dan kelebihan pencatatan bunga Bank.

b. Pendapatan Transfer

	1,628,151,082,518.49	1,582,101,156,370.48	1,589,730,727,107.77
--	----------------------	----------------------	----------------------

Merupakan realisasi penerimaan Dana Perimbangan tahun anggaran 2017 dan 2016 berupa transfer dari pemerintah pusat/provinsi yang terdiri atas:

1) Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan transfer Pemerintah Pusat

a) Dana Bagi Hasil Pajak	39,878,723,102.00	30,047,703,100.00	34,632,858,847.00
b) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5,784,640,150.00	4,823,475,870.00	4,705,557,041.00
c) Dana Alokasi Umum	982,250,842,000.00	982,250,842,000.00	999,814,365,000.00
d) Dana Alokasi Khusus (Fisik)	72,673,537,000.00	68,459,917,286.00	99,372,454,939.00
e) Dana Alokasi Khusus (non Fisik)	238,561,089,388.00	201,674,324,302.00	192,827,541,336.00
Jumlah	1,339,148,831,640.00	1,287,256,262,558.00	1,331,352,777,163.00

a) Dana Bagi Hasil Pajak

- Pajak Bumi dan Bangunan	7,330,249,593.00	6,258,687,078.00	10,396,542,106.00
- Bagi Hasil dari BPHTB		-	
- Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 25	32,548,473,509.00	23,789,016,022.00	24,236,316,741.00
Jumlah	39,878,723,102.00	30,047,703,100.00	34,632,858,847.00

b) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

- Dana Bagi Hasil Pengusahaan Hutan	3,447,498.00	9,835,091.00	3,524,695.00
- Dana Bagi Hasil Pungutan hasil Perikanan	1,493,124,000.00	525,572,127.00	452,025,539.00
- Dana Dari Cukai Tembakau	4,288,068,652.00	4,288,068,652.00	4,250,006,807.00
Jumlah	5,784,640,150.00	4,823,475,870.00	4,705,557,041.00

c) Dana Alokasi Umum

Jumlah	982,250,842,000.00	982,250,842,000.00	999,814,365,000.00
---------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

d) Dana Alokasi Khusus (Fisik)

- DAK Bidang Infrastruktur Air Minum - LRA	3,393,000,000.00	3,301,944,890.00	139,504,000.00
- DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LRA	2,411,000,000.00	2,345,964,052.00	114,136,000.00
- DAK Bidang Kesehatan - LRA		-	239,954,000.00
- DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LRA	19,715,650,000.00	18,722,014,991.00	38,023,501,500.00
- DAK Bidang Perdagangan - LRA	1,629,000,000.00	1,405,216,538.00	134,205,000.00
- DAK Bidang Lingkungan Hidup - LRA		-	409,989,000.00
- DAK Bidang Pertanian - LRA		-	198,562,000.00
- DAK Bidang Pendidikan - LRA	5,464,000,000.00	4,401,967,185.00	410,922,000.00
- DAK Bidang Perhubungan - LRA	6,334,000,000.00	5,961,040,600.00	1,460,470,000.00
- DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah - LRA	650,000,000.00	550,302,180.00	-
- DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LRA	21,462,000,000.00	20,835,576,263.00	
- DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - LRA	7,233,000,000.00	6,604,759,122.00	
- DAK Bidang Pasar - LRA	931,000,000.00	880,244,465.00	
- DAK Fisik Tambahan	3,450,887,000.00	3,450,887,000.00	
- DAK Bidang Infra Struktur Publik Daerah - LRA		-	58,158,121,439.00
Jumlah	72,673,537,000.00	68,459,917,286.00	99,372,454,939.00

e) Dana Alokasi Khusus (non Fisik)

- Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPG PNSD) - LRA	195,917,165,500.00	160,887,078,414.00	165,599,762,836.00
- Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (Tamsil PNSD) - LRA	2,865,000,000.00	1,575,750,000.00	1,458,500,000.00
- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) - LRA	24,880,200,000.00	24,769,800,000.00	16,044,000,000.00
- Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOX) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	13,247,398,888.00	12,790,370,888.00	4,379,514,500.00
- Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan (PK2)		-	2,725,866,000.00
- Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1,651,325,000.00	1,651,325,000.00	2,373,498,000.00
- DAK Akreditasi Puskesmas - LRA		-	246,400,000.00
Jumlah	238,561,089,388.00	201,674,324,302.00	192,827,541,336.00

Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya :

a) Dana Insentif Daerah	53,960,596,000.00	53,960,596,000.00	39,311,680,000.00
b) Dana Desa	77,730,491,000.00	77,730,491,000.00	60,601,265,000.00
c) Dana Tunjangan Pendidikan		-	-
Jumlah	131,691,087,000.00	131,691,087,000.00	99,912,945,000.00

3) Transfer Pemerintah Daerah– Lainnya (Pemda DIY) :

- Pendapatan Bagi Hasil Pajak	139,206,072,057.49	145,068,714,991.48	137,137,204,944.77
Pajak dan Retribusi dari Propinsi terdiri dari:			
a) Pajak Kendaraan Bermotor	42,113,397,631.26	42,840,015,968.13	38,569,319,400.00
b) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	27,788,913,250.00	29,736,513,250.00	26,597,623,900.00
c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	34,985,631,874.37	37,848,631,874.37	36,566,004,808.35
d) Pajak Air Permukaan	32,672,750.00	32,672,750.00	15,661,536.42
e) Bagi Hasil dari Pajak Rokok	34,285,456,551.86	34,610,881,148.98	35,388,595,300.00
f) Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa		-	-
Jumlah	139,206,072,057.49	145,068,714,991.48	137,137,204,944.77

4) Bantuan Keuangan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

- Bantuan Keuangan dari Pemda DIY dan dari Kabupaten Kota untuk beberapa		-	-
a) Bantuan Keuangan dari Provinsi	18,105,091,821.00	18,085,091,821.00	21,327,800,000.00
b) Bantuan Keuangan dari Kabupaten			
c) Bantuan Keuangan dari Kota			

Jumlah	18,105,091,821.00	18,085,091,821.00	21,327,800,000.00
--------	-------------------	-------------------	-------------------

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Merupakan penerimaan daerah tahun 2017 dan 2016 yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:

Pendapatan Hibah bersumber dari Pemerintah Pusat tahun 2017 terdiri atas:

1) Hibah WISM PKP SPPM		4,496,764,728.00	4,500,000,000.00
2) Hibah USAID (PDAM)		1,602,000,000.00	1,648,735,500.00
3) Hibah Reimbust penyertaan modal kepada PDAM		4,500,000,000.00	

Jumlah	8,880,122,258.00	10,598,764,728.00	6,148,735,500.00
--------	------------------	-------------------	------------------

5.1.2 Belanja

Jumlah	2,316,365,303,254.22	2,062,411,968,377.60	1,818,809,283,541.11
--------	----------------------	----------------------	----------------------

5.1.2 a. Belanja Operasi

Jumlah tersebut adalah realisasi belanja operasi selama tahun 2017 dan 2016 yang terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi 2017	Realisasi 2016
1) Belanja Pegawai	1,020,027,677,710.00	895,282,390,666.00	1,077,184,056,432.00
2) Belanja Barang	612,852,640,294.80	557,504,286,927.46	421,914,402,647.16
3) Belanja Bunga	-		
4) Belanja Hibah	55,401,109,312.00	50,474,188,248.00	31,862,069,500.00
5) Belanja Bantuan Sosial	3,901,100,000.00	1,650,300,000.00	3,267,350,000.00
6) Belanja Bantuan Keuangan	231,802,574,900.00	222,760,211,526.00	

Jumlah	1,923,985,102,216.80	1,727,671,377,367.46	1,534,227,878,579.16
--------	----------------------	----------------------	----------------------

Jumlah realisasi belanja operasi tahun 2017 setelah konversi sesuai permendagri no

	Anggaran	Realisasi 2017	Realisasi 2016
1) Belanja Pegawai	1,020,027,677,710.00	895,282,390,666.00	1,077,184,056,432.00
2) Belanja Barang	594,956,668,673.80	541,568,682,551.46	420,218,336,647.16
3) Belanja Bunga			
4) Belanja Hibah	73,297,080,933.00	66,409,792,624.00	33,558,135,500.00
5) Belanja Bantuan Sosial	3,901,100,000.00	1,650,300,000.00	3,267,350,000.00
6) Belanja Bantuan Keuangan	231,802,574,900.00	222,760,211,526.00	

Jumlah	1,923,985,102,216.80	1,727,671,377,367.46	1,534,227,878,579.16
--------	----------------------	----------------------	----------------------

1) Belanja Pegawai

Jumlah	895,282,390,666.00	1,077,184,056,432.00
--------	--------------------	----------------------

Belanja pegawai terdiri dari belanja pegawai:

	Anggaran	Realisasi 2017	Realisasi 2016
a) Belanja Pegawai Tidak Langsung	946,444,529,504.00	825,306,291,768.00	1,032,505,302,997.00
* Gaji dan tunjangan	778,739,257,944.00	663,489,993,481.00	714,667,286,650.00
* Tambahan Penghasilan PNS (Tunjangan profesi, prestasi kerja dll)	151,120,575,219.00	148,260,815,093.00	308,820,477,912.00
* Bel Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta Operasional Kepada Daerah	7,561,500,000.00	5,941,836,000.00	4,001,999,949.00
* Biaya Pemungutan PBB	191,485,000.00		
* Biaya Pemungutan Retribusi Daerah	1,142,017,107.00		
* Bel Pemungutan Pajak	6,415,294,234.00	6,410,647,194.00	5,015,538,486.00
* Tunjangan Uang makan	1,274,400,000.00	1,203,000,000.00	
* Tambahan Penghasilan Guru			
b) Belanja Pegawai Langsung	73,583,148,206.00	69,976,098,898.00	44,678,753,435.00
* Honorarium PNS	5,965,861,950.00	5,315,219,200.00	5,153,557,350.00
* Honorarium Non PNS	47,620,112,400.00	46,177,883,900.00	34,738,875,735.00
* Uang Lembur	144,935,000.00	110,305,003.00	158,364,250.00
* Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	14,250,000.00	14,250,000.00	8,500,000.00
* Honor Pengelolaan Operasional Puskesmas	52,800,000.00		
* Belanja Pegawai BLUD	9,503,188,856.00	8,115,719,232.00	4,619,456,100.00
* Honorarium Pengelolaan Operasional Dinas	11,000,000.00	11,000,000.00	
* Belanja Pegawai dana BOS	10,271,000,000.00	10,231,721,563.00	

Jumlah	1,020,027,677,710.00	895,282,390,666.00	1,077,184,056,432.00
--------	----------------------	--------------------	----------------------

Realisasi belanja Pegawai untuk Dana Bos di SMP melebihi dari pagu anggaran yang dicantumkan dalam APBD Perubahan TA. 2017 karena usulan pagu anggarannya hanya berdasarkan estimasi bukan dari rekapan RKAS dari masing-masing sekolah.

2) Belanja Barang dan jasa

Jumlah	557,504,286,927.46	421,914,402,647.16
--------	--------------------	--------------------

Pada realisasi belanja barang dan jasa (belanja langsung) untuk Tahun Anggaran 2017 terdapat belanja yang sifatnya hibah kepada masyarakat dengan anggaran sebesar Rp17.895.971.621,00 dengan realisasi sebesar Rp15.935.604.376,00 yang sesuai dengan Permendagri No 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 39 tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD harus dikonversi ke dalam belanja Hibah (bel tidak langsung).

	Anggaran	Realisasi	Realisasi
a) Belanja Bahan Pakai Habis	13,627,876,491.00	12,595,764,406.00	8,698,704,073.00
b) Belanja Bahan/Material	44,198,310,270.50	42,107,677,152.84	37,750,177,837.00
c) Belanja Jasa Kantor	38,526,553,005.92	36,074,704,232.00	28,944,102,300.00
d) Belanja Premi Asuransi	6,651,362,204.00	6,567,897,370.00	14,859,560.00
e) Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15,254,221,500.00	12,729,167,082.00	9,421,828,508.18
f) Belanja Cetak dan Penggandaan	10,361,177,920.08	9,167,822,906.00	7,437,945,254.00
g) Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,745,637,158.00	3,184,534,725.00	2,202,677,379.00
h) Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,402,672,714.29	1,151,322,000.00	915,225,000.00
i) Belanja Sewa Alat Berat	-		55,060,800.00
j) Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,756,748,500.00	3,468,991,900.00	2,406,117,500.00
k) Belanja Makanan dan Minuman	34,499,711,747.00	30,851,036,806.00	25,126,909,861.00
l) Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	5,331,745,000.00	4,371,452,625.00	295,939,899.00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

m)	Belanja Pakaian Kerja	1,542,237,500.00	1,503,899,200.00	1,079,931,264.00
n)	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	3,230,590,000.00	3,167,484,500.00	1,569,372,025.00
o)	Belanja Perjalanan Dinas	43,034,675,215.00	35,352,013,236.00	27,795,508,307.00
p)	Belanja Pemeliharaan	13,087,093,353.00	12,241,543,943.28	5,676,008,308.00
q)	Belanja Jasa Konsultansi	10,878,202,224.00	10,323,712,200.00	8,532,861,750.00
r)	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	17,895,971,621.00	15,935,604,376.00	848,033,000.00
s)	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	431,000,000.00	420,000,000.00	213,500,000.00
t)	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2,651,321,300.00	2,320,355,900.00	3,275,132,200.00
u)	Belanja Sharing	750,000,000.00	565,111,379.91	-
v)	Belanja Barang dan Jasa Puskesmas	10,636,000.00	10,121,986.00	165,356,309,995.98
w)	Belanja Barang Operasional BLUD	182,569,280,622.80	163,082,180,737.43	25,440,833,400.00
x)	Belanja Operasional Pendidikan	27,175,750,000.00	26,178,780,000.00	17,861,510,364.00
y)	Belanja Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	12,250,043,000.00	9,979,255,908.00	892,677,300.00
z)	Belanja Kursus-kursus DPRD	1,263,412,500.00	1,197,787,500.00	128,058,300.00
aa)	Belanja Perlengkapan Penyelamatan	251,615,000.00	249,215,000.00	39,975,118,462.00
bb)	Belanja Jasa	72,206,111,448.21	68,209,641,642.00	-
cc)	Belanja Penyusunan Kajian Naskah Akademik	247,750,000.00	243,930,000.00	-
dd)	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	46,020,934,000.00	44,253,278,214.00	-
Jumlah		612,852,640,294.80	557,504,286,927.46	421,914,402,647.16

A Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa yang sifatnya hibah ke masyarakat dan Pihak Ketiga dengan rincian sebagai berikut.

	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Realisasi 2016	
I	Belanja Barang dan dan Jasa yang bersifat Hibah kemasyarakatan			
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1,234,600,000.00	1,120,490,309.00	46,466,000.00
2	Dinas Kesehatan	72,500,000.00	40,900,000.00	7,800,000.00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	8,738,354,821.00	8,234,620,028.00	164,781,000.00
4	Kesatuan Bangsa dan Politik	22,000,000.00	22,000,000.00	281,635,000.00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	49,926,800.00	49,926,800.00	50,250,000.00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12,000,000.00	12,000,000.00	4,000,000.00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	33,750,000.00	27,460,000.00	22,250,000.00
8	Dinas Lingkungan Hidup	400,125,000.00	398,905,000.00	83,396,000.00
9	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa	145,500,000.00	136,750,000.00	69,250,000.00
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	464,425,000.00	267,646,600.00	4,500,000.00
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	232,145,000.00	227,003,000.00	500,000.00
12	Dinas Pariwisata	17,000,000.00	17,000,000.00	-
13	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	5,187,400,000.00	4,381,554,186.00	4,800,000.00
14	Dinas Perdagangan	9,000,000.00	9,000,000.00	25,200,000.00
15	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	176,250,000.00	171,150,000.00	-
16	Kecamatan Piyungan	13,450,000.00	13,450,000.00	73,845,000.00
17	Kecamatan Dlingo	17,000,000.00	17,000,000.00	4,500,000.00
18	Kecamatan Imogiri	34,600,000.00	34,600,000.00	4,860,000.00
19	Kecamatan Bantul	11,225,000.00	9,900,000.00	-
20	Kecamatan Bambanglipuro	24,250,000.00	24,250,000.00	-
21	Kecamatan Sanden	27,100,000.00	27,100,000.00	-
22	Kecamatan Sedayu	20,000,000.00	20,000,000.00	-
23	Kecamatan Srandakan	9,190,000.00	9,189,653.00	-
24	Kecamatan Pundong	25,980,000.00	25,960,000.00	-
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	121,000,000.00	120,540,000.00	-
Jumlah		17,098,771,621.00	15,418,395,576.00	848,033,000.00
II	Belanja Barang dan dan Jasa yang bersifat Hibahke Pihak Ketiga			
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4,500,000.00	990,000.00	-
2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	657,500,000.00	516,218,800.00	-
3	Dinas Perdagangan	135,200,000.00	-	-
Jumlah		797,200,000.00	517,208,800.00	-
Jumlah		17,895,971,621.00	15,935,604,376.00	1,696,066,000.00

	Anggaran 2017	Realisasi Sekolah Negeri Realisasi 2017	Realisasi Sekolah Swasta Realisasi 2016
4)	Belanja Hibah		
Rincian Penerima Belanja Hibah :			
-	Komisi Penanggulangan AIDS Daerah		
-	Belanja Hibah kepada KONI	11,617,870,000.00	7,427,567,000.00
-	Belanja Hibah kepada Pramuka	336,000,000.00	345,375,000.00
-	Belanja Hibah kepada KORPRI	264,487,500.00	210,425,000.00
-	Belanja Hibah kepada PMI	584,285,600.00	850,000,000.00
-	Belanja Hibah kepada Koperasi		-
-	Belanja Hibah kepada Sekber Kartamantul	225,000,000.00	200,000,000.00
-	Belanja Hibah KNPI		550,000,000.00
-	Belanja Hibah Pansimas	420,000,000.00	440,000,000.00
-	Belanja Hibah Kelompok Keagamaan,Lembaga dan Orsos	366,000,000.00	1,726,052,500.00
-	Belanja BOP PAUD Masyarakat/Swasta	24,880,200,000.00	15,909,600,000.00
-	Belanja Hibah Kepada SD Swasta	5,072,100,000.00	1,461,330,000.00
-	Belanja Hibah Kepada SMP Swasta	3,381,450,000.00	749,760,000.00
-	Belanja Hibah Kepada TK Swasta		50,000,000.00
-	Belanja Hibah Kepada SMA Swasta		542,250,000.00
-	Belanja Hibah Kepada SMK Swasta		1,399,710,000.00
-	KPAD	78,300,000.00	-
-	Forum Pengurangan Resiko Bencana	150,000,000.00	-
-	Sanitasi	1,398,000,000.00	-
-	Hibah Kpd MUI	15,000,000.00	-
-	BOP PAUD	485,000,000.00	-
-	Pengambilan Ijasah Sekolah Swasta	1,599,866,212.00	-
-	Belanja Hibah Kepada MI Negeri	291,500,000.00	257,144,148.00
-	Belanja Hibah Kepada MTS negeri	1,208,550,000.00	964,428,500.00

- Belanja Hibah RAPI	566,500,000.00	565,010,000.00	
- Belanja Hibah kepada NPC	125,000,000.00	125,000,000.00	
- Belanja Hibah kepada Dekopinda	151,000,000.00	151,000,000.00	
- Belanja Hibah kepadakelompok tani (WISMP)	2,160,000,000.00	2,160,000,000.00	
- Belanja Hibah kepada mertiri amartani	25,000,000.00	25,000,000.00	
Jumlah	55,401,109,312.00	50,474,188,248.00	31,862,069,500.00

Realisasi belanja hibah barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat merupakan konversi dari realisasi belanja barang dan jasa rekening barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Penganggaran belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga berdasarkan pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Dalam Pelaksanaan Belanja Hibah khususnya belanja Hibah ke PMI, KONI dan KNPI masih terdapat sisa Kas dan tidak disetor ke Kas Daerah dikarenakan dalam aturan dan NPHD nya tidak ada

a) PMI		38,413,121.00	91,923,855.00
b) KONI		965,544,559.00	162,489,086.00
c) KNPI		-	89,430,000.00

5) Belanja Bantuan Sosial	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Realisasi 2016
Belanja Bantuan Sosial adalah belanja bantuan sosial selama tahun anggaran 2017 dan 2016 dengan rincian sebagai berikut:			
a) Bantuan sosial kepada Anggota Masyarakat (Dinas Sosial)	3,829,400,000.00	1,578,600,000.00	3,045,350,000.00
b) Bantuan sosial kepada Kelompok/organisasi kemasyarakatan Masyarakat)	71,700,000.00	71,700,000.00	222,000,000.00
c) Bantuan sosial kepada Anggota Masyarakat (Bantuan Pemda DIY)			
Jumlah	3,901,100,000.00	1,650,300,000.00	3,267,350,000.00
a) Rincian Bansos kepada anggota masyarakat			
- Bansos Asistensi Orang dengan kecacatan	208,800,000.00	207,000,000.00	40,800,000.00
- Bansos WRSE	55,000,000.00	50,000,000.00	100,000,000.00
- Bansos Masyarakat/Perorangan	2,000,000,000.00	104,000,000.00	1,685,550,000.00
- Bansos Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar	945,600,000.00	687,600,000.00	269,000,000.00
- BansosRehap Rumah Tidak Layak Huni	620,000,000.00	530,000,000.00	950,000,000.00
Belanja Bantuan Sosial KPAD	71,700,000.00	71,700,000.00	
Jumlah	3,901,100,000.00	1,650,300,000.00	3,045,350,000.00
b) Rincian Bansos kepada kelompok masyarakat			
- Bansos Keagamaan,Lembaga dan Organisasi Sosial		-	152,000,000.00
- Bansos Komisi Penanggulangan Aids Daerah		71,700,000.00	70,000,000.00
Jumlah		71,700,000.00	222,000,000.00

6) Belanja Bantuan Keuangan	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Realisasi 2016
Jumlah tersebut merupakan transfer dari Pemerintah Kabupaten Bantul ke seluruh Pemerintah Desa selama tahun anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:			
1) Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemrintah Daerah Lainnya		138,687,100.00	
Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi	69,687,100.00		
Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	69,000,000.00		
2) Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa		221,483,943,100.00	
Transfer Alokasi Dana Desa	111,316,201,500.00		
Transfer Dana Desa	77,730,491,000.00		
Transfer Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	32,437,250,600.00		
3) Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		1,137,581,326.00	
Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai politik	1,137,581,326.00		
Jumlah		222,760,211,526.00	

5.1.2 b. Belanja Modal	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Realisasi 2016
Jumlah tersebut adalah realisasi belanja modal selama tahun anggaran 2017 dan 2016 terdiri atas:			
1) Belanja Tanah	10,081,550,000.00	5,353,603,817.22	11,654,412,824.00
2) Belanja Peralatan dan Mesin	91,778,834,241.00	84,538,385,071.70	61,664,752,510.95
3) Belanja Gedung dan Bangunan	61,608,324,120.00	59,099,807,740.32	71,594,199,804.00
4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	174,997,208,500.00	165,077,171,647.90	136,453,446,503.00
5) Belanja Aset Tetap Lainnya	19,066,090,050.00	18,059,083,376.00	2,270,581,020.00
6) Belanja Modal Aset Lainnya	528,925,000.00	491,213,800.00	423,140,000.00
Jumlah	358,060,931,911.00	332,619,265,453.14	284,060,532,661.95

1) Belanja Modal Tanah terealisasi antara lain	Anggaran	Realisasi	Realisasi
a) Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkampungan	4,107,515,000.00	3,424,608,840.00	7,622,103,824.00
b) Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	4,373,950,000.00	482,771,250.00	4,032,309,000.00
c) Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	1,600,085,000.00	1,446,223,727.22	
Jumlah	10,081,550,000.00	5,353,603,817.22	11,654,412,824.00
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi antara lain	Anggaran	Realisasi	Realisasi
a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	465,525,000.00	440,069,000.00	706,838,600.00
b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	2,337,320,523.00	2,207,840,010.00	279,892,000.00
c) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	12,574,334,002.00	11,603,018,280.00	2,743,278,550.00
d) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	103,750,000.00	99,675,000.00	169,250,000.00
e) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	853,225,000.00	830,635,000.00	12,350,000.00
f) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	218,800,000.00	210,039,000.00	36,484,900.00
g) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	481,145,000.00	78,695,000.00	350,499,400.00
h) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	128,875,000.00	112,865,000.00	57,279,125.00
i) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	139,974,000.00	136,377,600.00	104,464,953.00
k) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	4,493,813,717.00	3,816,044,317.00	1,432,590,268.00
l) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4,466,440,520.00	4,174,172,562.00	3,122,450,563.00
m) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	12,678,886,150.00	11,858,848,163.00	8,569,645,964.00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

n)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1,190,129,400.00	1,072,607,000.00	1,086,406,743.00
o)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	1,279,524,000.00	1,044,576,644.00	467,968,100.00
p)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	635,825,000.00	622,646,009.00	652,146,200.00
q)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	46,325,000.00	45,974,500.00	23,670,000.00
r)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	3,324,390,979.00	3,187,837,043.00	3,996,481,929.36
s)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	15,726,132,758.00	15,561,829,934.00	19,658,576,942.00
t)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	675,977,500.00	651,857,507.70	2,729,221,443.49
u)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	5,598,693,750.00	5,502,681,750.00	1,167,559,283.00
v)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	6,000,000.00	4,999,700.00	13,000,000.00
w)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	32,500,000.00	32,500,000.00	245,784,000.00
x)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	75,075,000.00	73,267,788.00	501,112,200.00
y)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Senjata Api	-	-	13,537,801,347.10
z)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	583,992,650.00	520,935,650.00	-
aa)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	18,058,413,842.00	15,044,627,164.00	-
bb)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS	5,603,765,450.00	5,603,765,450.00	-
	Jumlah	91,778,834,241.00	84,538,385,071.70	61,664,752,510.95
3)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi antara lain	Anggaran	Realisasi	Realisasi
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	50,083,221,620.00	47,969,104,016.32	61,680,426,582.00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara	150,875,000.00	149,634,253.00	-
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	1,323,787,500.00	1,309,967,536.00	1,437,318,000.00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	866,637,500.00	841,994,000.00	1,374,084,500.00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	2,092,627,000.00	2,040,534,539.00	1,592,595,722.00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	6,210,000,000.00	5,913,097,896.00	4,988,550,000.00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Billboard/Baliho/Reklame	461,775,000.00	456,075,000.00	521,225,000.00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dana BOS	419,400,500.00	419,400,500.00	-
	Jumlah	61,608,324,120.00	59,099,807,740.32	71,594,199,804.00
4)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan terealisasi antara lain	Anggaran	Realisasi	Realisasi
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	85,613,694,500.00	79,233,719,375.40	83,980,192,225.00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	989,000,000.00	887,696,941.00	3,318,405,500.00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	52,028,020,000.00	50,225,406,000.85	29,716,818,473.00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	50,000,000.00	49,200,000.00	6,167,128,000.00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	6,673,000,000.00	6,548,049,755.00	290,429,000.00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	2,674,374,000.00	2,403,942,288.00	5,975,619,000.00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	6,441,000,000.00	6,080,249,254.78	-
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	-	-	47,150,000.00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	30,875,000.00	30,250,000.00	280,419,000.00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	7,000,000.00	5,020,000.00	6,269,624,105.00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	20,230,745,000.00	19,441,060,532.87	189,585,000.00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLUD	269,500,000.00	172,577,500.00	218,076,200.00
	Jumlah	174,997,208,500.00	165,077,171,647.90	136,453,446,503.00
5)	Belanja Aset Tetap Lainnya terealisasi antara lain:	Anggaran	Realisasi	Realisasi
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	3,154,265,000.00	2,674,786,440.00	473,855,520.00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan	3,600,000.00	3,600,000.00	2,340,000.00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	710,875,000.00	596,772,200.00	209,000,000.00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	4,291,125,000.00	4,239,979,010.00	195,593,000.00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan	37,525,000.00	37,525,000.00	1,330,171,500.00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	22,000,000.00	21,563,800.00	59,621,000.00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	237,080,000.00	232,015,000.00	-
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Tak Berwujud	-	-	-
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BLUD	90,000,000.00	89,936,500.00	-
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Dana BOS	10,519,620,050.00	10,162,905,426.00	-
	Jumlah	19,066,090,050.00	18,059,083,376.00	2,270,581,020.00
5)	Belanja Aset Lainnya terealisasi antara lain:	Anggaran	Realisasi	Realisasi
	Belanja Software	378,925,000.00	342,913,800.00	423,140,000.00
	Belanja Modal Aset Lainnya - BLUD	150,000,000.00	148,300,000.00	-
	Jumlah	528,925,000.00	491,213,800.00	423,140,000.00

Realisasi belanja Modal untuk Dana Bos di SMP melebihi dari pagu anggaran yang dicantumkan dalam APBD Perubahan TA. 2017 karena usulan pagu anggarannya hanta berdasarkan estimesi bukan dari rekapan RKAS dari masing-masing sekolah.

Pada Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bantul menerima beberapa dana yang langsung ditransfer ke masing-masing SKPD berupa Dana BOS dan Dana Blockgrant yang diwujudkan sebagai belanja modal untuk pembangunan dimasing-masing SKPD Penerima

a)	Belanja yang berasal dari Dana BOS	BOSNAS 2017	BOSPROP 2017	BOSNAS 2016	BOSPROP 2016
-	Belanja modal dr sumberdana SD Dikdas	-	-	5,759,477,703.00	228,070,331.00
-	Belanja modal dr sumberdana SMP Dikdas	-	-	4,130,912,545.00	222,698,290.00
	Jumlah	-	-	9,890,390,248.00	450,768,621.00
-	Beban belanja modal dr sumberdana SMA	-	-	1,528,810,340.00	618,503,090.00
-	Beban belanja modal dr sumberdana SMK	-	-	969,024,215.00	682,149,794.00
	Jumlah	-	-	2,497,834,555.00	1,300,652,884.00
b)	Belanja yang berasal dari Dana Blockgrant dan Lainnya			TAHUN ANGGARAN 2017	TAHUN ANGGARAN 2016
-	Belanja modal dr sumberdana SD Dikdas			1,012,984,011.00	395,753,750.00
-	Belanja modal dr sumberdana SMP Dikdas			400,000,000.00	233,996,200.00
-	Belanja modal dr sumberdana SMA			-	5,767,737,375.00

Belanja modal dr sumberdana SMK			8,810,660,397.00			
	Jumlah	1,412,984,011.00	15,208,147,722.00			
5.1.2 c. Belanja Tak Terduga	34,319,269,126.42	2,121,325,557.00	520,872,300.00			
<p>Jumlah tersebut merupakan pengeluaran yang bersifat tidak biasa dan diharapkan tidak terjadi selama tahun 2017 dan 2016 dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>Belanja Fisik</p> <p>Belanja Non Fisik</p> <p>1) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak</p>				167,999,070.00		
2) Pelaksanaan operasi tanggap darurat gangguan Banjir (Dinsos,Dinkes,BPBD)		1,953,326,487.00				
3) Pengembalian sisa dana BOSNAS Tahun 2011 ke Kas Negara			520,872,300.00			
	Jumlah	34,319,269,126.42	2,121,325,557.00			
			520,872,300.00			
<p>Belanja Tak Terduga yang dipergunakan untuk pelaksanaan operasi tanggap darurat gangguan banjir yang dilaksanakan oleh BPBD terdapat belanja yang melampaui tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 571.946.991,00 Pelaksanaan kegiatan berdasarkan dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 108 tahun 2017 tentang Status Transisi Darurat Pemulihan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Kabupaten Bantul, Keputusan Bupati Bantul Nomor 377 Tahun 2017 tentang Pemberian Ijin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 400 Tahun 2017 tentang Pemberian Ijin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga</p>						
5.1.3 Transfer	14,330,194,685.00	14,330,194,685.00	197,734,695,433.00			
5.1.3 a. Transfer Bagi Hasil ke Desa	14,330,194,685.00	14,330,194,685.00	12,429,995,580.00			
<p>Jumlah tersebut merupakan transfer dari Pemerintah Kabupaten Bantul ke seluruh Pemerintah Desa selama tahun anggaran 2017 berupa pembagian hasil pajak dan pendapatan lainnya / bagi hasil retribusi yang ditentukan oleh peraturan perundangan dan pembagiannya diformulasikan sesuai dengan hasil pendapatan perwilayah, rincian sebagai berikut:</p> <p>1) Bagi Hasil Pajak</p>				12,100,150,000.00	12,100,150,000.00	9,817,383,100.00
2) Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	2,230,044,685.00	2,230,044,685.00	2,612,612,480.00			
	Jumlah	14,330,194,685.00	14,330,194,685.00			
			12,429,995,580.00			
5.1.3 b. Transfer Bantuan Keuangan			185,304,699,853.00			
<p>Jumlah tersebut merupakan transfer dari Pemerintah Kabupaten Bantul ke seluruh Pemerintah Desa selama tahun anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>1) Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya</p>				27,588,794,930.00		
2) Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa			156,733,040,500.00			
Transfer Alokasi Dana Desa						
Transfer Dana Desa						
Transfer Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa						
3) Transfer Bantuan Keuangan Lainnya			982,864,423.00			
Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai politik						
		-	185,304,699,853.00			
	Jumlah Belanja dan transfer	2,330,695,497,939.22	2,076,742,163,062.60			
			2,016,543,978,974.11			
<p>1) Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya</p> <p>Transfer bantuan keuangan ke Pemerintah daerah lainnya diberikan kepada Pemerintah Propinsi DIY sebagai bagian dari pelaksanaan pengelolaan sampah yang ada di Piyungan yang dilaksanakan oleh Propinsi DIY dhi Kartamantul yang merupakan organisasi yang dibentuk oleh Prop DIJ, Pemkab Bantul, Pemkab Sleman dan Pemkot Jogja dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa</p> <p>2) Komponen transfer bantuan keuangan ke Pemerintah Desa</p> <p>Beban transfer bantuan keuangan ke Pemerintah Desa merupakan konsekwensi dari pelaksanaan UU Desa no 6 tahun 2014 yang berupa antara lain Dana Desa (DD) yang merupakan penerusan transfer dari Pemerintah Pusat, Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten yang harus dibagi ke Desa yang sudah ditentukan formulasinya dan transfer bantuan keuangan lain berupa kegiatan yang diprakarsai oleh SKPD dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa</p> <p>Komponen transfer bantuan keuangan ke Pemerintah Desa kami informasikan dalam Bab VIII dalam Calk ini</p> <p>3) Transfer Bantuan Keuangan Lainnya</p> <p>Transfer Bantuan Keuangan Lainnya merupakan transfer keuangan yang diberikan kepada Partai Politik yang besarnya telah ditentukan oleh peraturan perundangan</p> <p>Realisasi Pendapatannya lainnya yang masuk dalam pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang syah dan terdiri dari Bantuan Keuangan dari Provinsi, Bantuan keuangan dari Kabupaten Kota , dalam rangka untuk penyajian kembali (pengungkapan saldo awal) ditempatkan pada ke Pos Pendapatan transfer di rekening Bantuan Keuangan LRA</p>						
5.1.4 Pembiayaan						
5.1.4 a. Penerimaan Pembiayaan.	261,482,037,392.54	261,454,280,812.54	293,078,441,725.81			
1) Penggunaan SILPA	254,772,037,392.54	254,841,678,796.54	283,026,051,157.81			
<p>Jumlah tersebut merupakan sisa lebih perhitungan anggaran 2016 digunakan dalam tahun anggaran 2017, dan sisa lebih perhitungan anggaran 2015 yang akan digunakan dalam tahun anggaran 2016</p>						
2) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		-	1,341,873,800.00			
<p>Jumlah tersebut merupakan hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan berupa penjualan sebagian aset eks PT Bantul Kota Mandiri</p>						
3) Penerimaan kembali dana bergulir	6,710,000,000.00	6,612,602,016.00	8,710,516,768.00			

Jumlah tersebut merupakan pengembalian pokok dana bergulir yang dikelola oleh SKPD dengan rincian sebagai berikut

a) Penerimaan piutang daerah dari Dana Bergulir Pasar	4,945,922,000.00	6,555,507,000.00
b) Penerimaan piutang daerah dari Dana Bergulir UEP / KUPK	614,266,680.00	810,679,800.00
c) Penerimaan piutang daerah dari Dana Bergulir PEKM	767,398,776.00	944,933,220.00
d) Penerimaan piutang daerah dari Dana Bergulir Alih Profesi BKK		
e) Penerimaan piutang daerah dari Dana Bergulir Budidaya Sapi	236,275,000.00	339,795,000.00
d) Penerimaan piutang daerah dari Dana Bergulir Alih Profesi Pertanian	3,500,000.00	
e) Penerimaan piutang daerah dari Dana Bergulir BMT		
f) Penerimaan piutang daerah dari Dana Bergulir Budidaya Ikan	42,000,000.00	42,000,000.00
g) Penerimaan piutang daerah dari Dana Bergulir PIK Disperindagkop	892,530.00	2,380,080.00
h) Penerimaan piutang daerah dari Dana Bergulir PSG Disperindagkop	1,185,030.00	1,705,004.00
i) Penerimaan piutang daerah dari Dana Bergulir UMKM Disperindagkop	1,000,000.00	13,516,664.00
j) Penerimaan piutang daerah dari Pasca Panen	162,000.00	
Jumlah	6,710,000,000.00	6,612,602,016.00

Jumlah	6,710,000,000.00	6,612,602,016.00	8,710,516,768.00
--------	------------------	------------------	------------------

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

1) Penyertaan Modal

Jumlah tersebut merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2017 dan 2016 yang terdiri atas:

a) BPD DIY	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	10,045,000,000.00
b) Aneka Dharma	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00	
c) PD BPR Bank Bantul	2,250,000,000.00	2,250,000,000.00	1,500,000,000.00
d) PDAM	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00	4,500,000,000.00
Jumlah	17,150,000,000.00	17,150,000,000.00	16,045,000,000.00

2) Pembayaran Pokok Utang

Jumlah	-	-	-
--------	---	---	---

3) Pemberian Dana Pinjaman Daerah

Jumlah	8,710,000,000.00	7,214,800,000.00	8,707,000,000.00
--------	------------------	------------------	------------------

Rincian Pemberian Dana Bergulir sebagai berikut:

a) Dana Bergulir Revolving Sapi			
b) Dana Bergulir KUPK		693,500,000.00	705,000,000.00
c) Dana Bergulir UMKM Dekranasda		-	-
d) Dana Bergulir Pedagang Pasar		6,007,300,000.00	7,100,000,000.00
e) Dana Bergulir PEKM		514,000,000.00	902,000,000.00
f) Dana Bergulir Budidaya Ikan		-	-
Jumlah	8,710,000,000.00	7,214,800,000.00	8,707,000,000.00

5.2. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.2.1 Pendapatan-LO

a Pendapatan Asli Daerah - LO

Jumlah tersebut adalah Saldo penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO tahun anggaran 2017 dan tahun 2016 yang terdiri atas:

1) Pajak Daerah-LO	176,834,193,716.45	145,285,625,802.72
2) Retribusi Daerah-LO	31,823,972,114.65	28,491,765,317.67
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	20,130,437,131.20	21,068,269,986.18
4) Lain – Lain PAD yang Sah-LO	292,684,272,805.45	228,882,073,481.57
Jumlah	521,472,875,767.75	423,727,734,588.14

1) Pajak Daerah-LO terdiri dari

a) Pajak Daerah-LRA	165,562,359,004.37	133,474,742,165.22
b) Penambahan Piutang Pajak	11,271,834,712.08	11,810,883,637.50
c) Kas Dibendahara Penerimaan		-
Jumlah	176,834,193,716.45	145,285,625,802.72

Penambahan Perhitungan Piutang Pajak tahun pelaporan (2017):

- Pajak Hotel			
Penambahan Ketetapan	1,571,288,893.00	1,343,915,414.33	
Pelunasan Ketetapan	1,571,288,893.00	1,343,915,414.33	
Selisih	-	-	
- Pajak Restoran			
Penambahan Ketetapan	8,922,126,638.00	6,963,922,407.37	
Pelunasan Ketetapan	8,922,132,638.00	6,963,842,407.37	
Selisih	(6,000.00)	80,000.00	
- Pajak Hiburan			
Penambahan Ketetapan	664,967,875.00	799,274,711.00	
Pelunasan Ketetapan	664,967,875.00	799,274,711.00	
Selisih	-	-	
- Pajak Parkir			
Penambahan Ketetapan	120,595,620.00	101,898,736.00	
Pelunasan Ketetapan	120,595,620.00	101,898,736.00	
Selisih	-	-	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

- Pajak air Tanah			
Penambahan Ketetapan		674,502,664.00	350,469,015.00
Pelunasan Ketetapan		638,031,158.00	308,348,990.00
Selisih		<u>36,471,506.00</u>	<u>42,120,025.00</u>
- Pajak Reklame			
Penambahan Ketetapan		2,217,334,494.58	2,163,769,729.50
Pelunasan Ketetapan		2,195,876,696.50	2,141,326,205.00
Selisih		<u>21,457,798.08</u>	<u>22,443,524.50</u>
- Pajak Bumi dan Bangunan			
Penambahan Ketetapan		10,581,602,765.00	38,905,018,487.00
Pelunasan Ketetapan			27,158,778,399.00
Selisih		<u>10,581,602,765.00</u>	<u>11,746,240,088.00</u>
- Pajak Restoran(Temuan BPK)			
Penambahan Ketetapan		-	
Pelunasan Ketetapan		38,693,695.00	
Selisih		<u>(38,693,695.00)</u>	
- Pajak Hotel (Temuan BPK)			
Penambahan Ketetapan			
Pelunasan Ketetapan		1,800,000.00	
Selisih		<u>(1,800,000.00)</u>	
- Pajak Penerangan Jalan			
Penambahan Ketetapan		672,802,338.00	
Pelunasan Ketetapan		-	
Selisih		<u>672,802,338.00</u>	
2) Retribusi Daerah-LO terdiri dari:			
a) Retribusi Daerah-LRA		31,575,738,483.00	26,613,085,433.67
b) Piutang Retribusi		248,233,631.65	1,878,679,884.00
c) Kas Dibendahara Penerimaan			-
	Jumlah	<u>31,823,972,114.65</u>	<u>28,491,765,317.67</u>
- Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi		262,764,000.00	1,851,096,249.00
- Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir		17,095,000.00	9,016,000.00
- Piutang Retribusi Parkir Jalan Umum		7,895,000.00	7,110,000.00
- Piutang Benih Padi di Kelompok Tani		(515,135.00)	11,405,135.00
- Piutang Pengelolaan Rusunawa		(52,500.00)	52,500.00
Piutang IMB		(37,466,093.35)	
Piutang Ijin Gangguan		(9,650,840.00)	
Piutang Retribusi Sampah		8,164,200.00	
	Jumlah	<u>248,233,631.65</u>	<u>1,878,679,884.00</u>
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO terdiri dari			
a) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA		20,130,437,131.20	21,068,269,986.18
b) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
	Jumlah	<u>20,130,437,131.20</u>	<u>21,068,269,986.18</u>
4) Lain – Lain PAD yang Sah-LO terdiri dari :			
a) Lain – Lain PAD yang Sah-LRA		276,908,318,565.40	222,869,319,741.00
b) Piutang Lain – Lain PAD yang Sah		15,752,828,640.05	5,966,451,640.57
c) Kas Dibendahara Penerimaan		-	-
e) Piutang Lainnya (Pinjaman Dana Bergulir)		-	-
f) Bagian Lancar Piutang TGR		23,125,600.00	46,302,100.00
	Jumlah	<u>292,684,272,805.45</u>	<u>228,882,073,481.57</u>
Penambahan Perhitungan Piutang Lain-lain PAD yg Sah tahun pelaporan (2017):			
- Piutang Layanan BLUD RSUD	Penambahan Piutang	121,421,782,454.00	110,645,079,603.00
	Pengurangan Piutang	111,255,159,545.00	110,238,963,764.00
	Selisih	<u>10,166,622,909.00</u>	<u>406,115,839.00</u>
- Piutang Layanan BLUD Puskesmas	Penambahan Piutang	1,217,282,871.00	653,858,162.00
	Pengurangan Piutang	-	-
	Selisih	<u>1,217,282,871.00</u>	<u>653,858,162.00</u>
- Piutang Pengelolaan Rusunawa	Penambahan Piutang	7,685,000.00	11,628,500.00
	Pengurangan Piutang	11,628,500.00	-
	Selisih	<u>(3,943,500.00)</u>	<u>11,628,500.00</u>
- Piutang denda PBB	Penambahan Piutang	4,421,027,010.46	4,880,017,964.00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

	Pengurangan Piutang Selisih	-	61,610,588.00
		4,421,027,010.46	4,818,407,376.00
- Piutang denda Pajak Restoran	Penambahan Piutang	351,866.67	1,468,840.00
	Pengurangan Piutang Selisih	2,880.00	98,340.00
		348,986.67	1,370,500.00
- Piutang denda Pajak Hiburan	Penambahan Piutang	72,000.00	13,547,895.00
	Pengurangan Piutang Selisih	-	-
		72,000.00	13,547,895.00
- Piutang denda Pajak Parkir	Penambahan Piutang	720.00	15,480.09
	Pengurangan Piutang Selisih	7,200.00	-
		(6,480.00)	15,480.09
- Piutang denda Pajak Air Bawah Tanah	Penambahan Piutang	8,528,178.60	15,515,388.48
	Pengurangan Piutang Selisih	407,326.08	-
		8,120,852.52	15,515,388.48
- Piutang denda Pajak Reklame	Penambahan Piutang	14,732,164.00	89,179,200.00
	Pengurangan Piutang Selisih	25,279,200.00	31,558,200.00
		(10,547,036.00)	57,621,000.00
- Piutang denda Hotel (temuan BPK)	Penambahan Piutang	-	-
	Pengurangan Piutang Selisih	864,000.00	(864,000.00)
- Piutang denda Restoran (Temuan BPK)	Penambahan Piutang	-	-
	Pengurangan Piutang Selisih	18,284,973.60	(18,284,973.60)
- Piutang Partisipasi Pembangunan Kios/Los Pasar	Penambahan Piutang	864,875,000.00	-
	Pengurangan Piutang Selisih	891,875,000.00	(27,000,000.00)
b Pendapatan Transfer-LO		1,584,800,289,711.34	1,591,150,803,157.77
Jumlah tersebut adalah Saldo penerimaan Pendapatan Transfer-LO tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2016			
1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO		1,287,256,262,558.00	1,331,352,777,163.00
2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO		131,691,087,000.00	99,912,945,000.00
3) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO		147,767,848,332.34	137,137,204,944.77
4) Bantuan Keuangan - LO		18,085,091,821.00	21,327,800,000.00
5) Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Kurang Bayar bagi hasil Pajak Propinsi)		-	1,420,076,050.00
	Jumlah	1,584,800,289,711.34	1,591,150,803,157.77
Pendapatan transfer pada Laporan Operasional seluruhnya berasal dari realisasi pendapatan transfer yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran dan Pemerintah Kabupaten Bantul belum mengakui piutang kepada Pemerintah Pusat atas kurang bayar Pendapatan transfer dari Pemerintah di atasnya			
c Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO		82,700,049,246.00	232,615,588,666.00
1) Pendapatan Hibah - LO		82,700,049,246.00	232,615,588,666.00
2) Dana Darurat - LO		-	-
3) Pendapatan Lainnya - LO		-	-
	Jumlah	82,700,049,246.00	232,615,588,666.00
Lain-lain pendapatan Daerah Yang Sah pada Laporan Operasional berasal dari realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan			
A Dana BOSNAS dan BOS Propinsi			
		BOSNAS 2017	BOSPROPINSI 2017
		BOSNAS 2016	BOS PROPINSI 2016
a) Dinas Pendidikan Dasar			
- SD		46,115,641,449.00	-
- SMP		23,972,659,058.00	-
	Jumlah	70,088,300,507.00	-
b) Dinas Pendidikan Menengah non Formal			
- SMA		-	14,426,450,000.00
- SMK		-	13,832,546,066.00
	Jumlah	-	28,258,996,066.00
B Dana dan atau barang yang bersumber dari Blockgrant			
	SKPD	Tahun Anggaran 2017	Tahun Anggaran 2016
		Transfer	Realisasi Kegiatan
a) Dinas Pertanian dan Kehutanan		600,000,000.00	600,000,000.00
b) Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olah Raga		1,412,984,011.00	1,412,984,011.00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

c)	Dinas Pendidikan Dasar (SD)	-	-	1,076,503,900.00	1,036,934,627.00
	Dinas Pendidikan Dasar (SMP)	-	-	3,062,183,143.00	3,034,287,143.00
d)	Dinas Pendidikan Menengah (SMA)	-	-	31,068,309,160.00	24,575,923,155.00
e)	Dinas Pendidikan Menengah (SMK)	-	-	27,660,081,761.00	22,590,368,635.00
	Jumlah	2,012,984,011.00	2,012,984,011.00	62,867,077,964.00	51,237,513,560.00

Sisa Kas per 31 Desember 2017 yang masih ada pada pengelola blockgrant sebesar:

a)	Dinas Pertanian dan Kehutanan	-	-	-	-
b)	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-
c)	Dinas Pendidikan Dasar	-	-	-	697,215,223.00
d)	Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal	-	-	-	26,140,496,903.00
	Jumlah	-	-	-	26,837,712,126.00

C Dana yang berupa pemberian Barang ke Sekolah dari Tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 yang baru diserahkan pada Akhir Tahun 2016 dari kegiatan ICT

	SKPD	Transfer	Realisasi Kegiatan	Transfer	Realisasi Kegiatan
a)	Dinas Pendidikan Dasar	-	-	45,194,869,642.00	45,194,869,642.00
d	Surplus Non Operasional-LO			79,950,000.00	1,771,065,800.00
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO			79,950,000.00	1,771,065,800.00
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO				
	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO				

e Pendapatan Luarbiasa-LO
Pendapatan Luar Biasa - LO

5.2.2 Beban-LO

		1,882,157,566,298.45	2,067,678,395,241.08
a	BEBAN OPERASI	1,785,135,174,342.79	1,869,422,827,508.08
1)	Beban Pegawai - LO	905,884,358,295.00	1,113,931,065,924.00
2)	Beban Persediaan	180,081,446,007.33	146,450,565,825.98
3)	Beban Pemeliharaan	38,096,547,829.28	39,616,205,592.18
4)	Beban Perjalanan Dinas	37,134,946,617.00	31,078,997,816.00
5)	Beban Jasa	380,573,833,845.00	369,610,734,290.77
6)	Beban Bunga		
7)	Beban Subsidi		
8)	Beban Hibah	66,409,792,624.00	32,710,102,500.00
9)	Beban Bantuan Sosial	1,650,300,000.00	3,267,350,000.00
9)	Beban Penyusutan dan Amortisasi	162,257,493,127.77	123,477,728,044.61
9)	Beban Penyisihan Piutang	13,046,455,997.41	9,280,077,514.54
9)	Beban Lain-lain	-	-

BEBAN OPERASI terdiri dari:

1) Beban Pegawai terdiri dari:

a)	Beban Pegawai-LRA	895,282,390,666.00	1,077,184,056,432.00
b)	Beban Pegawai (utang beban)	419,369,500.00	22,606,780.00
c)	Beban Pegawai dari Sumberdana BOS	10,182,598,129.00	18,575,849,651.00
d)	Beban Pegawai dari Sumberdana Blockgrant SD	-	20,645,000.00
e)	Beban Pegawai dari Sumberdana Blockgrant SMP	-	1,927,159,418.00
f)	Beban Pegawai dari Sumberdana Blockgrant SMA	-	7,896,873,837.00
g)	Beban Pegawai dari Sumberdana Blockgrant SMK	-	8,303,874,806.00
h)			
	Jumlah	905,884,358,295.00	1,113,931,065,924.00

c) Beban Pegawai dari Sumberdana BOS

	BOSNAS	BOSPROPINSI	BOSNAS	BOSPROPINSI
-	Beban Pegawai dr sumberdana SD Dikdas	7,010,164,063.00	-	8,629,990,989.00
-	Beban Pegawai dr sumberdana SMP Dikdas	3,172,434,066.00	-	3,234,944,740.00
	Jumlah	10,182,598,129.00	-	11,864,935,729.00
-	Beban Pegawai dr sumberdana SMA Dikmenof	-	-	573,586,057.00
-	Beban Pegawai dr sumberdana SMK Dikmenof	-	-	89,012,500.00
	Jumlah	-	-	662,598,557.00

2) Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa LO terdiri dari atas beban belanja dan jasa, dalam penghitungan beban kepada SIMDA keuangan sudah memperhitungkan beban persediaan yang mengacu pada pada penghitungan beban, termasuk didalamnya Hutang beban dan beban dibayar dimuka, ursur dari beban barang dan jasa tersebut antara lain

a) Beban Persediaan

-	Beban Bahan Pakai Habis	34,537,240,065.00	4,493,494,852.95
-	Beban Persediaan Bahan/ Material	41,912,737,648.94	43,961,171,095.29
-	Beban Persediaan BLUD	73,684,398,422.39	71,776,744,522.74
-	Beban Cetak dan Penggandaan	9,167,822,906.00	7,437,945,254.00
-	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	991,168,853.00	971,654,378.00
-	Beban Perlengkapan Penyelamatan	249,215,000.00	128,058,300.00
-	Beban Persediaan dari Dana BOSNAS dan BOSPROP	-	-
-	Beban Persediaan dari Dana BOSNAS SD	13,250,000,000.00	6,864,448,066.00
-	Beban Persediaan dari Dana BOSPROP SD	-	745,028,936.00

-	Beban Persediaan dari Dana Blockgrant SD	-	82,811,830.00
-	Beban Persediaan dari Dana BOSNAS SMP	6,288,863,112.00	3,292,840,540.00
-	Beban Persediaan dari Dana BOSPROP SMP	-	799,305,405.00
-	Beban Persediaan dari Dana Blockgrant SMP	-	68,431,750.00
-	Beban Persediaan dari Dana BOSNAS SMA	-	1,341,236,959.00
-	Beban Persediaan dari Dana BOSPROP SMA	-	243,768,778.00
-	Beban Persediaan dari Dana Blockgrant SMA	-	214,503,334.00
-	Beban Persediaan dari Dana BOSNAS SMK	-	2,307,271,791.00
-	Beban Persediaan dari Dana BOSPROP SMK	-	414,063,645.00
-	Beban Persediaan dari Dana Blockgrant SMK	-	362,183,975.00
-	Beban Persediaan dari Dana Hibah ICT	-	945,602,414.00
	Jumlah	180,081,446,007.33	146,450,565,825.98
b)	Beban Pemeliharaan		
-	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	12,729,167,082.00	9,421,828,508.18
-	Beban Pemeliharaan	12,241,543,943.28	5,676,008,308.00
-	Beban Pemeliharaan BLUD	7,402,586,804.00	4,936,077,479.00
-	Beban Pemeliharaan dari sumber dana BOSNAS dan BOSPROP	-	3,460,938,851.00
	Beban Pemeliharaan dari dana BOSNAS SD	3,600,500,000.00	3,850,978,253.00
	Beban Pemeliharaan dari dana BOSPROP SD	-	449,103,738.00
	Beban Pemeliharaan dari dana Blockgrant SD	-	112,778,197.00
	Beban Pemeliharaan dari dana BOSNAS SMP	2,122,750,000.00	2,832,909,908.00
	Beban Pemeliharaan dari dana BOSPROP SMP	-	298,043,446.00
	Beban Pemeliharaan dari dana Blockgrant SMP	-	64,083,000.00
	Beban Pemeliharaan dari dana BOSNAS SMA	-	3,079,430,660.00
	Beban Pemeliharaan dari dana BOSPROP SMA	-	377,782,300.00
	Beban Pemeliharaan dari dana Blockgrant SMA	-	1,267,237,718.00
	Beban Pemeliharaan dari dana BOSNAS SMK	-	2,077,510,359.00
	Beban Pemeliharaan dari dana BOSPROP SMK	-	688,124,682.00
	Beban Pemeliharaan dari dana Blockgrant SMK	-	1,023,370,185.00
	Jumlah	38,096,547,829.28	39,616,205,592.18
c)	Beban Perjalanan Dinas		
-	Beban Perjalanan Dinas	35,352,013,236.00	27,795,508,307.00
-	Beban Perjalanan Dinas BLUD	1,782,933,381.00	667,039,677.00
	Beban Perjalanan Dinas dari sumber dana BOSNAS dan BOSPROP		
	Beban Perjalanan Dinas dari dana BOSNAS SD	-	1,226,839,870.00
	Beban Perjalanan Dinas dari dana BOSPROP SD	-	111,867,222.00
	Beban Perjalanan Dinas dari dana Blockgrant SD	-	350,000.00
	Beban Perjalanan Dinas dari dana BOSNAS SMP	-	267,157,275.00
	Beban Perjalanan Dinas dari dana BOSPROP SMP	-	45,910,500.00
	Beban Perjalanan Dinas dari dana Blockgrant SMP	-	14,991,500.00
	Beban Perjalanan Dinas dari dana BOSNAS SMA	-	394,131,540.00
	Beban Perjalanan Dinas dari dana BOSPROP SMA	-	2,260,000.00
	Beban Perjalanan Dinas dari dana Blockgrant SMA	-	270,742,850.00
	Beban Perjalanan Dinas dari dana BOSNAS SMK	-	107,792,125.00
	Beban Perjalanan Dinas dari dana BOSPROP SMK	-	-
	Beban Perjalanan Dinas dari dana Blockgrant SMK	-	174,406,950.00
	Jumlah	37,134,946,617.00	31,078,997,816.00
d)	Beban Jasa		
	Beban Jasa Kantor	36,074,704,232.00	31,000,614,357.00
	Beban Premi Asuransi	6,567,897,370.00	14,859,560.00
	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,184,534,725.00	1,393,479,948.77
	Beban Sewa Sarana Mobilitas	1,151,322,000.00	915,225,000.00
	Beban Sewa Alat Berat	-	55,060,800.00
	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,468,991,900.00	2,406,117,500.00
	Beban Makanan dan Minuman	30,851,036,806.00	25,126,909,861.00
	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	4,371,452,625.00	295,939,899.00
	Beban Pakaian Kerja	1,503,899,200.00	1,079,931,264.00
	Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3,167,484,500.00	1,569,372,025.00
	Beban Jasa Konsultasi	10,323,712,200.00	8,532,861,750.00
	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2,740,355,900.00	3,488,632,200.00
	Beban Barang Dana BOSNAS Lainnya SD	12,244,430,733.00	19,630,358,402.00
	Beban Barang Dana BOSPROP Lainnya SD	-	1,488,103,349.00
	Beban Barang Dana Blockgrant Lainnya SD	-	424,595,850.00
	Beban Barang Dana BOSNAS Lainnya SMP	6,726,862,608.00	11,045,164,166.00
	Beban Barang Dana BOSPROP Lainnya SMP	-	626,500,468.00

Beban Barang Dana Blockgrant Lainnya SMP	-	725,625,275.00
Beban Barang Dana BOSNAS Lainnya SMA	-	7,308,917,728.00
Beban Barang Dana BOSPROP Lainnya SMA	-	1,680,394,038.00
Beban Barang Dana Blockgrant Lainnya SMA	-	9,158,828,041.00
Beban Barang Dana BOSNAS Lainnya SMK	-	7,060,203,141.00
Beban Barang Dana BOSPROP Lainnya SMK	-	1,818,326,169.00
Beban Barang Dana Blockgrant Lainnya SMK	-	3,915,872,322.00
Beban Honor PNS Dan Non PNS	51,493,103,100.00	39,873,743,085.00
Beban Uang Yang diserahkan Kepada Masyarakat	10,838,035,000.00	60,118,700.00
Beban Jasa biaya Administrai Bank dr Dana Bos	19,871,761.00	
Beban Barang Operasional BLUD	113,015,739,632.00	113,734,266,007.00
Beban Operasional Pendidikan	26,178,780,000.00	25,440,833,400.00
Beban Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	9,979,255,908.00	17,861,510,364.00
Beban Kursus-kursus DPRD	1,197,787,500.00	892,677,300.00
Beban Jasa	59,191,779,122.00	39,973,118,462.00
Beban Utang Belanja	(13,717,202,977.00)	(8,987,426,141.00)
Jumlah	380,573,833,845.00	369,610,734,290.77

	TAHUN ANGGARAN 2017		TAHUN ANGGARAN 2016	
	BOSNAS	BOSPROPINSI	BOSNAS	BOSPROPINSI
*) Beban belanja brg & jasa dari Sumberdana BOS				
- Beban belanja brg & jasa dr sumberdana SD Dikdas	12,244,430,733.00		31,572,624,591.00	2,794,103,245.00
- Beban belanja brg & jasa dr sumberdana SMP Dikdas	6,726,862,608.00		17,438,071,889.00	1,769,759,819.00
Jumlah	18,971,293,341.00	-	49,010,696,480.00	4,563,863,064.00
- Beban belanja brg & jasa dr sumberdana SMA Dikmenof			12,123,716,887.00	2,304,205,116.00
- Beban belanja brg & jasa dr sumberdana SMK Dikmenof			11,552,777,416.00	2,920,514,496.00
Jumlah	-	-	23,676,494,303.00	5,224,719,612.00

3) Beban Hibah

	TAHUN ANGGARAN 2017	TAHUN ANGGARAN 2016
Beban hibah diberikan kepada organisasi/ormas tertentu yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundangan dan dalam proses penganggaran telah sesuai.		

Dalam Laporan Operasional sesuai dengan aturan yang berlaku tidak memperhitungkan utang piutang, perangkaan sama dengan realisasi belanja LRA belum termasuk hibah melalui kegiatan pada pos belanja dan uang yang diserahkan pada masyarakat, termasuk dalam beban hibah dalam laporan operasional beban hibah yang berasal dari dana blockgrant

Beban hibah dalam laporan operasional terdiri dari

a) Beban Hibah dari APBD

Beban Hibah dari APBD merupakan beban yang bersumber dana dari APBD pada belanja hibah terdiri dari :

Komisi Penanggulangan AIDS Daerah

Beban Hibah kepada KONI	11,617,870,000.00	7,427,567,000.00
Beban Hibah kepada Pramuka	336,000,000.00	345,375,000.00
Beban Hibah kepada KORPRI	-	210,425,000.00
Beban Hibah kepada PMI	584,285,600.00	850,000,000.00
Beban Hibah kepada Koperasi	-	-
Beban Hibah kepada Sekber Kartamantul	200,000,000.00	200,000,000.00
Beban Hibah KNPI	-	550,000,000.00
Beban Hibah Pansimas	420,000,000.00	440,000,000.00
Beban Hibah Kelompok Keagamaan, Lembaga dan Orsos	14,000,000.00	1,726,052,500.00
Beban BOP PAUD Masyarakat/Swasta	24,631,200,000.00	15,909,600,000.00
Beban Hibah Kepada SD Swasta	5,072,000,000.00	1,461,330,000.00
Beban Hibah Kepada SMP Swasta	3,351,250,000.00	749,760,000.00
Beban Hibah Kepada TK Swasta	-	50,000,000.00
Beban Hibah Kepada SMA Swasta	-	542,250,000.00
Beban Hibah Kepada SMK Swasta	-	1,399,710,000.00
Beban Hibah Kepada MI Negeri	257,144,148.00	
Beban Hibah Kepada MTS negeri	964,428,500.00	
Beban Hibah RAPI	565,010,000.00	
Beban Hibah kepada NPC	125,000,000.00	
Beban Hibah kepada Dekopinda	151,000,000.00	
Beban Hibah kepadakelompok tani (WISMP)	2,160,000,000.00	
Beban Hibah kepada mertiri amartani	25,000,000.00	
Jumlah	50,474,188,248.00	31,862,069,500.00

c) Beban Hibah dari APBD dari konversi Belanja Barang dan Jasa

Beban Hibah dari APBD merupakan beban yang bersumber dana dari APBD pada belanja barang dan jasa yang dikonversi ke beban hibah terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi
- Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat		
1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1,234,600,000.00	1,120,490,309.00
2 Dinas Kesehatan	72,500,000.00	40,900,000.00
3 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	8,738,354,821.00	8,234,620,028.00
4 Kesatuan Bangsa dan Politik	22,000,000.00	22,000,000.00
5 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	49,926,800.00	49,926,800.00
6 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12,000,000.00	12,000,000.00
7 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	33,750,000.00	27,460,000.00
8 Dinas Lingkungan Hidup	400,125,000.00	398,905,000.00
9 Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa	145,500,000.00	136,750,000.00
10 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	464,425,000.00	267,646,600.00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

11 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	232,145,000.00	227,003,000.00
12 Dinas Pariwisata	17,000,000.00	17,000,000.00
13 Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	5,187,400,000.00	4,381,554,186.00
14 Dinas Perdagangan	9,000,000.00	9,000,000.00
15 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	176,250,000.00	171,150,000.00
16 Kecamatan Piyungan	13,450,000.00	13,450,000.00
17 Kecamatan Dlingo	17,000,000.00	17,000,000.00
18 Kecamatan Imogiri	34,600,000.00	34,600,000.00
19 Kecamatan Bantul	11,225,000.00	9,900,000.00
20 Kecamatan Bambanglipuro	24,250,000.00	24,250,000.00
21 Kecamatan Sanden	27,100,000.00	27,100,000.00
22 Kecamatan Sedayu	20,000,000.00	20,000,000.00
23 Kecamatan Srandakan	9,190,000.00	9,189,653.00
24 Kecamatan Pundong	25,980,000.00	25,960,000.00
25 Badan Keuangan dan Aset Daerah	121,000,000.00	120,540,000.00

Jumlah	17,098,771,621.00	15,418,395,576.00
--------	-------------------	-------------------

Belanja Barang dan dan Jasa yang bersifat Hibahke Pihak Ketiga		
1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4,500,000.00	990,000.00
2 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	657,500,000.00	516,218,800.00
3 Dinas Perdagangan	135,200,000.00	-

Jumlah	797,200,000.00	517,208,800.00
--------	----------------	----------------

Jumlah	17,895,971,621.00	15,935,604,376.00
--------	-------------------	-------------------

4) Beban Bantuan Sosial

Beban bantuan sosial diberikan kepada masyarakat tertentu yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundangan dan dalam proses penganggaran telah sesuai dan dalam Laporan Operasional sesuai dengan aturan yang berlaku tidak memperhitungkan utang piutang, perangkaan sama dengan realisasi belanja LRA

5) Beban Penyusutan dan Amortisasi

- Beban Penyusutan Tahun berjalan	162,257,493,127.77	123,477,728,044.61
- Beban Amortisasi Tahun berjalan	152,146,934,152.66	115,563,454,829.50
	10,110,558,975.11	7,914,273,215.11

Jumlah	162,257,493,127.77	123,477,728,044.61
--------	--------------------	--------------------

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	60,577,553,897.99	46,422,606,835.21
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	23,901,999,916.02	42,205,539,939.96
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	67,667,380,338.65	26,392,633,254.33
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	542,674,800.00

Total Akumulasi	152,146,934,152.66	115,563,454,829.50
-----------------	--------------------	--------------------

Beban Penyusutan dalam Laporan operasional merupan beban penyusutan selama satu tahun , untuk akumulasi penyusutan awal aset tetap dan akumulasi penyusutan akhir aset tetap dapat dilihat pada penjelasan Calk ini pada Pos Akumulasi Penyusutan di Bab Neraca

6) Beban Penyisihan Piutang

13,046,455,997.41	9,280,077,514.54
-------------------	------------------

Beban Penyisihan Piutang merupakan beban yang harus ditanggung oleh Pemerintah sebagai bagian dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan dengan besaran dan formulasi yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul no 77 Tahun 2016 al terdiri dari:

	AK P Tahun 2017	AK P Tahun 2016
a) Beban Penyisihan Piutang Pajak		
- BKAD	8,629,120,734.08	5,805,656,933.88
b) Beban Penyisihan Piutang Retribusi	3,947,077.97	15,607,473.64
- DPU	(3,456,102.03)	12,630,543.64
- BLH	789,930.00	2,976,930.00
c) Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD	3,943,017,004.36	2,836,976,166.02
- RSUD	79,258,183.75	(834,767,292.75)
- Kantor Pengelolaan Pasar	(27,000,000.00)	(6,572,500.00)
- DPPKAD		
- Beban penyisihan piutang denda pajak PBB-P2	3,555,131,906.58	2,709,981,702.38
- Beban penyisihan dan penyisihan piutang denda pajak Hotel	1,636,695.36	1,498,600.00
- Beban penyisihan dan penyisihan piutang denda pajak Hotel (Temuan BPK)	12,913,588.97	(825,760.00)
- Beban penyisihan dan penyisihan piutang denda pajak Restoran	4,125,020.21	1,244,648.00
- Beban penyisihan piutang denda pajak Restoran (Temuan BPK)	299,156,997.84	(8,724,000.00)
- Beban penyisihan piutang denda pajak Hiburan	13,022,429.62	4,742,792.07
- Beban penyisihan dan penyisihan piutang denda pajak Parkir	654,144.93	107,490.05
- Beban penyisihan dan penyisihan piutang denda pajak Air Bawah Tanah	8,068,557.11	10,640,765.78
- Beban penyisihan dan penyisihan piutang denda pajak Reklame	(3,950,520.00)	17,326,500.00
d) Beban Penyisihan Piutang Lainnya		
- Piutang Pinjaman Pedagang Pasar	24,345,500.00	50,782,750.00
- Piutang Pinjaman PEKM	117,819,946.00	241,376,777.00
- Piutang Pinjaman Penambang Pasir BKK,PP,KB)	-	-
- Piutang Pinjaman UKM	7,448,350.00	(3,924,850.00)
- Piutang Pinjaman PIK	(900,000.00)	152,500.00
- Piutang Pinjaman PSG	(1,194,900.00)	(1,720,000.00)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

-	Piutang Pinjaman Penambang Pasir (Dipertahut)	(3,500,000.00)	34,000,000.00
-	Piutang Pinjaman Sapi	263,476,250.00	232,535,000.00
-	Piutang Pinjaman Pasca Panen	(162,000.00)	-
-	Piutang Pinjaman Gurameh	44,415,500.00	22,207,750.00
-	Piutang Pinjaman KUPK	18,622,535.00	43,927,014.00
-	Piutang Pinjaman BMT	-	2,500,000.00
	Jumlah	13,046,455,997.41	9,280,077,514.54

7) Beban Lain-lain	-	-
a) Beban Lain-lain	-	-
	Jumlah	-

b) BEBAN TRANSFER	14,330,194,685.00	197,734,695,433.00
1) Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	12,100,150,000.00	9,817,383,100.00
2) Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	2,230,044,685.00	2,612,612,480.00
3) Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	27,588,794,930.00
4) Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	-	156,733,040,500.00
5) Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	982,864,423.00
6) Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	-	-

Beban transfer di Kabupaten terdiri dari:

1) Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah merupakan beban yang harus dikeluarkan Pemerintah untuk memenuhi amanat perundangan yaitu dengan membagi hasil Pajak daerah yang diperoleh tahun sebelumnya dengan menggunakan formula yang telah ditentukan, besaran beban operasional sama dengan transfer LRA dan belum memperhitungkan utang piutang

2) Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya / bagi hasil retribusi merupakan beban yang harus dikeluarkan Pemerintah untuk memenuhi amanat perundangan yaitu dengan membagi Pendapatan Lainnya / bagi hasil retribusi daerah dengan menggunakan formula yang telah ditentukan, besaran beban operasional sama dengan transfer LRA dan belum memperhitungkan utang piutang

3) beban Transfer bantuan keuangan ke Pemerintah daerah lainnya diberikan kepada Pemerintah Propinsi DIY sebagai bagian dari pelaksanaan pengelolaan sampah yang ada di Piyungan yang dilaksanakan oleh Propinsi DIY dhi Kartamantul yang merupakan organisasi yang dibentuk oleh Prop DIJ, Pemkab Bantul, Pemkab Sleman dan Pemkot Jogja termasuk bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten serta pemerintah desa dan belum memperhitungkan utang piutang

4) Beban transfer bantuan keuangan ke Pemerintah Desa merupakan konsekuensi dari pelaksanaan UU Desa no tahun 2014 yang berupa antara lain Dana Desa (DD) yang merupakan penerusan transfer dari Pemerintah Pusat, Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten yang harus dibagi ke Desa yang sudah ditentukan formulasinya dan transfer bantuan keuangan lain berupa kegiatan yang diprakarsai oleh SKPD dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa

5) Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya merupakan transfer keuangan yang diberikan kepada Partai Politik yang besarnya telah ditentukan oleh peraturan perundangan

c) DEFISIT NON OPERASIONAL		
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO		
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		

d) BEBAN LUAR BIASA	82,692,197,270.66	520,872,300.00
Beban Luar Biasa	82,692,197,270.66	520,872,300.00
Beban Luar Biasa dalam Laporan operasional merupakan beban yang dikeluarkan untuk keperluan operasional yang belum teranggarkan dan perangkaan sama dengan realisasi belanja tidak terduga di LRA dan tidak memperhitungkan utang piutang terdiri dari:		
a) Beban luar biasa fisik	-	-
b) Beban luar biasa non fisik	2,121,325,557.00	520,872,300.00
c) Beban luar lainnya	80,570,871,713.66	-
	Jumlah	82,692,197,270.66

SURPLUS/DEFISIT LO	306,895,598,426.64	181,586,796,970.83
	280,869,048,131.77	
	26,026,550,294.87	
	Tahun 2015	Tahun 2015

5.3. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Saldo Anggaran Lebih Awal	252,116,629,105.54	283,026,051,157.81
Saldo anggaran lebih awal merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2016 dan tahun 2015		

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	254,841,678,796.54	283,026,051,157.81
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan merupakan penggunaan saldo akhir tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai tahun berjalan, tahun 2017 dan tahun 2016		

Sub Total	(2,725,049,691.00)	-
-----------	--------------------	---

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	247,226,307,320.39	252,116,629,105.54
---	--------------------	--------------------

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) merupakan kas/saldo yang merupakan sisa dari pelaksanaan kegiatan tahun berjalan, sisa tahun 2016 dan tahun 2015

Sub Total	247,226,307,320.39	252,116,629,105.54
-----------	--------------------	--------------------

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya	-	-
Lain-lain	-	-

Saldo Anggaran Lebih Akhir	247,226,307,320.39	252,116,629,105.54
----------------------------	--------------------	--------------------

5.4 NERACA	Tahun 2017	Tahun 2016
------------	------------	------------

5.4.1 Aset

a. Aset Lancar

1) Kas di Kas Daerah

	229,851,336,932.90	221,268,668,753.62
--	--------------------	--------------------

Jumlah tersebut merupakan kas pemerintah daerah per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah yang terdiri atas:

a) Saldo kas Pemerintah Daerah (Kas Daerah) yang berada di Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY Cabang Bantul No. Rekening 004.111.000207	26,851,336,932.90	102,268,668,753.62
b) Deposito kurang dari 3 (tiga) bulan	203,000,000,000.00	119,000,000,000.00
	<u>229,851,336,932.90</u>	<u>221,268,668,753.62</u>

Deposito kurang dari 3 (tiga) bulan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 terdiri atas deposito pada:

a) Bank BTN Bantul	44,000,000,000.00	27,000,000,000.00
b) BRI Cabang Wirobrajan		
c) Bank BPD Bantul	40,000,000,000.00	22,000,000,000.00
d) Bank BNI Bantul	12,000,000,000.00	9,000,000,000.00
e) Bank Syariah Mandiri		
f) Bank Woori Saudara	15,000,000,000.00	3,000,000,000.00
g) Bank Muamalat Bantul	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
h) Bank Bukopin Bantul	20,000,000,000.00	5,000,000,000.00
i) Bank BRISyariah Bantul	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
j) Bank BRI Cabang Bantul	31,000,000,000.00	30,000,000,000.00
k) Bank Panin Dubai Syariah	9,000,000,000.00	
l) Bank Mandiri Bantul	2,000,000,000.00	
	<u>26,000,000,000.00</u>	<u>21,000,000,000.00</u>
Jumlah	<u>203,000,000,000.00</u>	<u>119,000,000,000.00</u>

Hasil perhitungan suku bunga diketahui suku bunga deposito yang disimpan pada Bank Woori Saudara melebihi bunga sebagaimana yang diatur oleh Lembaga Penjamin Simpanan, namun berdasarkan konfirmasi OJK kondisi Bank Woori Saudara selama tahun 2017 dalam kondisi sehat

Dalam Kas Daerah terdapat dana dari Penerimaan Lain-lain PAD yang sah komponen penerimaan lain-lain yaitu setoran dari pengembalian dana hibah yang berasal dari APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Bantul TA 2011 kepada KONI Kabupaten Bantul yang diperuntukan bagi PERSIBA, sebesar Rp11.689.669.550, Rp740.952.250,00 dan Rp69.378.200,00 dan perkembangan saldo sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp14.372.161.125,40

2) Kas di Bendahara Pengeluaran

	833,005,672.00	74,654,448.00
--	----------------	---------------

Jumlah tersebut merupakan sisa Uang Persediaan (UP)/saldo kas di bendahara pengeluaran pada Unit Organisasi/Satuan Kerja yang belum disetor ke rekening Kas Daerah per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut:

a) Kas di Bendahara Pengeluaran (Sisa UP/TU/LS)	833,005,672.00	73,492,848.00
b) Kas Dibendahara Pengeluaran Pajak Belum Disetor dan Dana belum dicairkan pihak ketiga	-	1,161,600.00
Kas/dana yang belum dicairkan pihak ketiga/Gaji Pegawai		
1) Kecamatan Dlingo	-	574,000.00
2) Kecamatan Sedayu	-	587,600.00
Jumlah	<u>-</u>	<u>1,161,600.00</u>
Jumlah	<u>833,005,672.00</u>	<u>74,654,448.00</u>

Sisa uang persediaan sebesar per 31 Desember 2017 terdiri dr::

a) Sisa UP di Dinas Kesehatan	11,412,300.00	2,291,250.00
b) Sisa TU di BPBD	85,748,250.00	-
c) Sisa UP di BPBD	7,353,043.00	-
d) Sisa UP Satpol PP		61,401,098.00
e) Sisa TU DPUPKP	44,819,800.00	9,800,000.00
f) Sisa UP di KAD		500.00
g) Sisa UP di Bag Umum	1.00	
h) Sisa UP Bagian Administrasi Pemerintahan	16,779,706.00	
i) Setoran belanja hibah	<u>666,892,572.00</u>	
Jumlah	<u>833,005,672.00</u>	<u>73,492,848.00</u>

3) Kas di Bendahara Penerimaan

	713,824,537.00	460,910,384.00
--	----------------	----------------

Jumlah tersebut merupakan penerimaan yang masih ada pada bendahara penerimaan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut:

a) Saldo pendapatan retribusi jasa umum pada obyek pariwisata yang dikelola Dinas Pariwisata yg diterima petugas pada tanggal 31 Desember 2017 dan Tahun 2018	421,706,250.00	259,575,000.00
b) Saldo pendapatan retribusi jasa umum pada obyek pariwisata Kebun Buah Mangunan , Tempat rekreasi dan olah raga, Penjualan produksi Daerah, Penjualan Produksi Usaha Daerah yang dikelola Dinas Pertanian yg diterima petugas pada tanggal 31 Desember 2017 dan baru disetor Tahun 2018	279,325,000.00	25,175,000.00
Saldo pendapatan lain-lain dari KebunBuah Mangunan yang diterima per 31 Desember 2017 dan baru disetor ke rekening Kas Daerah tahun 2018	1,198,750.00	
c) Saldo kas di pengelola Kantor Perwakilan Jakarta atas biaya inap yang sampai akhir tahun belum disetor	300,000.00	-
d) Saldo pendapatan Pajak restoran yang diterima Rekening Penampungan Pajak Restoran DPPKAD per 31 Desember 2017 dan baru dilimpahkan ke rekening Kas Daerah tahun 2018	-	73,645,488.00

e) Saldo pendapatan Pajak PBB yang diterima Rekening Penampungan PBB BKAD per 31 Desember 2017 dan baru dilimpahkan ke rekening Kas Daerah Tahun 2018	1,273,399.00	30,682,576.00
f) Mencatat piutang retribusi terminal pada Dinas Perhubungan dari data SKRD tahun 2017 dan th 2016	-	-
g) Mencatat saldo retribusi Pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan dari data SKRD th 2017 yg disetor tahun 2018	78,620.00	3,303,000.00
h) Mencatat saldo denda retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan dari SKRD th 2017 yg disetor tahun 2018	2,976,000.00	94,420.00
h) Mencatat saldo piutang retribusi terminal pada Dinas Perhubungan dari data SKRD th 2017	-	237,000.00
i) Saldo pendapatan retribusi pelayanan pasar yang dikelola Dinas Perdagangan yg diterima petugas pada tanggal 31 Desember 2017 dan baru disetor Tahun 2018	5,791,600.00	1,749,400.00
j) Saldo rekening tampungan PBB P2 yang diterima Rekening Penampungan PBB BKAD per 31 Desember 2017 dan baru dilimpahkan ke rekening Kas Daerah Tahun 2018 ke penerimaan lain-lain	810,420.00	
k) Saldo pendapatan Denda Pajak PBB P2 yang diterima Rekening Penampungan PBB BKAD per 31 Desember 2017 dan baru dilimpahkan ke rekening Kas Daerah Tahun 2018	127,498.00	
l) Saldo pendapatan BPHTB yang dikelola DPPKAD yg diterima petugas pada tanggal 31 Desember 2017 dan baru disetor Tahun 2018	-	66,517,000.00
Jumlah	713,824,537.00	460,910,384.00
4) Kas di Pengelola Dana Bergulir	4,710,000.00	43,932,000.00

Jumlah tersebut merupakan penerimaan yang masih ada pada rekening Dana Bergulir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut:

a) Saldo penerimaan dana bergulir Pedagang Pasar disetor tanggal 31 Desember 2017 dan baru dilimpahkan BPD DIY ke kas Daerah Pada Tanggal 2 Januari 2018	4,710,000.00	21,932,000.00
b) Saldo penerimaan dana bergulir Budidaya Ikan disetor tanggal 31 Desember 2017 dan baru dilimpahkan BPD DIY ke kas Daerah Pada tahun 2018	-	21,000,000.00
c) Saldo penerimaan dana bergulir PEKM disetor tanggal 31 Desember 2017 dan baru dilimpahkan BPD DIY ke kas Daerah Pada Tanggal 3 Januari 2018	-	1,000,000.00
Jumlah	4,710,000.00	43,932,000.00
	1,441,779,074.00	1,053,616,768.00
5) Kas di BLUD	13,541,504,539.49	30,269,625,119.92

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di RSUD Panembahan Senopati dan saldo kas di Puskesmas (dana kapitasi BPJS) per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016. Untuk RSUD PS telah melaksanakan BLUD sesuai dengan SK Bupati No 195 Tahun 2009 tanggal 2 Juli 2009 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD/PPK BLUD pada RSUD Panembahan Senopati dan Untuk Puskesmas berdasarkan Perpres No 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan JKN pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Daerah, dengan rincian sebagai

a BLUD RSUD PANEMBAHAN SENOPATI

1 Bank Mandiri Nomor Rekening 137-00-0534188-4	1,045,143,272.00	3,129,052,076.00
2 Bank Bantul Nomor Rekening No 320.30.00-000001	-	349,013,599.00
3 BPD Rekening No 004.111.000424	1,438,438,266.00	4,529,950,250.00
4 BRI Bantul No Rek 00000236-01-000931-30-3	1,277,143,049.00	4,526,203,970.00
5 Kas Tunai		
6 Kas intransit Bank BPD setoran pelayanan bulan Desember Tahun 2017 dan baru divalidasi sistem perbankan pada tanggal 2 Januari 2018)	647,849.00	
7 Kas intransit Bank BRI setoran pelayanan bulan Desember Tahun 2017 dan baru divalidasi sistem perbankan pada tanggal 2 Januari 2018)	47,908,481.00	22,112,947.00
8 Deposito di BRI	5,000,000,000.00	7,500,000,000.00
9 Deposito di Bank Mandiri	-	2,500,000,000.00
10 Selisih uang kecil (pembukuan)	-	-
Jumlah	8,809,280,917.00	22,556,332,842.00

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul No 22 Tahun 2013 yang telah dirubah dengan Perbup No 43 Tahun 2014 tentang sistem remunerasi pada RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, pengelolaan jasa manajemen yang berasal dari bagian perhitungan Jasa layanan RSUD Panembahan Senopati dikelola tersendiri dan dibagi dalam pos Manajerial, reward, biaya umum dan dewan Pengawas dan sampai tanggal 31 Desember 2017 masih terdapat saldo sebesar:

1 Manajerial	-	150,668,149.00
2 Reward	50,244.00	271,790,072.00
3 Biaya Umum	10,646,078.00	121,098,914.00
4 Dewan Pengawas	-	-
Jumlah	10,696,322.00	543,557,135.00
b Kas di 27 Puskesmas	4,732,223,622.49	7,713,292,277.92
NAMA PUSKESMAS	SALDO 2017	SALDO 2016
1 Srandakan	259,136,798.00	345,404,131.00
2 Sanden	91,916,789.00	47,781,952.00
3 Kretek	211,024,043.46	734,945,400.10
4 Pundong	255,748,953.00	521,793,452.00
5 Bambanglipuro	211,854,690.36	184,459,012.00
6 Pandak I	70,111,034.02	313,927,147.02

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

7 Pandak II	139,524,604.00	88,221,696.00
8 Bantul I	506,660,001.00	392,732,201.00
9 Bantul II	84,543,402.00	271,385,100.00
10 Jetis I	115,697,971.65	385,439,653.80
11 Jetis II	128,096,834.00	189,120,692.00
12 Imogori I	28,365,673.00	126,868,713.00
13 Imogiri II	102,283,274.00	60,463,124.00
14 Dlingo I	66,048,874.00	161,737,675.00
15 Dlingo II	74,904,403.00	350,128,862.00
16 Pleret	542,677,338.00	592,183,244.00
17 Piyungan	291,987,550.00	354,090,071.00
18 Banguntapan I	43,082,376.00	63,203,901.00
19 Banguntapan II	78,573,595.00	104,982,758.00
20 Banguntapan III	36,326,134.00	160,460,039.00
21 Sewon I	4,175,611.00	250,505,826.00
22 Sewon II	460,595,178.00	752,170,966.00
23 Kasihan I	498,733,257.00	243,421,486.00
24 Kasihan II	98,128,289.00	501,972,284.00
25 Pajangan	224,461,566.00	207,413,571.00
26 Sedayu I	96,869,086.00	186,431,948.00
27 Sedayu II	10,696,298.00	122,047,373.00
Jumlah	4,732,223,622.49	7,713,292,277.92

Rincian Saldo Kas di Puskesmas termasuk Kerjasama dengan BPJS perihal pelayanan kesehatan Puskesmas mempunyai tugas sebagai kemitraan Bidan Praktek Swasta dalam permohonan dan pencairan klaim pelayanan ke BPJS, per Tanggal 31 Desember 2017 di beberapa Puskesmas masih terdapat Kas yang merupakan Hak dari BPS yang belum disalurkan adalah sebagai berikut. :

Nama Puskesmas	Saldo Kas di Puskesmas			
	BANK	PENERIMAAN	PENGELUARAAN	DANA PIHAK KE 3
1 SRANDAKAN	265,011,798.00			5,875,000.00
2 SANDEN	91,694,789.00	222,000.00		
3 KRETEK	211,024,043.46			
4 PUNDONG	255,644,603.00	104,350.00		
5 BAMBANGLIPURO	216,424,690.36			4,570,000.00
6 PANDAK I	69,684,434.02	426,600.00		
7 PANDAK II	139,524,604.00			
8 BANTUL I	506,660,001.00			
9 BANTUL II	84,543,019.00		383.00	
10 JETIS I	115,906,966.65	88,000.00	3,005.00	300,000.00
11 JETIS II	128,096,834.00			
12 IMOGIRI I	28,365,673.00			
13 IMOGIRI II	108,149,274.00			5,866,000.00
14 DLINGO I	65,947,627.00	101,247.00		
15 DLINGO II	74,904,403.00			
16 PLERET	544,961,838.00	110,500.00		2,395,000.00
17 PIYUNGAN	291,987,550.00			
18 BANGUNTAPAN I	3,190,934.00		39,891,442.00	
19 BANGUNTAPAN II	77,848,495.00	700,100.00	25,000.00	
20 BANGUNTAPAN III	39,012,644.00			2,686,510.00
21 SEWON I	3,812,561.00		363,050.00	
22 SEWON II	459,727,729.00		867,449.00	
23 KASIHAN I	500,012,457.00	220,800.00		1,500,000.00
24 KASIHAN II	98,568,289.00			440,000.00
25 PAJANGAN	223,819,293.00		642,273.00	
26 SEDAYU I	96,909,086.00	55,000.00		95,000.00
27 SEDAYU II	2,283,539.00		8,412,759.00	
Jumlah	4,703,717,174.49	2,028,597.00	50,205,361.00	23,727,510.00

6) Kas Dipengelola Kegiatan

Kas dipengelola kegiatan pada saat tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masih dikelola untuk pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Bantul yang diluar Kas Daerah, Kas BLUD yang tidak menjadi bagian dari SILPA. Kas Tahun 2015 tersebut ada pada

a) Kas di Bendahara Blockgrant	-	26,837,712,126.00
Sisa Kas Dana BOS Nasional dan Bos Propinsi di Sekolah -Sekolah Lingkup		
b) Dinas Pendidikan Dasar dan beban belanja modal yang telah direalisasikan di tahun 2016	2,281,585,544.00	12,068,065,125.00
Sisa Kas Dana BOS Nasional dan Bos Propinsi di Sekolah -Sekolah Lingkup		
c) Dinas Pendidikan Menengah dan non formal dan beban belanja modal yang telah direalisasikan di tahun 2016	-	5,285,217,325.00
Jumlah	2,281,585,544.00	44,190,994,576.00

Keterangan

e) Kas Dana BOS Nasional dan Bos Propinsi di Sekolah -Sekolah Lingkup Dinas Pendidikan Dasar

	BOSNAS	BOSPROPINSI
- Sisa dr dana BOS di Dinas Pendidikan Dasar yang tercantum adalah real sisa dari Dana BOS dengan perincian sebagai berikut:		
- Sisa Dana BOS SD	737,401,888.00	-
- Sisa Dana BOS SMP	1,544,183,656.00	-
Jumlah	2,281,585,544.00	-

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor910/106/SJ tanggal 11 Januari 2017 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang Diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti dengan melakukan perubahan anggaran untuk pendapatan BOSNAS ke Lain-Lain PAD sedangkan belanja BOSNAS dirincikan dalam belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal.

Dalam rangka pelaksanaan pelaporan Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan verifikasi ulang terkait dengan sisa-sisa BOSNAS tahun sebelumnya dan realisasi pelaksanaan BOSNAS tahun 2017. Berikut hasil verifikasi ulang saldo awal dan saldo akhir BOSNAS

	Sebelum verifikasi	Setelah verifikasi
Saldo Awal	2,655,408,286.00	2,725,049,690.00
Pendapatan/Transfer dari Prov	69,984,428,123.00	70,124,262,904.00
Bunga Bank	103,872,384.00	103,344,102.00
Belanja	70,178,892,074.00	70,651,199,392.00
Biaya administrasi/Pajak	-	19,871,761.00
Saldo Akhir	2,564,816,719.00	2,281,585,543.00

7) Piutang Pajak

	39,037,862,012.78	36,395,148,034.78
A. Piutang Pajak per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 merupakan piutang pajak berdasarkan administrasi di Bidang Penagihan (DPPKAD) Kabupaten Bantul yang sudah diterbitkan surat ketetapan pajaknya (SKP/SKPT) namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 belum dibayar oleh wajib pajak dengan rincian sebagai berikut:		
Piutang Pajak	97,093,170,135.37	85,821,335,423.29
Penyisihan piutang	(58,055,308,122.59)	(49,426,187,388.51)
Piutang pajak (nilai Buku)	39,037,862,012.78	36,395,148,034.78
Penyisihan Tahun berjalan	8,629,120,734.08	5,805,656,933.88
a) Piutang pajak restoran (nilai Buku)	4,810,075.00	13,015,997.00
Piutang Pajak	30,339,493.80	30,345,493.80
Penyisihan piutang	(25,529,418.80)	(17,329,496.80)
Jumlah Piutang Th 2016	30,345,493.80	30,899,493.80
Penambahan	8,921,976,638.00	6,963,922,407.37
Pelunasan	(8,921,982,638.00)	(6,964,476,407.37)
Koreksi		
Jumlah total piutang th 2017	30,339,493.80	30,345,493.80
Klasifikasi Umur dan Prosentase Penyisihan Piutang	Saldo Penyusutan Piutang 2017	Saldo Penyusutan Piutang 2016
Kurang Lancar 1 s/d 3 Th : 75%, CI : 25 %	573,375.00	1,778,000.00
Tidak lancar /Diragukan 3 s/d 5 Th : 50%, CI : 50%	3,089,950.00	7,601,997.00
Macet > 5 Th : 0%, CI : 100%	21,866,093.80	7,949,499.80
	Total 25,529,418.80	17,329,496.80
Penyisihan Tahun berjalan	8,199,922.00	2,194,725.00
b) Piutang pajak hotel (nilai Buku)	315,000.00	3,217,282.00
Piutang Pajak	16,718,709.50	16,718,709.50
Penyisihan piutang	(16,403,709.50)	(13,501,427.50)
Jumlah Piutang Th 2016	16,718,709.50	16,858,709.50
Penambahan	1,571,288,893.00	1,343,915,414.33
Pelunasan	(1,571,288,893.00)	(1,344,055,414.33)
Jumlah total piutang th 2017	16,718,709.50	16,718,709.50
Klasifikasi Umur dan Prosentase Penyisihan Piutang	Saldo Penyusutan Piutang 2017	Saldo Penyusutan Piutang 2016
Kurang Lancar 1 s/d 3 Th : 75%, CI : 25 %	-	-
Tidak lancar /Diragukan 3 s/d 5 Th : 50%, CI : 50%	315,000.00	3,217,282.00
Macet > 5 Th : 0%, CI : 100%	16,088,709.50	10,284,145.50
	Total 16,403,709.50	13,501,427.50
Penyisihan Tahun berjalan	2,902,282.00	3,615,000.00
c) Piutang pajak hiburan (nilai Buku)	49,734,375.00	75,939,687.20
Piutang Pajak	114,003,723.10	114,003,723.10
Penyisihan piutang	(64,269,348.10)	(38,064,035.90)
Jumlah Piutang Th 2016	114,003,723.10	114,003,723.10
Penambahan	664,967,875.00	799,274,711.00
Pelunasan	(664,967,875.00)	(799,274,711.00)
Jumlah total piutang th 2017	114,003,723.10	114,003,723.10
Klasifikasi Umur dan Prosentase Penyisihan Piutang	Saldo Penyusutan Piutang 2017	Saldo Penyusutan Piutang 2016
Kurang Lancar 1 s/d 3 Th : 75%, CI : 25 %	112,500.00	24,112,312.50
Tidak lancar /Diragukan 3 s/d 5 Th : 50%, CI : 50%	49,396,875.00	3,602,749.70
Macet > 5 Th : 0%, CI : 100%	14,759,973.10	10,348,973.70
	Total 64,269,348.10	38,064,035.90
Penyisihan Tahun berjalan	26,205,312.20	3,806,121.00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

d) Piutang pajak parkir (nilai Buku)	305,500.00	1,585,426.95
Piutang Pajak	3,533,903.90	3,533,903.90
Penyisihan piutang	(3,228,403.90)	(1,948,476.95)
Jumlah Piutang Th 2016	3,533,903.90	3,533,903.90
Penambahan	120,595,620.00	101,898,736.00
Pelunasan	(120,595,620.00)	(101,898,736.00)
Jumlah total piutang th 2017	3,533,903.90	3,533,903.90
Klasifikasi Umur dan Prosentase Penyisihan Piutang	Saldo Penyusutan Piutang 2017	Saldo Penyusutan Piutang 2016
Kurang Lancar 1 s/d 3 Th : 75%, CI : 25 %	1,500.00	24,000.00
Tidak lancar /Diragukan 3 s/d 5 Th : 50%, CI : 50%	286,000.00	1,513,426.95
Macet > 5 Th : 0%, CI : 100%	2,940,903.90	411,050.00
	Total	Total
	3,228,403.90	1,948,476.95
Penyisihan Tahun berjalan	1,279,926.95	299,500.00
e) Piutang pajak air bawah tanah (nilai Buku)	87,169,842.45	67,635,296.53
Piutang Pajak	140,783,283.79	104,311,777.79
Penyisihan piutang	(53,613,441.34)	(36,676,481.26)
Jumlah Piutang Th 2016	104,311,777.79	69,661,257.79
Penambahan	674,502,664.00	350,469,015.00
Pelunasan	(638,031,158.00)	(315,818,495.00)
Jumlah total piutang th 2017	140,783,283.79	104,311,777.79
Klasifikasi Umur dan Prosentase Penyisihan Piutang	Saldo Penyusutan Piutang 2017	Saldo Penyusutan Piutang 2016
Kurang Lancar 1 s/d 3 Th : 75%, CI : 25 %	3,077,078.75	2,620,003.60
Tidak lancar /Diragukan 3 s/d 5 Th : 50%, CI : 50%	8,882,339.20	17,655,260.73
Macet > 5 Th : 0%, CI : 100%	41,654,023.39	16,401,216.93
	Total	Total
	53,613,441.34	36,676,481.26
Penyisihan Tahun berjalan	16,936,960.08	11,284,904.46
f) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (Nilai Buku)	35,432,951,888.75	32,755,144,648.75
Piutang Pajak	91,956,246,633.00	81,374,643,868.00
Penyisihan piutang	(56,523,294,744.25)	(48,619,499,219.25)
Jumlah Piutang Th 2016	81,374,643,868.00	72,567,795,020.00
Penambahan (data base berjalan)	10,581,602,765.00	38,905,018,487.00
Pelunasan	-	(30,098,169,639.00)
Koreksi karena hasil verifikasi dan perubahan data global ke dat rincian berdasar NOP		
Jumlah total piutang th 2017	91,956,246,633.00	81,374,643,868.00
Klasifikasi Umur dan Prosentase Penyisihan Piutang	Saldo Penyusutan Piutang 2017	Saldo Penyusutan Piutang 2016
Kurang Lancar 1 s/d 3 Th : 75%, CI : 25 %	4,939,508,290.75	4,586,772,159.25
Tidak lancar /Diragukan 3 s/d 5 Th : 50%, CI : 50%	7,179,267,218.50	7,306,590,995.00
Macet > 5 Th : 0%, CI : 100%	44,404,519,235.00	36,726,136,065.00
	Total	Total
	56,523,294,744.25	48,619,499,219.25
Penyisihan Tahun berjalan	7,903,795,525.00	5,795,224,516.75
f) Piutang Pajak Reklame (Nilai Buku)	176,670,072.58	174,866,024.50
Piutang Pajak	205,451,322.58	183,993,524.50
Penyisihan piutang	(28,781,250.00)	(9,127,500.00)
Jumlah Piutang Th 2016	183,993,524.50	451,355,000.00
Penambahan	2,217,334,494.58	2,163,769,729.50
Pelunasan	(2,195,876,696.50)	(2,398,413,205.00)
Koreksi lebih catat	-	(32,718,000.00)
Jumlah total piutang th 2017	205,451,322.58	183,993,524.50
Klasifikasi Umur dan Prosentase Penyisihan Piutang	Saldo Penyusutan Piutang 2017	Saldo Penyusutan Piutang 2016
Kurang Lancar 1 s/d 3 Th : 75%, CI : 25 %	28,781,250.00	9,127,500.00
Tidak lancar /Diragukan 3 s/d 5 Th : 50%, CI : 50%	-	-
Macet > 5 Th : 0%, CI : 100%	-	-
	Total	Total
	28,781,250.00	9,127,500.00
Penyisihan Tahun berjalan	19,653,750.00	9,127,500.00
f) Piutang Pajak Penerangan Jalan (Nilai Buku)	3,286,505,259.00	2,613,702,921.00
Piutang Pajak	3,286,505,259.00	2,613,702,921.00
Penyisihan piutang	-	-
Jumlah	39,038,462,012.78	35,705,107,283.93
B. Piutang pajak per 31 Desember 2016 yang merupakan tagihan piutang temuan hasil pemeriksaan BPK RI		
a) Piutang pajak restoran (nilai Buku)	(600,000.00)	661,337,440.50
Piutang Pajak	1,283,981,186.00	1,322,674,881.00
Penyisihan piutang	(1,284,581,186.00)	(661,337,440.50)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Jumlah Piutang Th 2016	1,322,674,881.00	1,359,024,881.00
Penambahan	-	-
Pelunasan	(38,693,695.00)	(36,350,000.00)
Jumlah total piutang th 2017	1,283,981,186.00	1,322,674,881.00
Penyisihan piutang		
Jumlah piutang lancar		
Klasifikasi Umur dan Prosentase Penyisihan Piutang	Saldo Penyusutan Piutang	Saldo Penyusutan Piutang
	2017	2016
Kurang Lancar 1 s/d 3 Th : 75%, CI : 25 %	-	-
Tidak lancar /Diragukan 3 s/d 5 Th : 50%, CI : 50%	-	661,337,440.50
Macet > 5 Th : 0%, CI : 100%	1,284,581,186.00	-
	Total	661,337,440.50
Penyisihan Tahun berjalan	623,243,745.50	(18,175,000.00)
b) Piutang pajak hotel (nilai buku)	-	28,703,310.35
Piutang Pajak	55,606,620.70	57,406,620.70
Penyisihan piutang	(55,606,620.70)	(28,703,310.35)
	Jumlah	690,040,750.85
Jumlah Piutang Th 2016	57,406,620.70	60,847,287.37
Penambahan	-	-
Pelunasan	(1,800,000.00)	(3,440,666.67)
Jumlah total piutang th 2017	55,606,620.70	57,406,620.70
Klasifikasi Umur dan Prosentase Penyisihan Piutang	Saldo Penyusutan Piutang	Saldo Penyusutan Piutang
	2017	2016
Kurang Lancar 1 s/d 3 Th : 75%, CI : 25 %	-	-
Tidak lancar /Diragukan 3 s/d 5 Th : 50%, CI : 50%	-	28,703,310.35
Macet > 5 Th : 0%, CI : 100%	55,606,620.70	-
	Total	28,703,310.35
Penyisihan Tahun berjalan	26,903,310.35	(1,720,333.34)
8) Piutang Retribusi	2,336,181,963.65	2,087,948,332.00
Jumlah tersebut merupakan piutang retribusi yang belum dibayar oleh debitur per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016, terdiri atas:		
Piutang Retribusi	2,336,181,963.65	2,087,948,332.00
Penyisihan piutang	(54,447,541.61)	(50,500,463.64)
Piutang retribusi (nilai Buku)	2,281,734,422.04	2,037,447,868.36
Penyisihan Tahun berjalan	(3,947,077.97)	(15,607,473.64)
a) Mencatat piutang retribusi pengendalian menara telekomunikasi pada Dinas Perhubungan dari data SKRD th 2017 dan th 2016	2,113,860,249.00	1,851,096,249.00
d) Mencatat piutang retribusi tempat khusus parkir pada Dinas Perhubungan dari data SKRD tah 2017 dan th 2016	26,111,000.00	9,016,000.00
e) Mencatat piutang retribusi parkir jalan umum pada Dinas Perhubungan dari data SKRD th 2017 dan th 2016	15,005,000.00	7,110,000.00
F) Retribusi Ijin yang sudah jadi dan belum diambil oleh Pihak ketiga pada Dinas Penanaman Modal dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 untuk retribusi IMB di Dinas PU	115,334,394.65	152,800,488.00
Jumlah Piutang Th 2016	152,800,488.00	213,318,323.00
Izin terbit Tahun 2017	1,519,291,838.11	10,989,291,667.00
Izin terbayar tahun 2017	1,556,757,931.46	(10,836,491,179.00)
Koreksi kelebihan catat IMB 2016 (perubahan perhitungan berdasarkan tanggal pendaftaran)		
Jumlah total piutang th 2017	115,334,394.65	152,800,488.00
Klasifikasi Umur dan Prosentase Penyisihan Piutang	Saldo Penyusutan Piutang	Saldo Penyusutan Piutang
	2017	2016
Kurang Lancar 1 s/d 3 Th : 75%, CI : 25 %	6,998,176.28	10,122,098.34
Tidak lancar /Diragukan 3 s/d 5 Th : 50%, CI : 50%	12,079,094.33	2,483,002.71
Macet > 5 Th : 0%, CI : 100%	12,392,051.00	22,320,322.59
	Total	34,925,423.64
Penyisihan Tahun berjalan	(3,456,102.03)	12,630,543.64
i) Retribusi Ijin yang sudah jadi dan belum diambil oleh Pihak ketiga pada Dinas Perijinan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 untuk retribusi Ijin Gangguan di BLH	20,364,120.00	30,014,960.00
Jumlah Piutang Th 2016	30,014,960.00	36,192,480.00
Izin terbit per 31 Desember 2017	188,430,410.00	4,191,722,375.00
Izin Terbayar per 31 Desember 2017	198,081,250.00	(4,194,431,815.00)
Koreksi kelebihan catat IMB 2016 (perubahan perhitungan berdasarkan tanggal pendaftaran)		(3,468,080.00)
Jumlah total piutang th 2017	20,364,120.00	30,014,960.00

	Saldo Penyusutan Piutang 2017	Saldo Penyusutan Piutang 2016
Klasifikasi Umur dan Prosentase Penyisihan Piutang		
Kurang Lancar 1 s/d 3 Th : 75%, CI : 25 %	1,360,400.00	2,112,250.00
Tidak lancar /Diragukan 3 s/d 5 Th : 50%, CI : 50%	5,163,200.00	2,688,300.00
Macet > 5 Th : 0%, CI : 100%	3,228,120.00	4,161,240.00
Total	9,751,720.00	8,961,790.00
Penyisihan Tahun berjalan	789,930.00	2,976,930.00
j) Retribusi Ijin yang sudah jadi dan belum diambil oleh Pihak ketiga pada Dinas Perijinan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 untuk retribusi Ijin Trayek di Dinas Perhubungan	700,000.00	700,000.00
Jumlah Piutang Th 2016	700,000.00	700,000.00
Izin terbit per 31 Desember 2016		10,600,000.00
Izin Terbayar per 31 Desember 2016	-	(10,600,000.00)
Koreksi kelebihan catat 2015	-	-
Jumlah total piutang th 2017	700,000.00	700,000.00
Klasifikasi Umur dan Prosentase Penyisihan Piutang		
Kurang Lancar 1 s/d 3 Th : 75%, CI : 25 %		175,000.00
Tidak lancar /Diragukan 3 s/d 5 Th : 50%, CI : 50%	350,000.00	-
Macet > 5 Th : 0%, CI : 100%		-
Total	350,000.00	175,000.00
Penyisihan Tahun berjalan	175,000.00	-
k) Retribusi Ijin yang sudah jadi dan belum diambil oleh Pihak ketiga pada Dinas Perijinan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 untuk retribusi Munuman Berakohol	25,753,000.00	25,753,000.00
Jumlah Piutang Th 2016	25,753,000.00	25,753,000.00
Penambahan	-	-
Pelunasan	-	-
Koreksi kelebihan catat 2015	-	-
Jumlah total piutang th 2017	25,753,000.00	25,753,000.00
Klasifikasi Umur dan Prosentase Penyisihan Piutang		
Kurang Lancar 1 s/d 3 Th : 75%, CI : 25 %		6,438,250.00
Tidak lancar /Diragukan 3 s/d 5 Th : 50%, CI : 50%	12,876,500.00	-
Macet > 5 Th : 0%, CI : 100%		-
Total	12,876,500.00	6,438,250.00
Penyisihan Tahun berjalan	6,438,250.00	-
l) Mencatat retribusi piutang benih padi pada beberapa kelompok tani yang belum dibayar per 31 Desember 2017 dan tahun 2016	10,890,000.00	11,405,135.00
m) Mencatat Piutang Pengelolaan Rusunawa Tahun 2017 dan tahun 2016 atas tagihan sewa yang belum dibayar oleh penyewa (iuran Sampah)	-	52,500.00
n) Mencatat Retribusi Sampah Tahun 2017 yang belum dibayar di Dinas Lingkungan	8,164,200.00	
Jumlah	2,336,183,781.65	2,087,950,150.00
9) Piutang Lain-lain PAD	22,982,923,003.92	11,173,111,368.23
Jumlah tersebut merupakan piutang retribusi yang belum dibayar oleh debitur per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016, terdiri atas:		
Piutang Lain-lain PAD		
Penyisihan piutang	(27,825,400,942.73)	(23,882,383,938.37)
Piutang Lain-lain PAD (nilai Buku)	22,982,923,003.92	11,173,111,368.23
Penyisihan Tahun Berjalan	(3,943,017,004.36)	(2,836,976,166.02)
a) Mencatat Piutang Jaminan Kesehatan atas pelayanan di BLUD RSUD	11,261,992,378.00	1,095,369,469.00
Piutang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 terdiri atas:		
a) RSUD (Tunggakan Pasien)	753,199,882.00	703,967,009.00
b) Asuransi Puri asih	17,979,733.00	17,979,733.00
c) Asuransi Wana Arthalife	12,045,138.00	12,045,138.00
d) PT ASKES Sosial/BPJS Kesehatan	9,921,715,382.00	3,772,400.00
e) PT ASKES Komersial/Inhealth	2,399,136.00	1,555,072.00
f) Bapel Jamkesos	-	170,800,625.00
g) PT Jasa Raharjo	29,205,478.00	147,909,678.00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

h)	PT Maesindo	7,568,325.00	3,848,160.00
i)	PT Madukismo/PT Madubaru	-	8,565,654.00
j)	PT Busana Rejeki Agracipta	-	
k)	UMMI KHASANAH	-	426,000.00
l)	PT BANK BRI (Persero) Tbk	-	24,500,000.00
m)	PT Busana Rejeki Agung Yogya		
n)	JAMKESDA	382,391,604.00	
o)	Jampersal Dinas Kesehatan	135,487,700.00	
p)	PT Yogyakarta Tembakau Indonesia		
q)	Depkes Jamkesmas dan Jampersal		
r)	PT Cahaya Mulia Persada Nusa		
Piutang Pasien RSUD		11,261,992,378.00	1,095,369,469.00
Piutang Pasien RSUD 2016		1,095,369,469.00	11,078,084,308.00
Penambahan		121,421,782,454.00	110,645,079,603.00
Pelunasan		(110,399,770,831.00)	(116,561,125,281.00)
koreksi klaim		(855,388,714.00)	(4,066,669,161.00)
Jumlah total piutang th 2016/7		11,261,992,378.00	1,095,369,469.00
Kurang Lancar 1 s/d 3 Th : 75%, CI : 25 %		30,212,003.00	39,477,911.25
Tidak lancar /Diragukan 3 s/d 5 Th : 50%, CI : 50%		92,936,076.00	95,810,126.00
Macet > 5 Th : 0%, CI : 100%		427,271,715.00	335,873,573.00
Penyisihan piutang		(550,419,794.00)	(471,161,610.25)
Piutang Pasien RSUD (nilai Buku)		10,711,572,584.00	624,207,858.75
Penyisihan Tahun Berjalan		79,258,183.75	107,555,927.75

Pada tahun 2017 RSUD Panembahan Senopati bekerjasama dengan Jamkesda dalam rangka pelayanan kesehatan khususnya jaminan pelayanan pengobatan, sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 terdapat pengajuan klaim tetapi belum terverifikasi secara final sebesar Rp1.026.636.600,00

b) Piutang Partisipasi Pembangunan Kios/Los Pasar			
	Jumlah total piutang	104,915,500.00	131,915,500.00
	Penyisihan piutang	(104,915,500.00)	(131,915,500.00)
	Jumlah piutang lancar	-	-
	Penyisihan Tahun Berjalan	(27,000,000.00)	(6,572,500.00)
c) Piutang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan atas pelayanan di BLUD Puskesmas			
a)	Jamkesda	724,000.00	3,005,600.00
	Jamkesda (tidak tertagih)	-	-
b)	BPJS Non Kapitasi	1,844,637,430.00	615,554,362.00
	BPJS Non Kapitasi (tidak tertagih)	-	-
c)	Jamkesmas	25,779,603.00	35,298,200.00
	Jamkesmas		
d)	BPS	-	-
	Jumlah total piutang	1,871,141,033.00	653,858,162.00
	Penyisihan piutang	-	-
	Jumlah piutang lancar	1,871,141,033.00	653,858,162.00
	Penyisihan Tahun Berjalan		

NO	PUSKESMAS	Non Kapitasi BPJS	Jamkesda	Jamkesmas
1	Bambanglipuro	28,113,800.00	-	-
2	Banguntapan I	11,005,000.00	-	-
3	Banguntapan II	105,110,000.00	-	4,431,300.00
4	Banguntapan III	-	724,000.00	-
5	Bantul I	6,905,000.00	-	-
6	Bantul II	2,715,000.00	-	-
7	Dlingo I	144,866,000.00	-	-
8	Dlingo II	-	-	-
9	Imogiri I	170,910,400.00	-	-
10	Imogiri II	-	-	2,250,150.00
11	Jetis I	153,323,330.00	-	1,428,850.00
12	Jetis II	800,000.00	-	2,352,650.00
13	Kasihani I	16,400,000.00	-	-
14	Kasihani II	2,810,000.00	-	335,500.00
15	Kretek	162,399,500.00	-	2,304,900.00
16	Pajangan	22,680,000.00	-	4,504,700.00
17	Pandak I	57,980,900.00	-	1,261,200.00
18	Pandak II	19,540,000.00	-	-
19	Piyungan	106,626,000.00	-	-
20	Pleret	93,135,000.00	-	1,356,850.00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

21 Pundong	265,510,000.00	-	-
22 Sanden	145,563,000.00	-	-
23 Sedayu I	114,842,000.00	-	-
24 Sedayu II	5,575,000.00	-	-
25 Sewon I	90,165,000.00	-	5,287,303.00
26 Sewon II	-	-	266,200.00
27 Srandakan	117,662,500.00	-	-
Jumlah	1,844,637,430.00	724,000.00	25,779,603.00

d) Mencatat Piutang Pengelolaan Rusunawa Tahun 2017 atas tagihan sewa yang belum dibayar oleh penyewa

a) Sewa hunian	6,075,000.00	2,000,000.00
b) Denda	239,500.00	47,500.00
c) Rekening Listrik	944,300.00	883,300.00
d) Rekening Air	339,200.00	652,600.00
e) Limbah	87,000.00	45,000.00
f) Koreksi kurang target dari penetapan		8,000,100.00
Jumlah total piutang	7,685,000.00	11,628,500.00
Penyisihan piutang	-	-
Jumlah piutang lancar	7,685,000.00	11,628,500.00
Penyisihan Tahun Berjalan		

e) Piutang denda pajak PBB perkotaan dan perdesaan atas tagihan 2017 yang terbagi dalam 17 kecamatan yaitu:

KD_KEC	KECAMATAN	PIUTANG DENDA	
		s/d 2017	s/d 2016
010	Srandakan	621,628,910.49	575,320,846.56
020	Sanden	441,503,997.72	367,842,973.38
030	kretek	317,164,121.07	252,681,341.28
040	Pundong	533,797,711.57	439,264,525.56
050	Bambanglipuro	858,590,999.43	749,296,793.64
060	Pandak	1,618,204,727.80	1,422,854,207.76
070	Bantul	2,594,710,927.02	2,281,208,862.90
080	Jetis	1,171,246,677.62	1,017,362,514.84
090	Imogiri	1,258,884,688.87	1,143,616,225.80
100	Dlingo	76,911,137.24	55,270,768.80
110	Pleret	1,045,519,350.59	909,298,060.08
120	Piyungan	2,497,128,244.08	2,170,025,725.92
130	Banguntapan	9,634,163,939.27	8,513,236,889.70
140	Sewon	6,170,498,550.73	5,392,667,467.32
150	Kasihlan	5,768,919,981.69	5,165,736,743.28
160	Pajangan	539,260,241.81	489,274,000.56
170	Sedayu	1,593,471,825.46	1,375,621,074.66
Jumlah		36,741,606,032.46	32,320,579,022.04
Piutang denda (nilai buku)		10,306,074,299.51	9,440,179,195.63
Piutang denda		36,741,606,032.46	32,320,579,022.00
Penyisihan piutang		(26,435,531,732.95)	(22,880,399,826.38)
Jumlah Piutang Th 2016		32,320,579,022.00	28,342,512,419.00
Penambahan		4,421,027,010.46	4,880,017,964.00
Pelunasan			(901,951,361.00)
Jumlah total piutang th 2017		36,741,606,032.46	32,320,579,022.00
Klasifikasi Umur dan Prosentase Penyisihan Piutang		Saldo Penyusutan Piutang 2017	Saldo Penyusutan Piutang 2016
Kurang Lancar	1 s/d 3 Th : 75%, CI : 25 %	1,927,829,283.91	1,744,690,837.58
Tidak lancar /Diragukan	3 s/d 5 Th : 50%, CI : 50%	3,446,048,264.88	3,507,163,677.60
Macet	> 5 Th : 0%, CI : 100%	21,061,654,184.16	17,628,545,311.20
Total		26,435,531,732.95	22,880,399,826.38
Penyisihan Tahun berjalan		3,555,131,906.58	2,709,981,702.38

Sebagai catatan data piutang denda PBB P2, data per 31 Desember 2017, Denda dihitung selama 3 bulan setelah jatuh tempo pembayaran sampai dengan 31 Desember 2017, Beberapa NOP di tabel pembayaran 2015 tidak ada di daftar ketetapan, dikarenakan daftar ketetapan pada SISMIOP mengalami perubahan selama tahun 2017

f) Piutang denda pajak Hotel yaitu:

Piutang denda (nilai buku)	151,200.00	1,787,895.36
Piutang denda	8,024,980.56	8,024,980.56
Penyisihan piutang	(7,873,780.56)	(6,237,085.20)
Jumlah Piutang Th 2016 dan 2015	8,024,980.56	8,064,180.56
Penambahan	-	-
Pelunasan	-	(39,200.00)
Jumlah total piutang th 2017 dan 2016	8,024,980.56	8,024,980.56
Klasifikasi Umur dan Prosentase Penyisihan Piutang	Saldo Penyusutan Piutang	Saldo Penyusutan Piutang

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

	2017	2016
Kurang Lancar 1 s/d 3 Th : 75%, CI : 25 %		51,600.00
Tidak lancar /Diragukan 3 s/d 5 Th : 50%, CI : 50%	151,200.00	1,633,095.36
Macet > 5 Th : 0%, CI : 100%	7,722,580.56	4,552,389.84
	7,873,780.56	6,237,085.20
Penyisihan Tahun berjalan	1,636,695.36	1,498,600.00
 g) Piutang denda pajak Pajak Hotel (Temuan BPK) yaitu:		
Piutang denda (nilai buku)	-	13,777,588.97
Piutang denda	26,691,177.94	27,555,177.94
Penyisihan piutang	(26,691,177.94)	(13,777,588.97)
Jumlah Piutang Th 2016	27,555,177.94	29,206,697.94
Penambahan	-	-
Pelunasan	(864,000.00)	(1,651,520.00)
Jumlah total piutang th 2017	26,691,177.94	27,555,177.94
 Klasifikasi Umur dan Prosentase Penyisihan Piutang		
	Saldo Penyusutan Piutang 2017	Saldo Penyusutan Piutang 2016
Kurang Lancar 1 s/d 3 Th : 75%, CI : 25 %	-	-
Tidak lancar /Diragukan 3 s/d 5 Th : 50%, CI : 50%	-	13,777,588.97
Macet > 5 Th : 0%, CI : 100%	26,691,177.94	-
	26,691,177.94	13,777,588.97
Penyisihan Tahun berjalan	12,913,588.97	(825,760.00)
 h) Piutang denda pajak Restoran yaitu:		
Piutang denda (nilai buku)	2,296,205.02	6,072,238.56
Piutang denda	14,545,383.69	14,196,397.02
Penyisihan piutang	(12,249,178.67)	(8,124,158.46)
Jumlah Piutang Th 2016	14,196,397.02	12,807,897.02
Penambahan	351,866.67	1,486,840.00
Pelunasan	(2,880.00)	(98,340.00)
Jumlah total piutang th 2017	14,545,383.69	14,196,397.02
 Klasifikasi Umur dan Prosentase Penyisihan Piutang		
	Saldo Penyusutan Piutang 2017	Saldo Penyusutan Piutang 2016
Kurang Lancar 1 s/d 3 Th : 75%, CI : 25 %	270,826.67	845,080.00
Tidak lancar /Diragukan 3 s/d 5 Th : 50%, CI : 50%	1,483,176.00	3,535,798.56
Macet > 5 Th : 0%, CI : 100%	10,495,176.00	3,743,279.90
	12,249,178.67	8,124,158.46
Penyisihan Tahun berjalan	4,125,020.21	1,244,648.00
 i) Piutang denda pajak Restoran (Temuan BPK) yaitu:		
Piutang denda (nilai buku)	-	317,441,971.44
Piutang denda	616,598,969.28	634,883,942.88
Penyisihan piutang	(616,598,969.28)	(317,441,971.44)
Jumlah Piutang Th 2016	634,883,942.88	652,331,942.88
Penambahan	-	-
Pelunasan	(18,284,973.60)	(17,448,000.00)
Jumlah total piutang th 2017	616,598,969.28	634,883,942.88
 Klasifikasi Umur dan Prosentase Penyisihan Piutang		
	Saldo Penyusutan Piutang 2017	Saldo Penyusutan Piutang 2016
Kurang Lancar 1 s/d 3 Th : 75%, CI : 25 %	-	-
Tidak lancar /Diragukan 3 s/d 5 Th : 50%, CI : 50%	-	317,441,971.44
Macet > 5 Th : 0%, CI : 100%	616,598,969.28	-
	616,598,969.28	317,441,971.44
Penyisihan Tahun berjalan	299,156,997.84	(8,724,000.00)
 j) Piutang denda pajak Hiburan yaitu:		
Piutang denda (nilai buku)	23,872,740.00	36,823,169.62
Piutang denda	54,721,787.09	54,649,787.09
Penyisihan piutang	(30,849,047.09)	(17,826,617.47)
Jumlah Piutang Th 2016	54,649,787.09	41,101,892.09
Penambahan	72,000.00	13,547,895.00
Pelunasan	-	-
Jumlah total piutang th 2017	54,721,787.09	54,649,787.09
 Klasifikasi Umur dan Prosentase Penyisihan Piutang		
	Saldo Penyusutan Piutang 2017	Saldo Penyusutan Piutang 2016
Kurang Lancar 1 s/d 3 Th : 75%, CI : 25 %	54,000.00	11,555,910.00
Tidak lancar /Diragukan 3 s/d 5 Th : 50%, CI : 50%	23,710,740.00	2,155,439.62
Macet > 5 Th : 0%, CI : 100%	7,084,307.09	4,115,267.86
	30,849,047.09	17,826,617.47

Penyisihan Tahun berjalan	13,022,429.62	4,742,792.07
k) Piutang denda pajak Parkir yaitu:		
Piutang denda (nilai buku)	139,440.00	800,064.94
Piutang denda	1,689,073.87	1,695,553.87
Penyisihan piutang	(1,549,633.87)	(895,488.94)
Jumlah Piutang Th 2016	1,695,553.87	1,680,073.78
Penambahan	720.00	15,480.09
Pelunasan	(7,200.00)	-
Jumlah total piutang th 2017	1,689,073.87	1,695,553.87

	Saldo Penyusutan Piutang 2017	Saldo Penyusutan Piutang 2016
Kurang Lancar 1 s/d 3 Th : 75%, CI : 25 %	720.00	32,940.00
Tidak lancar /Diragukan 3 s/d 5 Th : 50%, CI : 50%	137,280.00	701,244.94
Macet > 5 Th : 0%, CI : 100%	1,411,633.87	161,304.00
Total	1,549,633.87	895,488.94
Penyisihan Tahun berjalan	654,144.93	107,490.05

l) Piutang denda pajak Air Bawah Tanah) yaitu:		
Piutang denda (nilai buku)	13,332,218.39	13,279,922.97
Piutang denda	38,678,366.76	30,557,514.24
Penyisihan piutang	(25,346,148.37)	(17,277,591.26)
Jumlah Piutang Th 2016	30,557,514.24	15,134,231.40
Penambahan	8,528,178.60	2,589,450.09
Koreksi Tambah	(407,326.08)	12,925,938.39
Pelunasan		(92,105.64)
Jumlah total piutang th 2017	38,678,366.76	30,557,514.24

Klasifikasi Umur dan Prosentase Penyisihan Piutang	Saldo Penyusutan Piutang 2017	Saldo Penyusutan Piutang 2016
Kurang Lancar 1 s/d 3 Th : 75%, CI : 25 %	1,088,694.32	1,237,638.07
Tidak lancar /Diragukan 3 s/d 5 Th : 50%, CI : 50%	4,263,522.82	8,519,093.87
Macet > 5 Th : 0%, CI : 100%	19,993,931.23	7,520,859.33
Total	25,346,148.37	17,277,591.26
Penyisihan Tahun berjalan	8,068,557.11	10,640,765.78

m) Piutang denda pajak Reklame yaitu:		
Piutang denda (nilai buku)	46,658,284.00	53,254,800.00
Piutang denda	60,034,264.00	70,581,300.00
Penyisihan piutang	(13,375,980.00)	(17,326,500.00)
Jumlah Piutang Th 2016	70,581,300.00	12,960,300.00
Penambahan	14,732,164.00	39,901,500.00
Koreksi Tambah		49,277,700.00
Pelunasan	(25,279,200.00)	(31,558,200.00)
Jumlah total piutang th 2017	60,034,264.00	70,581,300.00

Klasifikasi Umur dan Prosentase Penyisihan Piutang	Saldo Penyusutan Piutang 2017	Saldo Penyusutan Piutang 2016
Kurang Lancar 1 s/d 3 Th : 75%, CI : 25 %	13,375,980.00	17,326,500.00
Tidak lancar /Diragukan 3 s/d 5 Th : 50%, CI : 50%	-	-
Macet > 5 Th : 0%, CI : 100%	-	-
Total	13,375,980.00	17,326,500.00
Penyisihan Tahun berjalan	(3,950,520.00)	17,326,500.00

Dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta meningkatkan transparansi dan kejelasan informasi maka dalam pencantuman/tampilan/face di Neraca untuk nilai piutang ditampilkan beriringan antara nilai nominal/bruto piutang dengan penyisihan piutang dan disajikan berdasarkan jenis piutang.

10) Belanja Dibayar Dimuka	375,616,706.27	969,489,397.23
Piutang Lain-lain / Belanja Dibayar dimuka	375,616,706.27	969,489,397.23

Jumlah tersebut merupakan piutang lain-lain yang belum diselesaikan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut:

a) Piutang Sewa Lahan		
Jumlah tersebut merupakan pembayaran sewa dibayar di muka atas lahan 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016		
1) Dinas Pertanian dan Kehutanan		
- Pengembangan Jati di Selopamioro		21,262,500.00
- Kebun Buah Mangunan Dlingo	32,257,367.00	129,029,467.00

(untuk sewa lahan Jati di Selopamioro dikarenakan kewenangan pindah ke Pemerintah Provinsi maka realisasi belanja dibayar dimuka tidak dilaporkan)

2) Bagian Pemerintahan Desa		
- Kebun Buah Mangunan Dlingo	61,075,170.00	122,150,340.00
- Desa Timbulharjo untuk Pasar Seni Gabusan		-
- Kawasan Olah Raga Timbulharjo,(Dikpora)	17,639,049.17	-
- Kawasan Olah Raga Wonokromo (Dikpora)	3,093,949.83	7,106,147.83
- Kawasan Olah Raga Trimulyo (Dikpora)	157,746,993.17	362,311,384.17
- Tanah kas desa Imogiri untuk relokasi Pasar Imogiri	-	-
- Tanah kas desa Imogiri untuk relokasi Pasar Imogiri II	(1,475,568.00)	16,231,244.50
- Tanah kas desa Imogiri untuk relokasi Pasar Imogiri III	(5,939,999.00)	9,245,455.00
- Tanah kas desa Tirtonirmolo untuk Pasar Niten		-
- Tanah Kas Desa Bantul untuk perpustakaan	5,625,000.00	13,125,000.00
- Tanah Kas Desa Sumberagung (sekolah Terpadu)		-
- Pemdes Wijirejo (Pasar Pijenan)		
- Argorejo (BPP)	612,500.00	1,102,500.00
- Donotirto (BPP)	447,125.00	804,825.00
- Gilangharjo (BPP)	612,500.00	1,102,500.00
- Kebon Agung (BPP)	192,500.00	346,500.00
- Srihardono (BPP)	382,375.00	688,275.00
- Poncosari (BPP)	744,625.00	1,340,325.00
- Pendowoharjo (Gudang SRG)		-
- Tirtonirmolo (Gudang SRG)		-
- Argosari (Terminal Darat)	28,773,966.00	119,255,227.00
- Srihardono (BAT)		38,199,600.00
- Sumbermulyo (BAT)		7,231,950.00
- Dling (Pasar)	(5,833,333.33)	4,166,666.67
- Pemdes Wijirejo (puskesmas)		
- Desa Tirtonirmolo untuk Puskesmas	(833,333.33)	166,666.67
- Ds Gadingharjo (Pupuk Petroganik)		(0.50)
- Ds Timbulharjo (Puskesmas Sewon II)		-
- Ds Panggunharjo (Rusunawa)	19,616,093.75	41,015,468.75
- Ds Sitimulyo (Pabrik WIG) (Dispartaru)	31,646,392.68	28,054,121.81
- Tamantirto (SD N Karangjati)		504,000.00
- Bantul (SD N Bantul Warung)		1,215,900.00
- Donotirto (Pasar Angkruksari)	(6,766,666.67)	33,833,333.33
3) RSUD Panembahan Senopati		
- Tanah kas desa Tirenggo Kec Bantul dan Gudang Barang	36,000,000.00	10,000,000.00
4) Dinas Kesehatan	-	-
- Tanah kas desa Bangunharjo Sewon		-
	-	-
Jumlah total piutang	375,616,706.27	969,489,397.23
Penyisihan Piutang	-	-
Jumlah piutang lancar	375,616,706.27	969,489,397.23

Dalam rangka mengungkapkan kembali untuk pencantuman/tampilan/face di Neraca untuk Piutang Lain-lain ditampilkan/ disajikan kembali pada pos Belanja Dibayar dimuka

11) Piutang Lainnya (Pinjaman yang diberikan kepada masyarakat)	5,512,844,052.00	5,411,066,101.00
<p>Jumlah tersebut merupakan Jumlah piutang lainnya dari berbagai bentuk pinjaman pemerintah yang diberikan kepada masyarakat baik kepada kelompok maupun perorangan di Kabupaten Bantul yang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016</p>		
<p>Dana Bergulir terdiri dari :</p>		
Piutang Pinjaman	14,776,862,986.00	14,204,551,854.00
Penyisihan piutang	(9,264,018,934.00)	(8,793,485,753.00)
Nilai Buku Pinjaman	5,512,844,052.00	5,411,066,101.00
Penyisihan tahun berjalan	470,371,181.00	621,836,941.00
a) Pengembangan Industri Kecil	8,105,000.00	8,105,000.00
<p>Jumlah piutang bersih penyesuaian per 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut:</p>		
Jumlah Piutang Th 2016 dan th 2015	277,993,856.00	280,393,856.00
Penambahan	-	-
Pelunasan	(892,530.00)	(2,400,000.00)
Jumlah total piutang PIK th 2017 dan th 2016	277,093,856.00	277,993,856.00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Penyisihan piutang		(268,988,856.00)	(269,888,856.00)
Jumlah piutang lancar		8,105,000.00	8,105,000.00
Klasifikasi Umur dan Prosentase Penyisihan Piutang			
		Saldo Penyusutan Piutang 2017	Saldo Penyusutan Piutang 2016
Kurang Lancar	1 s/d 3 Th : 75%, CI : 25 %	-	-
Tidak lancar /Diragukan	3 s/d 5 Th : 50%, CI : 50%	8,105,000.00	8,105,000.00
Macet	> 5 Th : 0%, CI : 100%	260,883,856.00	261,783,856.00
		Total	269,888,856.00
Penyisihan Tahun berjalan		(900,000.00)	152,500.00
b) Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin		4,486,078,012.00	4,739,515,900.00
Jumlah piutang bersih penyesuaian per 31 Desember 2017 , Dengan rincian sebagai berikut:			
Jumlah total piutang		4,486,078,012.00	4,739,515,900.00
Penyisihan piutang		(3,908,146,089.00)	(3,790,326,143.00)
Jumlah piutang lancar		577,931,923.00	949,189,757.00
modal usaha 2005 s/d 2012		24,500,000,000.00	24,500,000,000.00
a) Revolving s/d 2013		25,314,000,000.00	25,314,000,000.00
		Jumlah a	49,814,000,000.00
angsuran masuk		44,578,056,663.00	44,578,056,663.00
b) keluar tunai		856,499,000.00	856,499,000.00
		Jumlah b	45,434,555,663.00
c) dana beredar (selisih Jumlah a dan b)		Jumlah c	4,379,444,337.00
penggunaan dana revolving reaward		25,314,000,000.00	25,314,000,000.00
d) kandang peningkatan SDM		17,655,500,000.00	17,655,500,000.00
		836,250,000.00	836,250,000.00
		181,607,500.00	181,607,500.00
		Jumlah d	43,987,357,500.00
e) Total Angsuran - penggunaan (selisih antara angsuran masuk dan penggunaan dana)		590,699,163.00	590,699,163.00
f) total dana pekm beredar (jumlah c dan jumlah e) per 31 Desember 2013		4,970,143,500.00	4,970,143,500.00
g) dukungan data per 31 Desember 2013		4,964,514,758.00	4,964,514,758.00
h) selisih		5,628,742.00	5,628,742.00
Jumlah Piutang Th 2013		4,964,514,758.00	4,964,514,758.00
Penambahan		1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
Pelunasan		1,262,954,134.00	1,262,954,134.00
Jumlah total piutang PEKM th 2014		4,801,560,624.00	4,801,560,624.00
Penyisihan piutang		(3,199,781,218.50)	(3,199,781,218.50)
Jumlah piutang lancar		1,601,779,405.50	1,601,779,405.50
Jumlah Piutang Th 2016 dan th 2015		4,739,515,900.00	4,782,410,008.00
Penambahan		514,000,000.00	902,000,000.00
Penambahan selisih pembulatan			
koreksi setoran yang belum dapat diidentifikasi kelompoknya		(39,112.00)	39,112.00
Pelunasan		(767,398,776.00)	(944,933,220.00)
Jumlah total piutang th 2017 dan tahun 2016		-	4,739,515,900.00
Penyisihan piutang		(3,908,146,089.00)	(3,790,326,143.00)
Jumlah piutang lancar		577,931,923.00	949,189,757.00
Klasifikasi Umur dan Prosentase Penyisihan Piutang			
		Saldo Penyusutan Piutang 2017	Saldo Penyusutan Piutang 2016
Kurang Lancar	1 s/d 3 Th : 75%, CI : 25 %	26,781,215.00	54,730,973.00
Tidak lancar /Diragukan	3 s/d 5 Th : 50%, CI : 50%	86,511,048.00	61,104,900.00
Macet	> 5 Th : 0%, CI : 100%	3,794,853,826.00	3,674,490,270.00
		Total	3,790,326,143.00
Penyisihan Tahun berjalan		117,819,946.00	241,376,777.00
c) Pasar Seni Gabusan		-	-
Jumlah piutang bersih penyesuaian per 31 Desember 2017 , Dengan rincian sebagai berikut:			
Jumlah Piutang Th 2016 dan th 2015		574,373,467.00	576,093,467.00
Penambahan		-	-
Pelunasan		(1,185,030.00)	(1,720,000.00)
Jumlah total piutang th 2017 dan tahun 2016		573,178,567.00	574,373,467.00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Penyisihan piutang		(573,178,567.00)	(574,373,467.00)
Jumlah piutang lancar		-	-
Klasifikasi Umur dan Prosentase Penyisihan Piutang		Saldo Penyusutan Piutang 2017	Saldo Penyusutan Piutang 2016
Kurang Lancar 1 s/d 3 Th : 75%, CI : 25 %		-	-
Tidak lancar /Diragukan 3 s/d 5 Th : 50%, CI : 50%		-	-
Macet > 5 Th : 0%, CI : 100%		573,178,567.00	574,373,467.00
Penyisihan Tahun berjalan		Total (1,194,900.00)	574,373,467.00 (1,720,000.00)
d) Usaha Kecil Menengah		95,508,525.00	103,956,875.00
Jumlah piutang bersih penyesuaian per 31 Desember 2017 , Dengan rincian sebagai berikut:			
Jumlah Piutang Th 2016 dan th 2015		290,548,890.00	304,661,090.00
Penambahan			
Pelunasan Pokok dan Bunga		(1,000,000.00)	(14,112,200.00)
Jumlah total piutang th 2017 dan tahun 2016		289,548,890.00	290,548,890.00
Penyisihan piutang		(194,040,365.00)	(186,592,015.00)
Jumlah piutang lancar		95,508,525.00	103,956,875.00
Klasifikasi Umur dan Prosentase Penyisihan Piutang		Saldo Penyusutan Piutang 2017	Saldo Penyusutan Piutang 2016
Kurang Lancar 1 s/d 3 Th : 75%, CI : 25 %		16,418,025.00	21,597,625.00
Tidak lancar /Diragukan 3 s/d 5 Th : 50%, CI : 50%		46,254,450.00	33,126,500.00
Macet > 5 Th : 0%, CI : 100%		131,367,890.00	131,867,890.00
Penyisihan Tahun berjalan		Total 7,448,350.00	186,592,015.00 (3,924,850.00)
e) Kredit Usaha Peningkatan Kesejahteraan		943,821,176.00	864,593,256.00
Jumlah piutang bersih penyesuaian per 31 Desember 2017 , Dengan rincian sebagai berikut:			
Jumlah Piutang Th 2016 dan th 2015		864,593,256.00	970,267,656.00
Penambahan		693,500,000.00	705,000,000.00
Pelunasan		(614,266,680.00)	(810,679,800.00)
Koreksi kelebihan setor tahun lalu		(5,400.00)	5,400.00
Jumlah total piutang th 2017 dan tahun 2016		943,821,176.00	864,593,256.00
Penyisihan piutang		(197,918,572.00)	(179,296,037.00)
Jumlah piutang lancar		745,902,604.00	685,297,219.00
Klasifikasi Umur dan Prosentase Penyisihan Piutang		Saldo Penyusutan Piutang 2017	Saldo Penyusutan Piutang 2016
Kurang Lancar 1 s/d 3 Th : 75%, CI : 25 %		29,656,816.00	25,940,541.00
Tidak lancar /Diragukan 3 s/d 5 Th : 50%, CI : 50%		29,057,156.00	32,600,596.00
Macet > 5 Th : 0%, CI : 100%		139,204,600.00	120,754,900.00
Penyisihan Tahun berjalan		Total 18,622,535.00	179,296,037.00 43,927,014.00
f) Sapi Potong		1,102,550,000.00	1,627,926,250.00
Jumlah piutang bersih penyesuaian per 31 Desember 2017 , Dengan rincian sebagai berikut:			
Jumlah Piutang Th 2016 dan th 2015		2,783,485,000.00	3,176,865,000.00
Penambahan		-	-
Pelunasan		236,275,000.00	393,380,000.00
Jumlah total piutang th 2017 dan tahun 2016		2,521,585,000.00	2,783,485,000.00
Penyisihan piutang		(1,419,035,000.00)	(1,155,558,750.00)
Jumlah piutang lancar		1,102,550,000.00	1,627,926,250.00
Klasifikasi Umur dan Prosentase Penyisihan Piutang		Saldo Penyusutan Piutang 2017	Saldo Penyusutan Piutang 2016
Kurang Lancar 1 s/d 3 Th : 75%, CI : 25 %		61,382,500.00	205,058,750.00
Tidak lancar /Diragukan 3 s/d 5 Th : 50%, CI : 50%		408,452,500.00	-
Macet > 5 Th : 0%, CI : 100%		949,200,000.00	950,500,000.00
Penyisihan Tahun berjalan		Total 263,476,250.00	1,155,558,750.00 232,535,000.00

g) Alih Profesi Penambang Pasir Dinas Pertanian	-	-
Jumlah piutang bersih penyesuaian per 31 Desember 2017 , Dengan rincian sebagai berikut:		
Jumlah Piutang Th 2016 dan th 2015	68,000,000.00	68,000,000.00
Penambahan	-	-
Pelunasan	3,500,000.00	-
Jumlah total piutang th 2017 dan tahun 2016	64,500,000.00	68,000,000.00
Penyisihan piutang	(64,500,000.00)	(68,000,000.00)
Jumlah piutang lancar	-	-
Klasifikasi Umur dan Prosentase Penyisihan Piutang	Saldo Penyusutan Piutang 2017	Saldo Penyusutan Piutang 2016
Kurang Lancar 1 s/d 3 Th : 75%, CI : 25 %	-	-
Tidak lancar /Diragukan 3 s/d 5 Th : 50%, CI : 50%	-	-
Macet > 5 Th : 0%, CI : 100%	64,500,000.00	68,000,000.00
	Total	68,000,000.00
Penyisihan Tahun berjalan	(3,500,000.00)	34,000,000.00
h) Alih Profesi Penambang Pasir BKKPP dan KB	-	-
Jumlah piutang bersih penyesuaian per 31 Desember 2017 , Dengan rincian sebagai berikut:		
Jumlah Piutang Th 2017 dan th 2016	156,772,650.00	156,772,650.00
Penambahan	-	-
Pelunasan	-	-
Jumlah total piutang th 2017 dan tahun 2016	156,772,650.00	156,772,650.00
Penyisihan piutang	(156,772,650.00)	(156,772,650.00)
Jumlah piutang lancar	-	-
Klasifikasi Umur dan Prosentase Penyisihan Piutang	Saldo Penyusutan Piutang 2017	Saldo Penyusutan Piutang 2016
Kurang Lancar 1 s/d 3 Th : 75%, CI : 25 %	-	-
Tidak lancar /Diragukan 3 s/d 5 Th : 50%, CI : 50%	-	-
Macet > 5 Th : 0%, CI : 100%	156,772,650.00	156,772,650.00
	Total	156,772,650.00
Penyisihan Tahun berjalan	-	-
i) Budidaya Ikan Gurami	-	90,615,500.00
Jumlah piutang bersih penyesuaian per 31 Desember 2017 , Dengan rincian sebagai berikut:		
Jumlah Piutang Th 2016 dan th 2015	362,049,000.00	408,249,000.00
Penambahan	-	-
Pelunasan	(42,000,000.00)	(46,200,000.00)
Jumlah total piutang th 2017 dan tahun 2016	315,849,000.00	362,049,000.00
Penyisihan piutang	(315,849,000.00)	(271,433,500.00)
Jumlah piutang lancar	-	90,615,500.00
Klasifikasi Umur dan Prosentase Penyisihan Piutang	Saldo Penyusutan Piutang 2017	Saldo Penyusutan Piutang 2016
Kurang Lancar 1 s/d 3 Th : 75%, CI : 25 %	-	-
Tidak lancar /Diragukan 3 s/d 5 Th : 50%, CI : 50%	-	44,415,500.00
Macet > 5 Th : 0%, CI : 100%	315,849,000.00	227,018,000.00
	Total	271,433,500.00
Penyisihan Tahun berjalan	44,415,500.00	22,207,750.00
Pada tahun 2016 terdapat setoran pembayaran angsuran dari 2 kelompok pembudidaya ikan sebesar Rp 23.100.000,00 yang terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp21.000.00,00 dan jasa sebesar Rp2.100.000,00. Dikarenakan terjadi kesalahan pembayaran pemindah bukaan yang tidak langsung dilimpahkan ke Kas Daerah pada tahun 2016. Kas tersebut baru disetor ke kas daerah pada tanggal 26 Januari 2017		
j) Lembaga Keuangan Mikro BMT	-	-
Jumlah piutang bersih penyesuaian per 31 Desember 2017 , Dengan rincian sebagai berikut:		
Jumlah Piutang Th 2016 dan th 2015	5,000,000.00	5,000,000.00
Penambahan	-	-
Pelunasan	-	-
Jumlah total piutang th 2017 dan tahun 2016	5,000,000.00	5,000,000.00
Penyisihan piutang	(5,000,000.00)	(5,000,000.00)
Jumlah piutang lancar	-	-

Klasifikasi Umur dan Prosentase Penyisihan Piutang	Saldo Penyusutan Piutang 2017	Saldo Penyusutan Piutang 2016
Kurang Lancar 1 s/d 3 Th : 75%, CI : 25 %	-	-
Tidak lancar /Diragukan 3 s/d 5 Th : 50%, CI : 50%	-	-
Macet > 5 Th : 0%, CI : 100%	5,000,000.00	5,000,000.00
	Total	5,000,000.00
Penyisihan Tahun berjalan	-	2,500,000.00
k) Pemberdayaan Pedagang Pasar	3,462,079,000.00	2,400,701,000.00
Jumlah piutang bersih penyesuaian per 31 Desember 2017 , Dengan rincian sebagai berikut:		
Jumlah Piutang Th 2016 dan th 2015	2,400,701,000.00	1,856,208,000.00
Penambahan	6,007,300,000.00	7,100,000,000.00
Pelunasan	(4,945,922,000.00)	(6,555,507,000.00)
Jumlah total piutang th 2017 dan tahun 2016	3,462,079,000.00	2,400,701,000.00
Penyisihan piutang	(479,071,000.00)	(454,725,500.00)
Jumlah piutang lancar	2,983,008,000.00	1,945,975,500.00
Klasifikasi Umur dan Prosentase Penyisihan Piutang	Saldo Penyusutan Piutang 2017	Saldo Penyusutan Piutang 2016
Kurang Lancar 1 s/d 3 Th : 75%, CI : 25 %	48,110,000.00	57,388,000.00
Tidak lancar /Diragukan 3 s/d 5 Th : 50%, CI : 50%	30,706,000.00	50,833,500.00
Macet > 5 Th : 0%, CI : 100%	400,255,000.00	346,504,000.00
	Total	479,071,000.00
Penyisihan Tahun berjalan	24,345,500.00	50,782,750.00
Program pemberdayaan pedagang melalui dana bergulir ini dimaksudkan untuk menambah modal usaha pedagang agar dapat meningkatkan usahanya melalui penguatan modal untuk berdagang serta terlepas dari jeratan rentenir. Selain hal tersebut diatas, dana bergulir juga bertujuan untuk pengentasan kemiskinan. Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan bahwa masih banyak pedagang yang menggunakan jasa rentenir dalam menambah modal usahanya, dimana dana dapat diperoleh dengan mudah dan cepat serta tanpa persyaratan yang berbelit-belit meskipun dengan bunga yang tinggi.		
Pada awalnya dana bergulir ditujukan untuk pedagang arahan yang lemah dalam permodalannya, namun seiring berjalannya waktu serta sesuai dengan dasar hukum yang digunakan, dana bergulir ditujukan untuk pedagang tetap yang berjualan di pasar tradisional.		
Guna pemerataan pengguna dana bergulir untuk pedagang pasar, maka pada saat ini nominal pinjaman yang diterima oleh pedagang maksimal Rp 1.000.000,- dengan jangka waktu angsuran 100 kali angsuran dengan bunga 2 % yang dibayar di depan dan dengan syarat yang mudah yaitu fotocopy KTP pedagang. Dengan sedikitnya bunga yang dikenakan dan mudahnya persyaratan pinjaman dana bergulir yang ada saat ini, Kantor Pengelolaan Pasar berharap agar para pedagang mengurangi pinjaman kepada rentenir yang mengenakan bunga yang sangat besar yang mana justru memberatkan bagi pedagang itu sendiri. Sehingga saat ini pengelolaan dana bergulir di Kantor Pasar belum melakukan persyaratan/perjajian sebagai syarat pencairan.		
l) Pengelolaan Piutang Pasca Panen	1,681,356,835.00	-
Jumlah Piutang Th 2016 dan th 2015	1,681,518,835.00	1,681,518,835.00
Penambahan Tahun 2016	-	-
Pengembalian Tahun 2016 dan tahun 2015	(162,000.00)	-
Jumlah total piutang th 2017 dan tahun 2016	1,681,356,835.00	1,681,518,835.00
Penyisihan piutang	(1,681,518,835.00)	(1,681,518,835.00)
Jumlah piutang lancar	(162,000.00)	-
Klasifikasi Umur dan Prosentase Penyisihan Piutang	Saldo Penyusutan Piutang 2017	Saldo Penyusutan Piutang 2016
Kurang Lancar 1 s/d 3 Th : 75%, CI : 25 %	-	-
Tidak lancar /Diragukan 3 s/d 5 Th : 50%, CI : 50%	-	-
Macet > 5 Th : 0%, CI : 100%	1,681,356,835.00	1,681,518,835.00
	Total	1,681,356,835.00
Penyisihan Tahun berjalan	(162,000.00)	-
Piutang yang berasal dari perikatan khususnya dana bergulir sesuai dengan tata pengelolaan yang ada di Pemerintah Kabupaten Bantul dan mengacu pada Buletin Teknis Nomor 7 Standart Akuntansi Pemerintahan pada pos neraca tercantum dan ditempatkan pada aset lancar pos piutang lainnya		
12) Piutang TGR / Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	23,125,600.00	46,302,100.00
Jumlah tersebut merupakan bagian dari SKTJM yang pengembaliannya lebih dari 1 tahun karena kerugian PNS yang mendapat bea siswa pendidikan S2 tetapi tidak mampu menyelesaikan studynya		
Jumlah total piutang	23,125,600.00	46,302,100.00
Penyisihan Piutang	-	-
Jumlah piutang lancar	23,125,600.00	46,302,100.00
Data kerugian PNS yang mendapat bea siswa pendidikan S2 tetapi tidak mampu menyelesaikan studynya , PNS yang mengalami musibah kehilangan kendaraan dinas, kerugian belanja pada kegiatan yang telah lampau antara lain		
- TGR pengembalian Bea Siswa	3,136,000.00	20,312,500.00
- TGR Kehilangan Kendaraan Dinas	3,000,000.00	3,000,000.00
- TGR Kelebihan Belanja (gaji)	16,989,600.00	22,989,600.00
	Jumlah	46,302,100.00

13) Piutang Lain-lain	2,699,133,340.86	1,420,076,050.00
Jumlah tersebut merupakan alokasi dana bagi hasil kurang bayar berdasar SK Gubernur DIY No.23/Kep/2017 tentang Bagi Hasil kurang bayar atas penerimaan pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2016		
Jumlah total piutang	2,699,133,340.86	1,420,076,050.00
Penyisihan Piutang	-	-
Jumlah piutang lancar	2,699,133,340.86	1,420,076,050.00
Data realisasi dana bagi hasil kurang bayar sebagai berikut:		
- Pajak Kendaraan Bermotor	1,434,461,118.87	605,743,650.00
- Bea balik Nama Kendaraan Bermotor	617,556,051.00	494,013,250.00
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	635,024,383.55	319,266,400.00
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	12,091,787.44	1,052,750.00
- Pajak Rokok		
Jumlah	2,699,133,340.86	1,420,076,050.00
14) Persediaan	49,634,079,006.70	48,774,707,769.70

Jumlah tersebut adalah persediaan barang habis pakai habis yang masih tersisa dengan rincian sebagai berikut:

- Nilai Persediaan per 31 Desember 2016	48,774,707,769.70	41,311,367,632.77
- Penambahan tahun 2017	127,370,165,899.00	153,913,905,962.91
- Penggunaan dalam tahun 2017 dan	119,598,143,923.00	146,450,565,825.98
- Reklas barang yg diserahkan (ICT)	6,912,650,739.00	
- Jumlah Saldo akhir	49,634,079,006.70	48,774,707,769.70

Dalam laporan persediaan per 31 Desember 2017 khususnya persediaan obat tidak termasuk obat yang telah kadaluarsa /rusak di RSUD sebesar Rp142.661.704,00 , obat kadaluarsa di Dinas Kesehatan (gudang farmasi) sebesar Rp173.281.484,00 dan di Puskesmas sebesar Rp82.402.697,87 dengan rincian sebagai berikut

NO	PUSKESMAS	2017	2016
1	Bambanglipuro	2,561,618.80	4,773,244.20
2	Banguntapan I	473,714.00	2,770,020.00
3	Banguntapan II	10,017,299.00	6,277,939.00
4	Banguntapan III	3,224,934.00	6,381,260.26
5	Bantul I	704,581.00	2,654,297.00
6	Bantul II	3,014,469.00	9,631,158.00
7	Dlingo I	3,742,140.00	7,784,869.56
8	Dlingo II	619,214.17	1,743,076.00
9	Imogiri I	2,689,361.69	5,123,884.00
10	Imogiri II	640,450.90	1,977,837.00
11	Jetis I	906,544.00	5,102,838.60
12	Jetis II	544,234.00	7,805,141.00
13	Kasih I	3,980,751.00	2,671,332.60
14	Kasih II	2,975,205.69	6,371,690.00
15	Kretek	9,010,279.50	8,491,871.52
16	Pajangan	1,112,163.70	1,282,069.52
17	Pandak I	4,143,530.50	8,820,074.45
18	Pandak II	2,622,879.00	4,767,838.40
19	Piyungan	1,363,619.50	2,499,443.60
20	Pleret	932,057.00	1,452,130.37
21	Pundong	1,581,857.40	6,003,690.00
22	Sanden	7,794,207.70	9,576,182.20
23	Sedayu I	5,920,392.00	7,181,738.36
24	Sedayu II	700,290.00	1,303,199.25
25	Sewon I	1,075,098.32	2,717,993.00
26	Sewon II	2,326,920.00	3,445,455.00
27	Srandakan	7,724,886.00	24,211,690.99
	Jumlah di Puskesmas	82,402,697.87	152,821,963.88
28	Gudang Farmasi Kab. Bantul	173,281,484.00	154,818,190.00
29	RSUD Panembahan Senopati	142,661,704.00	12,795,234.00
	JUMLAH	398,345,885.87	473,257,351.76
	JUMLAH TOTAL OBAT KADALUARSA	871,603,237.63	871,159,720.24
	JUMLAH TOTAL OBAT KADALUARSA YANG TELAH DIHAPUSKAN DI TA 2017	307,640,153.88	
	JUMLAH TOTAL OBAT KADALUARSA PER 31 DESEMBER 2017	563,963,083.75	

b. Investasi Jangka Panjang

1) Investasi Non Permanen	-	-
2) Investasi Permanen	248,569,576,110.98	229,152,262,959.40
Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Bantul terdiri dari :		
2a) Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMD	129,528,808,609.90	117,590,549,808.00

Jumlah tersebut merupakan saldo investasi permanen per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bantul dengan kepemilikan saham lebih dari 51%. Penyertaan modal dihitung dengan metode ekuitas, yang terdiri atas:

a) PD BPR Bank Bantul	89,451,926,090.00	84,329,095,400.00
Sesuai dengan Perda Bank Bantul No 09 Tahun 2007 bahwa pembagian laba Bank Bantul dibagi 50% untuk PAD, 15 % Cadangan Umum, 15% Cadangan tujuan, 10% Dana Kesejahteraan Karyawan dan 10% Jasa Produksi. Perhitungan Modal ekuitas sebagai berikut		
Setoran Modal Tahun 2017 dan tahun 2016	2,250,000,000.00	1,500,000,000.00
laba tahun berjalan tahun 2017 dan tahun 2016	7,046,214,236.00	6,345,097,063.00
Koreksi Laba tahun berjalan menyesuaikan hasil audited	268,124,998.46	(84,857.60)
penyesuaian bagian laba Pemda Bantul yang telah dicatat pada saldo Ekuitas pada Tahun 2016 dan 2015 dan dibagikan (disetor ke kasda) pada Tahun 2017 dan tahun 2016	(3,172,506,102.46)	(3,386,429,636.00)
penyesuaian dana kesejahteraan dan dana jasa produksi yang sudah dicatat pada ekuitas pada Tahun 2017 dan tahun 2016	(1,269,002,440.00)	(1,354,571,854.40)
Koreksi Penyesuaian pembagian Dana cadangan	(2.00)	
Penyertaan modal (ekuitas) tahun 2017 dan Tahun 2016	89,451,926,090.00	84,329,095,400.00
Sebagai tambahan informasi setoran Modal Pemerintah daerah ke Bank Bantul sampai dengan tahun 2017 Rp69.029.185.738,38		
b) PD Aneka Dharma Bantul	6,873,385,089.00	5,595,607,714.00
Sesuai dengan Perda BUMDI No 22 Tahun 2012 bahwa pembagian laba PD Aneka Dharma dibagi 55% untuk PAD, Perhitungan Modal ekuitas sebagai berikut: .		
Penyertaan modal (ekuitas) Tahun 2016 dan Tahun 2015	5,595,607,714.00	4,666,492,101.74
Setoran Modal Tahun 2017 dan tahun 2016	1,900,000,000.00	-
penyesuaian bagian laba Pemda Bantul yang telah dicatat pada saldo Ekuitas pada Tahun 2013 dan th 2014 dan dibagikan (disetor ke kasda) pada Tahun 2014 dan tahun 2015	-	(24,175,500.00)
Penyesuaian Laba tahun berjalan 2015 dan 2014 setelah pajak		(0.12)
Rugi Tahun Berjalan	(534,999,926.00)	(93,500,389.49)
Penyertaan modal (ekuitas) Tahun 2015 dan tahun 2014	6,960,607,788.00	4,548,816,212.13
Koreksi atas saldo ekuitas (saldp rugi awal tahun)	(87,222,699.00)	
Koreksi atas tambahan modal ekuitas hasil audited dari kantor akuntan independent		1,046,791,501.87
Penyertaan modal (ekuitas) Tahun 2017 dan tahun 2016	6,873,385,089.00	5,595,607,714.00
Sebagai tambahan informasi setoran Modal Pemerintah daerah ke PD Aneka Dharma sampai dengan tahun 2017 Rp6.715.063.051,00		
c) Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Bantul	33,203,497,430.90	27,665,846,694.00
Sesuai dengan Perda BUMD No 22 Tahun 2012 bahwa pembagian laba PDAM dibagi 55% untuk PAD, Perhitungan Modal ekuitas sebagai berikut: .		
Setoran Modal Tahun 2016 dan tahun 2015	5,500,000,000.00	4,500,000,000.00
Keuntungan?kerugian Aktuarial	(1,144,781,432.00)	-
Laba Tahun Berjalan 2017 dan tahun 2016	795,940,730.64	590,252,813.75
Koreksi laba tahun berjalan tahun 2017 dan tahun 2016 yang sudah disetor ke Pemda	(324,639,050.00)	(295,989,500.00)
Penyertaan modal (ekuitas) Tahun 2016 dan tahun 2015	32,492,366,942.64	25,199,897,677.00
Penyesuaian Koreksi hasil audit independent	711,130,488.26	77,933,217.00
Bantuan Satker PK PAM Prov DIY	-	171,749,800.00
Tambahan aset dari Pemda berupa barang yang telah diserahkan dengan SKK Bupati berupa Pengadaan saluran distribusi Air Bersih Tahun 2015	-	2,216,266,000.00
Koreksi kurang atas akumulasi kewajiban perhitungan akuaria tahun 2015	-	-
Penyertaan modal (ekuitas) Tahun 2017 dan tahun 2016	33,203,497,430.90	27,665,846,694.00
Sebagai tambahan informasi setoran Modal (Murni) Pemerintah daerah ke PDAM sampai dengan tahun 2016 Rp26.536.920.201,91		
2b) Investasi Permanen Lainnya	119,040,767,501.08	111,561,713,151.40
Saldo tersebut merupakan saldo investasi permanen dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bantul terdiri kepada:		
a) Bank BPD DIY	105,700,000,000.00	98,200,000,000.00
Penyertaan modal sampai dengan Tahun 2016	98,200,000,000.00	88,155,000,000.00
Penambahan Penyertaan Modal TA 2017	7,500,000,000.00	10,045,000,000.00
Penyertaan modal sampai dengan Tahun 2017	105,700,000,000.00	98,200,000,000.00
b) Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP)	825,999,833.99	825,999,833.99
Penyertaan modal sampai dengan Tahun 2016	825,999,833.99	825,999,833.99
Penyesuaian Penyertaan Modal TA 2016 (koreksi)		(659.00)

Penyertaan modal sampai dengan Tahun 2017	825,999,833.99	825,999,174.99
---	----------------	----------------

c) PT Bantul Kota Mandiri (PT BKM):

Pelaporan keuangan untuk laporan per 31 Desember 2016 (unaudited) berdasarkan Laporan keterangan dan laporan berdasar audit independent per 31 Desember 2017	12,514,767,667.09	12,535,713,976.41
Jumlah	119,040,767,501.08	111,561,713,151.40

Status PT Bantul Kota Mandiri (PT BKM) yang selama ini tidak berkembang diusulkan dibubarkan melalui surat permohonan no 650/0812 tanggal 8 Maret 2011 dan telah disetujui oleh DPRD berdasar surat nomor 20 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pembubaran dan Likuidasi PT BKM. Dan telah dibentuk Tim Likuidasi yang mengambil alih ketugasan PT BKM sesuai dengan peraturan yang berlaku. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Tim Likuidator sebesar Rp110,921,674 terdiri dari beban umum dan administrasi sebagaimana telah dinyatakan dalam Laporan Tim Likuidator Tahun 2012

Pada Tahun 2016 terdapat beberapa kegiatan yang selengkapnya dijelaskan pada bab informasi lainnya.

Sesuai dengan ketentuan pembagian kepemilikan berdasar RUPS PT BKM terlikuidasi maka penyertaan modal ekuitas Pemerintah Kabupaten Bantul per 31 Desember 2014 sbb (laporan belum berbentuk Laporan secara resmi baru surat keterangan pengelola

Saldo ekuitas (100%) PT BKM terlikuidasi per 31 Desember 2014 dan tahun 2013 (unaudited)	20,516,012,569.00	20,550,350,781.00
Kepemilikan Pemda Bantul atas PT BKM terlikuidasi (61%)	12,514,767,667.09	12,535,713,976.41
Kepemilikan PT Perwita Karya atas PT BKM terlikuidasi (39%)	8,001,244,901.91	8,014,636,804.59

c. Aset Tetap

1) Tanah

	517,919,614,242.00	535,067,314,152.00
--	--------------------	--------------------

Jumlah tersebut merupakan nilai tanah dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Tanah per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	535,067,314,152.00	132,625,088,407.00
Penambahan tahun 2017 dan 2016	4,460,138,090.00	15,087,511,125.00
Penambahan tahun 2016 untuk pencantuman kembali aset tanah jalan	-	392,310,015,000.00
Penambahan tahun 2017 karena koreksi	-	512,753,000.00
Pengurangan tahun 2017 karena koreksi	(681,400,000.00)	(512,753,000.00)
Pengurangan dalam tahun 2017 dan 2016	(20,926,438,000.00)	(4,955,300,380.00)
Jumlah	517,919,614,242.00	535,067,314,152.00

Dengan terbitnya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, berakibat adanya beberapa perubahan kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi. Salah satu efek dari perubahan kewenangan tersebut adalah adanya mutasi kepemilikan aset tetap berdasarkan kewenangan antara lain pada Dinas Pendidikan Menengah, Bidang Di Dinas Pertanian, Bidang di Dinas Pengairan, (Berita acara tentang perubahan atas berita acara serah terima personel, sarana, dan prasara serta dokumen dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, no 130/03367 dan no 120/02728

Untuk Aset Tetap Tanah terjadi mutasi Kurang terdapat pada :
Bidang Pendidikan

20,409,190,000

Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai tindak lanjut dari adanya UU No 23 Tahun 2016 juga melakukan perubahan struktur organisasi perangkat daerah dengan menerbitkan Perda No 12 Tahun 2016 tgl 23 September 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bantul

Akibat dari Perubahan struktur organisasi tersebut maka terjadi perubahan data aset tetap dari struktur lama (tahun 2016) dengan data aset dengan struktur baru (2017),

Dalam rangka perubahan tersebut maka Pemerintah Daerah menerbitkan Keputusan Bupati Bantul No 483 Tahun 2016 tentang Status Penggunaan Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah Tahun 2017

Untuk Aset Tetap Tanah dengan Saldo Awal

535,067,314,152.00

Mutasi penambahan nilai tanah per 31 Desember 2017 berasal dari antara lain unsur belanja modal tanah di SKPD tahun 2017 termasuk mutasi, Unsur penambahan antara lain berasal dari belanja modal tanah untuk bangunan gedung Rp482.771.250,00 belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung Rp 1.446.223.727,22 belanja modal tanah untuk tanah perkampungan 3.424.608.840 dan lain-lain menyesuaikan saldo akhir aset tetap. Sedangkan untuk pengurangan dikarenakan aset tanah SMA/SMK yang di saldo awal disajikan di DIKPORA dikeluarkan berdasarkan berita acara P3D ke Propinsi DIY.

Dalam rangka optimalisasi pendayagunaan barang milik daerah sebagian Aset Tetap Tanah ada yang dikuasai/dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga dengan bentuk Pemanfaatan secara Sewa dan Pinjam Pakai. Barang Milik Daerah tersebut tetap dicatat sebagai Barang Milik Daerah (Aset Tetap) Kabupaten Bantul pada Pengelola atau Pengguna.

Untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Bantul juga menggunakan Tanah yang bukan milik Daerah dengan sistem Sewa, Pinjam Pakai atau Kompensasi, yang terdiri dari Tanah Milik Pemda lain, Tanah Kas Desa dan *Sultan Ground*.

Daftar Tanah yang dikuasai/dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga dan daftar Tanah milik pihak lain yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Bab VII

2) Peralatan dan Mesin

	561,102,664,150.57	514,461,731,543.57
--	--------------------	--------------------

Jumlah tersebut merupakan nilai peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	514,461,731,543.57	421,699,414,558.81
Penambahan tahun 2017 dan 2016	148,725,586,038.00	93,835,737,206.19
Pengurangan dalam tahun 2017 dan 2016	(102,957,248,811.00)	(23,560,419,626.00)
Pencatatan kembali ekstrakontabel 2016 dan Tahun 2015	-	38,254,585,709.00
Pengurangan pencatatan ekstrakomptabel 2017 dan tahun 2016	-	(38,254,585,709.00)
Pengurangan pencatatan pemisahan aktiva tidak berwujud	-	-
Penambahan tahun 2017 karena koreksi	872,595,380.00	22,662,293,198.57
Pengurangan tahun 2017 karena koreksi dan pengurangan karena penyesuaian	-	(175,293,794.00)
Jumlah	561,102,664,150.57	514,461,731,543.57

Dengan terbitnya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, berakibat adanya beberapa perubahan kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi. Salah satu efek dari perubahan kewenangan tersebut adalah adanya mutasi kepemilikan aset tetap berdasarkan kewenangan antara lain pada Dinas Pendidikan Menengah, Bidang Di Dinas Pertanian, Bidang di Dinas Pengairan, (Berita acara tentang perubahan atas berita acara serah terima personel, sarana, dan prasara serta dokumen dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, no 130/03367 dan no 120/02728

Untuk Aset Tetap Peralatan Dan Mesin terjadi mutasi Kurang terdapat pada :

Bidang Pendidikan	62,178,156,201.00
Bidang Kesehatan	434,305,357.00
Bidang Kelautan	11,820,000.00

Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai tindak lanjut dari adanya UU No 23 Tahun 2016 juga melakukan perubahan struktur organisasi perangkat daerah dengan menerbitkan Perda No 12 Tahun 2016 tgl 23 September 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bantul

Akibat dari Perubahan struktur organisasi tersebut maka terjadi perubahan data aset tetap dari struktur lama (tahun 2016) dengan data aset dengan struktur baru (2017),

Dalam rangka perubahan tersebut maka Pemerintah Daerah menerbitkan Keputusan Bupati Bantul No 483 Tahun 2016 tentang Status Penggunaan Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah Tahun 2017

Untuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan Saldo Awal 514,461,731,544

Mutasi penambahan nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2017 berasal dari antara lain unsur belanja modal peralatan dan mesin di SKPD tahun 2017, penambahan antara lain berasal dari belanja modal alat angkut kendaraan bermotor Rp11.603.018.280, alat kesehatan Rp15.561.829.934 alat kedokteran Rp3.187.837.043, pengadaan komputer Rp11.858.848.163 dan tambahan dari belanja modal diluar APBD yang berasal dari Dana BOSNAS dan lain-lain menyesuaikan saldo akhir aset tetap

Sebagian Aset Tetap Peralatan dan Mesin dipinjam pakai oleh pihak lain (Instansi Vertikal), yaitu Kantor Pelayanan Pajak Daerah (Samsat), Rumah Tahanan Negara, Polres, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Kodim 0729, KPU dan BPN/Kantor Pertanahan.

Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dipinjam pakai oleh pihak lain sebagaimana tercantum pada Bab VII

Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul perihal pencatatan aset tetap peralatan dan mesin . Pemerintah Kabupaten Bantul juga mencatat aset tetap peralatan dan mesin dengan nilai dibawah Rp300,000,00 sebesar Rp32.576.232.936,00

3) Gedung dan Bangunan	1,194,597,731,231.78	1,261,647,454,204.97
Jumlah tersebut merupakan nilai gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:		
- Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	1,261,647,454,204.97	1,113,889,238,250.06
- Penambahan tahun 2017 dan 2016	156,914,877,959.00	166,639,917,749.91
- Pengurangan dalam tahun 2017 dan 2016	(226,030,562,525.00)	(15,145,432,741.00)
- Penambahan tahun 2017 karena koreksi	2,065,962,042.43	1,000,000.00
- Pengurangan tahun 2017 karena koreksi dan pengurangan karena penyesuaian	-	(1,007,720,179.00)
- Koreksi pencatatan saldo awal	(449.62)	
- Pengurangan tahun 2016 karena koreksi atas DED		(2,729,548,875.00)
Jumlah	1,194,597,731,231.78	1,261,647,454,204.97

Dengan terbitnya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, berakibat adanya beberapa perubahan kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi. Salah satu efek dari perubahan kewenangan tersebut adalah adanya mutasi kepemilikan aset tetap berdasarkan kewenangan antara lain pada Dinas Pendidikan Menengah, Bidang Di Dinas Pertanian, Bidang di Dinas Pengairan, (Berita acara tentang perubahan atas berita acara serah terima personel, sarana, dan prasara serta dokumen dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, no 130/03367 dan no 120/02728

Untuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan terjadi mutasi Kurang terdapat pada :

Bidang Pendidikan	156,919,118,735
Bidang Kelautan	1,429,505,000

Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai tindak lanjut dari adanya UU No 23 Tahun 2016 juga melakukan perubahan struktur organisasi perangkat daerah dengan menerbitkan Perda No 12 Tahun 2016 tgl 23 September 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bantul

Akibat dari Perubahan struktur organisasi tersebut maka terjadi perubahan data aset tetap dari struktur lama (tahun 2016) dengan data aset dengan struktur baru (2017),

Dalam rangka perubahan tersebut maka Pemerintah Daerah menerbitkan Keputusan Bupati Bantul No 483 Tahun 2016 tentang Status Penggunaan Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah Tahun 2017

Untuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan dengan Saldo Awal 1,261,647,454,205

Mutasi penambahan nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2017 berasal dari antara lain unsur belanja modal gedung dan bangunan di SKPD tahun 2017 penambahan antara lain berasal dari belanja modal gedung kantor Rp47.969.104.016.32 bangunan bersejarah sebesar Rp1.309.967.536 dan tambahan dari belanja modal diluar APBD yang berasal dari Dana BOSNAS Dana Blockgrant serta lain-lain menyesuaikan saldo akhir aset tetap. Pengurang gedung dan bangunan berdasarkan berita acara penyerahan P3D ke propinsi DIY.

Sebagian Aset Tetap Gedung dan Bangunan ada yang dikuasai/dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga dengan bentuk Pemanfaatan Sewa, Pinjam Pakai, atau Penggunaan untuk dioperasikan pihak lain.

Terhadap aset tetap Gedung dan Bangunan telah diterapkan Penyusutan, termasuk Gedung dan Bangunan yang dimanfaatkan oleh Pihak ketiga. Sebagaimana tercantum dalam Bab VII

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,973,041,023,200.00	1,821,460,231,355.26
Jumlah tersebut merupakan nilai jalan, irigasi dan jaringan dengan rincian sebagai berikut:		
- Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	1,821,460,231,355.26	1,680,757,495,114.94
- Penambahan tahun 2017 dan 2016	165,898,571,028.00	160,793,615,802.49
- Penambahan tahun 2017 koreksi	6,030,627,255.39	3,261,906,794.25
- Pengurangan dalam tahun 2017 dan 2016	(20,347,056,438.65)	(22,384,082,100.00)
- Pengurangan tahun 2017 karena koreksi	(1,350,000.00)	(43,711,756.43)
- Pengurangan tahun 2016 karena koreksi DED		(924,992,500.00)
Jumlah	1,973,041,023,200.00	1,821,460,231,355.26

Dengan terbitnya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, berakibat adanya beberapa perubahan kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi. Salah satu efek dari perubahan kewenangan tersebut adalah adanya mutasi kepemilikan aset tetap berdasarkan kewenangan antara lain pada Dinas Pendidikan Menengah, Bidang Di Dinas Pertanian, Bidang di Dinas Pengairan, (Berita acara tentang perubahan atas berita acara serah terima personel, sarana, dan prasara serta dokumen dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, no 130/03367 dan no 120/02728

Untuk Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan terjadi mutasi Kurang terdapat pada :	
Bidang Pendidikan	1,302,888,700
Bidang ESDM	2,380,620,000
Bidang Kelautan	81,266,960

Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai tindak lanjut dari adanya UU No 23 Tahun 2016 juga melakukan perubahan struktur organisasi perangkat daerah dengan menerbitkan Perda No 12 Tahun 2016 tgl 23 September 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bantul

Akibat dari Perubahan struktur organisasi tersebut maka terjadi perubahan data aset tetap dari struktur lama (tahun 2016) dengan data aset dengan struktur baru (2017), Dalam rangka perubahan tersebut maka Pemerintah Daerah menerbitkan Keputusan Bupati Bantul No 483 Tahun 2016 tentang Status Penggunaan Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah Tahun 2017

Untuk Aset Tetap Jalan Irigasi dan jaringan dengan Saldo Awal	1,821,460,231,354.62
---	----------------------

5) Aset Tetap Lainnya	65,734,074,972.00	73,057,689,969.00
Jumlah tersebut merupakan nilai aset tetap lainnya dengan rincian sebagai berikut:		
- Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	73,057,689,969.00	66,266,447,901.10
- Penambahan tahun 2017 dan 2016	12,870,392,281.00	10,416,899,360.11
- Pengurangan dalam tahun 2017 dan 2016	(20,190,785,515.00)	(4,401,667,449.00)
- Pengurangan tahun 2017 karena koreksi	(26,330,763.00)	(3,447,843.21)
- Penambahan tahun 2017 dikarenakan koreksi	23,109,000.00	779,458,000.00
Jumlah	65,734,074,972.00	73,057,689,969.00

Dengan terbitnya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, berakibat adanya beberapa perubahan kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi. Salah satu efek dari perubahan kewenangan tersebut adalah adanya mutasi kepemilikan aset tetap berdasarkan kewenangan antara lain pada Dinas Pendidikan Menengah, Bidang Di Dinas Pertanian, Bidang di Dinas Pengairan, (Berita acara tentang perubahan atas berita acara serah terima personel, sarana, dan prasara serta dokumen dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, no 130/03367 dan no 120/02728

Untuk Aset Tetap Lainnya terjadi mutasi Kurang terdapat pada :	
Bidang Pendidikan	15,566,637,780

Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai tindak lanjut dari adanya UU No 23 Tahun 2016 juga melakukan perubahan struktur organisasi perangkat daerah dengan menerbitkan Perda No 12 Tahun 2016 tgl 23 September 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bantul

Akibat dari Perubahan struktur organisasi tersebut maka terjadi perubahan data aset tetap dari struktur lama (tahun 2016) dengan data aset dengan struktur baru (2017), Dalam rangka perubahan tersebut maka Pemerintah Daerah menerbitkan Keputusan Bupati Bantul No 483 Tahun 2016 tentang Status Penggunaan Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah Tahun 2017

Untuk Aset Tetap Jalan Irigasi dan jaringan dengan Saldo Awal	73,057,689,969
---	----------------

Mutasi penambahan nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2017 berasal dari antara lain unsur belanja modal aset tetap lainnya di SKPD tahun 2017 termasuk mutasi, hibah, Unsur penambahan antara lain berasal dari belanja modal aset tetap lainnya buku perpustakaan Rp2.674.786.440 barang bercorak kesenian Rp596.772.200, belanja modal tanaman Rp21.563.800 dan lain-lain menyesuaikan saldo akhir aset tetap

6) Konstruksi dalam Pengerjaan	-	644,050,000.00
Jumlah tersebut merupakan kegiatan pembangunan gedung kantor, gedung puskesmas, gedung sekolah dasar, gedung sekolah lanjutan tingkat pertama dan gedung sekolah lanjutan tingkat atas yang belum selesai pelaksanaannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016		
- Nilai konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	644,050,000.00	1,098,574,401.00
- Penambahan tahun 2016 dan 2015		9,912,247,300.00
- Pengurangan dalam tahun 2016 dan 2015	(644,050,000.00)	(10,029,716,701.00)
- Pengurangan tahun 2016 karena koreksi dan pengurangan karena penyesuaian		(337,055,000.00)
Jumlah	-	644,050,000.00

Dengan terbitnya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, berakibat adanya beberapa perubahan kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi. Salah satu efek dari perubahan kewenangan tersebut adalah adanya mutasi kepemilikan aset tetap berdasarkan kewenangan antara lain pada Dinas Pendidikan Menengah, Bidang Di Dinas Pertanian, Bidang di Dinas Pengairan, (Berita acara tentang perubahan atas berita acara serah terima personel, sarana, dan prasara serta dokumen dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, no 130/03367 dan no 120/02728

Untuk konstruksi dalam pengerjaan terjadi mutasi Kurang terdapat pada :	
Bidang Pendidikan	644,050,000

7) Akumulasi Penyusutan	(1,895,906,957,057.62)	(1,824,330,894,618.56)
Nilai dari akumulasi penyusutan merupakan hasil perhitungan secara sistematis dalam SIMDA BMD yang berasal dari seluruh aset yang sudah diatur penyusutannya secara umum dan teknis penyusutannya. Penyusutan diantaranya pada aset prlatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset		
- Akumulasi Penyusutan dari Pengungkapan Saldo awal tahun 2016 berdasarkan pencatatan Simda BMD	(1,824,330,894,618.56)	(1,824,330,894,618.56)
- Akumulasi Penyusutan Tahun berjalan	(71,576,062,439.06)	-
- Akumulasi Penyusutan Akhir Tahun	(1,895,906,957,057.62)	(1,824,330,894,618.56)

No	Rekening	Saldo Awal	Tahun ini unaudited	Tahun ini koreksi	Saldo Akhir
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	359,972,685,986.72	60,088,698,454.56	60,577,553,897.55 (43,649,931,912.42)	420,550,239,884.27 (43,649,931,912.42)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	214,744,242,267.48	27,086,198,135.29	23,901,999,916.31	238,646,242,183.79
		-		(36,412,006,755.32)	(36,412,006,755.32)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,249,071,291,564.36	4,101,740,617.20	67,667,380,338.86	1,316,738,671,903.22
		-		(508,933,045.92)	(508,933,045.92)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya (Pematangan Lahan)	542,674,800.00			542,674,800.00
		-			-
	Total Akumulasi	1,824,330,894,618.56	91,276,637,207.05	71,576,062,439.06	1,895,906,957,057.62

Akumulasi penyusutan mengalami penyesuaian dikarenakan terjadi perubahan cara penilaian aset yang disusutkan antara lain :

- Untuk penambahan masa manfaat yang diakibatkan adanya pemeliharaan maka masa manfaat aset tetap tersebut tidak melebihi masa manfaat awal, sehingga dalam penghitungan penyusutan pembagi untuk masa manfaat tidak melebihi masa manfaat awal

- Penghitungan penyusutan setelah pemeliharaan berdasarkan dari nilai buku terakhir

d. Aset Lainnya

1) Tagihan Jangka Panjang

742,769,414.00 764,419,414.00

Jumlah tersebut adalah piutang jangka panjang dengan rincian sebagai berikut:

a) Tagihan Piutang

15,311,414.00 15,311,414.00

- Piutang Pajak Pemanfaatan ABT

8,232,414.00 8,232,414.00

Piutang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah merupakan piutang yang disebabkan adanya pengalihan penanggungjawab pengelolaan pajak ABT dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi tahun 2006

- Piutang kepada PO Jatayu

800,000.00 800,000.00

Piutang yang diakibatkan adanya tunggakan retribusi pariwisata dari PO Jatayu yang belum dibayarkan per 31 Desember 2005 dan belum dilunasi karena PO Jatayu sudah tidak melayani jalur reguler ke pantai parangtritis

- Piutang UMK Dana SO

6,279,000.00 6,279,000.00

Piutang tersebut merupakan koreksi LHP BPK atas LKD Tahun 2004 dari Pos Aset Tetap hasil pembelian dari Kegiatan Supporting Organisasi di reklas ke piutang

Jumlah 15,311,414.00 15,311,414.00

b) TGR

727,458,000.00 749,108,000.00

Jumlah tersebut merupakan bagian dari SKTJM yang pengembaliannya lebih dari 1 tahun karena kerugian antara lain

- TGR pengembalian Bea Siswa

- 2,000,000.00

- TGR Kehilangan Kendaraan Dinas

- 3,000,000.00

- TGR Kelebihan Belanja

727,458,000.00 744,108,000.00

Jumlah 727,458,000.00 749,108,000.00

2) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

3) Aset Tak berwujud

19,945,487,938.44 17,412,173,338.44

Aset tersebut merupakan aset berupa Program/software yang ada dibeberaka SKPD yang dulunya ada di ast tetap dengan perincian sebagai berikut:

- Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 dan 2016

17,412,173,338.44 5,397,278,165.00

- Penambahan tahun 2017 dan 2016

1,739,141,000.00 601,603,377.33

- Reklas dari KIB F

- 16,850,000.00

- Penambahan tahun 2017 karena koreksi

4,919,998,628.00

- Pengurangan dalam tahun 2017 karena koreksi

(55,620,000.00)

- Penambahan tahun 2016 reklas dari aset tetap gedng dan jalan irigasi untuk DED

- 5,813,797,122.00

- Penambahan tahun 2016 berupa Lektor ICT hibah dari Pemerintah propinsi

- 5,582,716,926.11

- Pengurangan/penyesuaian dalam tahun 2016

(4,070,205,028.00) (72,252.00)

Jumlah 19,945,487,938.44 17,412,173,338.44

4) Aset Lain-lain

- 6,350,410,718.00

Saldo aset lainnya berasal dari barang yang sudah tercatat tetapi tidak ditemukan berdasarkan hasil sensus barang milik daerah pada Sekolah Dasar se Kabupaten Bantul Tahun 2015 terdiri dari

a) Peralatan dan Mesin

1,707,584,927.00

b) Gedung dan bangunan

- 559,000,000.00

c) Jalan, Irigasi dan Jaringan

- 419,617,650.00

d) Aset tetap lainnya

- 3,664,208,141.00

Jumlah - 6,350,410,718.00

Saldo awal berasal dari saldo tahun lalu yang merupakan saldo dari barang yang sudah tidak diketemukan keberadaannya, sedangkan tambahan tahun 2015 untuk peralatan dan mesin , gedung dan bangunan, Jalan irigasi dan jaringan beserta aset tetap lainnya merupakan pendataan dari kegiatan sensus tahun 2015 yang keberadaan barangnya tidak sesuai dengan catatan yang ada termasuk dalam saldo tahun 2015 adalah aset lain lain tahun 2014

5) Aset lain yang dibatasi penggunaannya

229,284,603.45 238,727,239.45

Aset lainnya yang dibatasi merupakan kas yang ada dipengelola kegiatan yang tersimpan dalam rekening pengelola yang penggunaannya (pemasukan dan pengeluaran) melalui mekanisme yang telah diatur dalam kegiatan tersebut dan dimungkinkan dapat menjadi potensi pendapatan daerah antara lain:

a) Kas di Pengelola Jasa Bongkar Reklame

57,550,689.00 121,145,325.00

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mengelola uang titipan biaya bongkar reklame pada rekening penampungan jaminan pembongkaran di Bank BPD DIY Cabang Bantul Nomor 004.111.001274 atas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu QQ Eka Purnamasari, yang merupakan uang titipan penyelenggaraan reklame yang belum jatuh tempo dan belum menjadi hak Pemda. sampai tanggal 31 Desember 2017

Kas di Pengelola Jasa Bongkar Reklame

Saldo Tahun 2017 dan 2016	121,145,325.00	449,346,485.00
Kas Masuk Tahun 2017 dan 2016	218,158,417.00	148,311,350.00
Penyesuaian saldo 2016	1,156,107.00	
Diambil Wajib Pajak	-	(175,707,000.00)
Dilimpahkan ke Kas Daerah	(282,909,160.00)	(300,805,510.00)
Jumlah	57,550,689.00	121,145,325.00

b) Kas di Pengelola Rusunawa

Pada Pengelolaan Rusunawa di DPU terdapat kebijakan yang bertujuan untuk menghindari kerugian akibat tidak terbayarnya uang sewa dengan cara penyimpanan uang jaminan sewa selama 2 bulan dan jaminan tersebut akan dikembalikan setelah penyewa tidak menempati Rusunawa. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 terdapat kas pada Rek giro no 004.111.001021.

Kas di Pengelola Rusunawa

Saldo Tahun 2017 dan Tahun 2016	94,850,000.00	73,950,000.00
Uang Jaminan Masuk Tahun Tahun 2017 dan 2016	76,800,000.00	44,200,000.00
Uang Jaminan Keluar Tahun 2017 dan Tahun 2016	(22,500,000.00)	(23,300,000.00)
Jumlah	149,150,000.00	94,850,000.00

c) Kas Dipengelola Pengajuan Keberatan PBB P2

Sesuai dengan ketentuan UU No 28 th 2008 tentang Pajak daerah ps 108 , bahwa wajib pajak yang mengajukan proses keberatan harus melampirkan bukti pembayaran paling sedikit 50% pokok ketetapan PBB P2 dalam SPPT dan dititipkan dalam rekening titipan giro no 004.111.000.457

Saldo Tahun 2016	22,208,589.45	22,208,589.45
Uang Jaminan Masuk Tahun Tahun 2017 dan 2016	305,000.00	-
Uang Jaminan Keluar Tahun 2017 dan 2016	(305,000.00)	-
Jumlah	22,208,589.45	22,208,589.45

d) Kas Dibendahara Penerimaan untuk Penampungan PBB

Kas tersebut merupakan penampungan dari setoran PBB yang belum disetor ke Kas Daerah dikarenakan belum diketahui penyetornya dan ditampung di Rek Giro No 004.111.001003 di Bank BPD DIY Cabang Bantul

Kas di Pengelola PBB

Saldo Tahun 2016	523,325.00	523,325.00
koreksi saldo awal	19,429,457.00	
Penambahan	562,742,705.00	-
Pengurangan	(582,320,162.00)	-
Jumlah	375,325.00	523,325.00

6) Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Nilai dari akumulasi amortisasi merupakan hasil perhitungan secara sistematis yang berasal dari seluruh aset tidak berwujud yang sudah diatur amortisasinya secara umur dan teknis penyusunannya.

- Akumulasi amortisasi dari Pengungkapan Saldo awal tahun 2016 berdasarkan pencatatan Simda BMD	9,893,366,074.11	3,875,076,012.00
- Akumulasi amortisasi Tahun lalu dari hibah Lektura ICT		2,233,086,770.44
- Akumulasi amortisasi Tahun berjalan karena koreksi	217,192,901.00	1,806,110,432.67
- Akumulasi amortisasi Akhir Tahun 2017 dan 2016	10,110,558,975.11	7,914,273,215.11

No	Rekening	1,979,092,858.82		
			Saldo Awal	Tahun ini
1	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	7,914,273,215.11	1,979,092,859.00	9,893,366,074.11

5.4.2 KEWAJIBAN

a. Kewajiban Jangka Pendek

1) Utang PFK

Mencatat Pajak Penghasilan yang dipungut Bendahara Pengeluaran tahun 2017 dan 2016 dan baru disetor ke kas negara tahun 2018 dan kas yang masih ada pada bendahara tetapi sudah menjadi hak pihak ketiga/Pegawai

2) Utang Bunga

Mencatat Hutang Bunga tahun 2017 dan 20156

3) Bagian Lancar Utang kepada Pemerintah Pusat

4) Pendapatan diterima dimuka

	13,928,880,598.80	9,041,496,683.93
	-	1,161,600.00
	-	-
	-	-
	211,677,621.80	54,070,542.93

Jumlah tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah yang disebabkan oleh Pendapatan yang diterima dimuka yaitu:

a)	Pendapatan diterima dimuka pada kantor pasar atas sewa kios oleh Bank BRI	-	4,848,729.13
	Pembaharuan kontrak sewa kios pada 3 pasar di Kab Bantul (Ps Niten, Imogiri, Pyungan) untuk jangka waktu 3 tahun		
b)	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Hotel, Restoran, Air Bawah Tanah, Parkir	49,221,813.80	49,221,813.80
c)	Sewa tanah dan gedung eks transito oleh PWNU DIY	11,500,000.00	
d)	Sewa sebagian tanah dan gedung eks Dinas Perijinan oleh Lembaga Kelomnok Bermain Bhakti Annisa Wanita Islam Bantul	25,600,000.00	
e)	Sewa gedung eks DIKMENOF oleh Pimpinan Daerah Aisyiyah Kab Bantul	53,855,808.00	
f)	Sewa sebagian tanah dan gedung yang digunakan untuk bangunan ATM dan kantor kas BPD DIY, Komplek Perkantoran Parasamya	62,500,000.00	
g)	Sewa sebagian tanah yang digunakan untuk bangunan ATM dan kantor kas BPD DIY, Komplek Perkantoran Manding	9,000,000.00	
		<hr/>	<hr/>
		211,677,621.80	54,070,542.93
b)	Utang pajak merupakan kelebihan setor dari wajib pajak per 31 Desember 2017, terdiri dari :		
-	Pajak Hotel	6,199,778.80	6,199,778.80
-	Pajak Restoran	40,156,769.00	40,156,769.00
-	Pajak Air bawah tanah	2,657,038.40	2,657,038.40
-	Pajak Parkir	208,227.60	208,227.60
		<hr/>	<hr/>
		49,221,813.80	49,221,813.80
5)	Utang Beban	13,717,202,977.00	8,987,426,141.00

Jumlah tersebut adalah utang/kewajiban di beberapa dinas intansi yang belum dipertanggungjawabkan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 yang terdiri atas: utang karena kelebihan penerimaan maupun utang karena belum terselesaikannya kewajiban dari hak yang sudah diterima

a)	Kelebihan setor Pemda Sleman untuk kegiatan kontribusi operasional dan pemeliharaan TPST Piyungan	506,000.00	506,000.00
b)	Hutang Pembelian obat dan alkes habis pakai pada RSUD Panembahan senopati per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	8,774,912,604.00	5,945,928,733.00
c)	Hutang Pelaksanaan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) tahun 2017 kepada Pihak ketiga (RSU) yang memiliki kerjasama dengan UPT Jamkesda per 31 Desember 2017	1,422,301,105.00	36,734,200.00
d)	Hutang Tagihan Rekening PJU dan Gedung-gedung Perkantoran Bulan desember 2017 dan tahun 2016	2,151,750,650.00	2,018,890,989.00
e)	Hutang Tagihan Rekening Telepon di SKPD di Kabupaten Bantul Bulan desember 2017 dan tahun 2016	55,197,492.00	57,949,692.00
f)	Hutang Tagihan Rekening AIR/PDAM di SKPD di Kabupaten Bantul Bulan desember 2017 dan tahun 2016	16,223,198.00	42,848,056.00
g)	Hutang Tagihan Internet di SKPD di Kabupaten Bantul Bulan desember 2017 dan tahun 2016	9,981,899.00	
h)	Hutang Belanja Operasional BLUD Puskesmas dan Jasa Pelayanan di BLUD Puskesmas dan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	838,577,191.00	838,577,191.00
i)	Mencatat Hutang Dinas kesehatan dhi BLUD Puskesmas terhadap pihak ketiga (Bidan Praktek Swasta) per 31 Desember 2017 dan tahun 2016	28,383,338.00	23,384,500.00
j)	Hutang Belanja Pegawai tahun 2017 dan tahun 2016	419,369,500.00	22,606,780.00
		<hr/>	<hr/>
	Jumlah	13,717,202,977.00	8,987,426,141.00

Keterangan

a) Pemkab Sleman dalam menyeter kontribusi operasional dan Pemeliharaan TPST Piyungan pada tahun 2012 terdapat kelebihan setor dari perjanjian (MOU) antar kabupaten kota yang memanfaatkan TPA Piyungan dan kelebihan tersebut belum diperhitungkan di tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2014

b)	Hutang RSUD Panembahan Senopati		
	Saldo Awal Tahun 2017 dan Tahun 2016	5,945,928,733.00	11,721,615,201.00
	Koreksi/Penyesuaian		-
	Penambahan Tahun 2017 dan Tahun 2016	7,198,670,124.00	51,620,675,513.00
	Koreksi/Penyesuaian reklas	(470,866,198.00)	
	Pengurangan Tahun 2017 dan Tahun 2016	(5,475,062,535.00)	(57,396,361,981.00)
		<hr/>	<hr/>
	Jumlah	7,198,670,124.00	5,945,928,733.00

c) Hutang Pelaksanaan Jamkesda di dinas Kesehatan

1)	Rumah Sakit	Total Hutang 2017	Total Hutang 2016
1	RSUP. Dr. Sardjito Yogyakarta	638,524,818.00	31,800,000.00

2	RS. Santa Elisabeth	3,322,000.00	
3	RS. Nur Hidayah		
4	RS. PKU Muhammadiyah Bantul	38,036,000.00	
5	RS. Griya Mahardika	38,603,400.00	
6	RS. Rajawali Citra	5,664,100.00	
7	RSJ. Grhasia		
8	RS. Respira		
9	RSI. Hidayatullah	4,681,800.00	
10	RS. Patmasuri		
11	RSUD Kota Jogja	77,102,100.00	
12	RSUD. Panembahan Senopati Bantul	382,391,604.00	
13	RS. PKU Muhammadiyah Jogjakarta (II)	30,722,100.00	
14	RSPAU. Hardjolukito	62,751,883.00	
15	RS. PKU Muhammadiyah Kotagede	-	1,928,600.00
16	RS PKU Muhammadiyah Jogjakarta	56,250,700.00	
17	RS. Rachma Husada		
18	RS. Permata Husada		
19	RSKIA Sadewa		
20	RS. Panti Rapih Yogyakarta	61,521,500.00	
21	RS Bethesda	22,005,100.00	
22	RSA. UGM		
23	RSKB. Ringroad Selatan		
Jumlah		1,421,577,105.00	33,728,600.00

Pada Tahun 2017 Jamkesda bekerja sama dengan beberapa Rumah Sakit dalam pelayanan kesehatan masyarakat, sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 masih terdapat klaim pelayanan dari beberapa Rumah Sakit yang belum Final verifikasinya di Rumah Sakit antara lain :

1	RSUD. Panembahan Senopati Bantul	1,026,636,600.00	
2	RSKB. Ringroad Selatan	44,396,000.00	
3	RSUD Kota Jogja	26,490,600.00	
4	RS. Nur Hidayah	1,719,300.00	
Jumlah		-	1,099,242,500.00
2) Puskesmas		Total Hutang	Total Hutang
1	Kretek		845,000.00
2	Baguntapan III	724,000.00	
3	Sewon I		1,355,600.00
4	Pandak I		805,000.00
5			
Jumlah		724,000.00	3,005,600.00

Untuk pelaksanaan hutang Jamkesda yang tercatat adalah Angka Hutang yang klainya sudah masuk ke UPT Jamkesda per tanggal 31 Januari 2017, sedangkan klaim layanan yang masuk setelah tanggal 31 Januari dianggap sebagai klaim tahun 2018

d) Hutang Tagihan Rekening Listrik di SKPD di Kabupaten Bantul Bulan Desember 2017

Hutang Tagihan Rekening Listrik di SKPD merupakan hutang beban belanja barang dan jasa berupa beban tagihan Listrik bulan Desember 2017 yang baru dibayarkan pada bulan Januari 2018. Antara lain ada pada SKPD

NO	SKPD	Nominal	Nominal
1	BAGIAN UMUM	2,555,699.00	1,600,223.00
2	DINSOS PPA	203,000.00	
3	INSPEKTORAT	2,958,233.00	2,658,736.00
4	DKP		2,482,857.00
5	DIPARDA	233,538.00	185,824.00
6	DINAS PERTANAHAN & TATA RUANG	1,334,830.00	-
7	RSUD PANEMBAHAN SENOPATI	125,702,919.00	122,721,807.00
8	DINAS PERHUBUNGAN	1,632,977.00	1,663,970.00
9	NAKERTRANS	4,323,436.00	5,061,513.00
10	PERINDAGKOP		
11	PERTAHUT	6,941,951.00	2,774,597.00
12	BKAD/DPPKAD	1,916,666,704.00	1,798,373,407.00
13	DIKPOR/DIKDAS	7,756,255.00	1,352,715.00
14	DINSOS		202,500.00
15	DLH	1,736,956.00	3,590,524.00
16	DINAS KOMINFO	6,376,495.00	
17	BPBD	137,576.00	256,744.00
18	BPKPPP		
19	DINAS KESEHATAN	57,246,852.00	60,177,778.00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

20 DPU PKP	313,105.00	245,084.00
21 KESBANGPOL		140,600.00
22 SANDEN		525,000.00
23 PIYUNGAN	1,827,493.00	1,800,600.00
24 PUNDONG	1,129,334.00	1,104,958.00
25 BANGUNTAPAN	500,460.00	689,836.00
26 PANDAK	679,377.00	862,810.00
27 IMOGIRI	274,353.00	125,868.00
28 PLERET	734,108.00	961,190.00
29 PAJANGAN	135,164.00	118,208.00
30 JETIS	845,102.00	811,898.00
31 KASIHAN	1,049,790.00	1,191,412.00
32 SEDAYU	1,880,749.00	1,393,008.00
33 SEWON	2,912,861.00	2,547,554.00
34 DLINGO	551,341.00	381,400.00
35 BANTUL	1,046,034.00	974,656.00
36 KRETEK	1,173,520.00	1,166,417.00
37 SRANDAKAN	890,438.00	747,295.00
JUMLAH	2,151,750,650.00	2,018,890,989.00

e) Hutang Tagihan Rekening Telepon di SKPD di Kabupaten Bantul Bulan Desember 2017

Hutang Tagihan Rekening Telepon/Internet di SKPD merupakan hutang beban belanja barang dan jasa berupa beban tagihan telepon bulan Desember 2017 yang baru dibayarkan pada bulan Januari 2018. Antara lain ada pada SKPD

NO	SKPD	Nominal	Nominal
1	BAGIAN UMUM	4,708,424.00	4,720,491.00
2	DINAS KOMINFO	4,511,156.00	
3	DINAS PERDAGANGAN	435,847.00	
4	DINAS KEBUDAYAAN	473,306.00	
5	KESBANGPOL	218,766.00	131,080.00
6	KPDT		37,070.00
7	PERPUSTAKAAN		405,798.00
8	SETWAN	697,236.00	1,153,672.00
9	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP	347,556.00	
10	INSPEKTORAT	394,701.00	620,212.00
11	RSUD PANEMBAHAN SENOPATI	10,459,983.00	
12	DPPKBPM	171,153.00	
13	DINSOS PPA	261,084.00	406,126.00
14	DUKCAPIL	555,677.00	588,431.00
15	DKP		583,577.00
16	DINAS PARIWISATA	472,452.00	545,605.00
17	DINKES DAN PUSKESMAS	14,818,752.00	20,049,623.00
18	DIKORA	6,145,734.00	
19	DINAS PENANAMAN MODAL		602,288.00
20	SDA		1,058,987.00
21	RSUD PANEMBAHAN SENOPATI		9,254,761.00
22	PERHUBUNGAN	713,096.00	735,000.00
23	NAKERTRANS	732,625.00	896,942.00
24	PERINDAGKOP		1,849,224.00
25	PERTAHUT	425,393.00	612,872.00
26	BKAD	282,898.00	
27	DIKORA		6,048,441.00
28	DPU PKP	1,088,305.00	1,055,795.00
29	BAPPEDA	260,933.00	
30	DLH/BLH	245,018.00	182,612.00
31	BKPP	63,194.00	
32	BKKPP KB		943,900.00
33	BPBD	1,700,414.00	1,489,854.00
34	DINAS KOPERASI	1,241,791.00	
35	DINAS PENANAMAN MODAL & PT	533,232.00	
36	PIYUNGAN	158,041.00	228,300.00
37	PUNDONG	142,466.00	140,708.00
38	BANGUNTAPAN	274,147.00	267,979.00
39	PANDAK	141,022.00	245,221.00
40	IMOGIRI	154,550.00	885,501.00
41	PLERET	259,557.00	249,591.00
42	PAJANGAN	107,941.00	162,948.00
43	JETIS	102,286.00	111,430.00
44	KASIHAN	178,137.00	521,402.00
45	SEDAYU	161,879.00	126,704.00
46	SEWON	227,016.00	246,319.00
47	DLINGO	224,714.00	56,900.00
48	BANTUL	220,595.00	322,951.00
49	KRETEK	253,294.00	138,468.00
50	SRANDAKAN	508,902.00	272,909.00

51 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

	124,219.00	
Jumlah	55,197,492.00	57,949,692.00

f) Hutang Tagihan Rekening Air/PDAM di SKPD di Kabupaten Bantul Bulan Desember 2017

Hutang Tagihan Rekening Air/PDAM di SKPD merupakan hutang beban belanja barang dan jasa berupa beban tagihan telepon bulan Desember 2017 yang baru dibayarkan pada bulan Januari 2018. Antara lain ada pada SKPD

1	KESBANGPOL	46,700.00	
2	SETWAN	475,300.00	558,200.00
3	DIKDAS		212,100.00
4	INSPEKTORAT	342,800.00	268,000.00
5	SDA		38,200.00
6	RSUD PANEMBAHAN SENOPATI	5,585,798.00	13,020,490.00
7	DINAS SOSIAL PPA	139,700.00	48,200.00
8	DPU		14,821,500.00
9	BAGIAN UMUM	4,509,800.00	10,667,800.00
10	BPBD	2,021,400.00	60,400.00
11	DINAS PERTANAHAN & TATA RUANG	282,900.00	
12	PIYUNGAN	66,100.00	113,300.00
13	JETIS	447,100.00	204,100.00
14	SEWON	47,000.00	43,500.00
15	DLINGO	289,900.00	430,800.00
16	DINKES	1,968,700.00	2,361,466.00
	Jumlah	16,223,198.00	42,848,056.00

g) Hutang Tagihan Layanan Internet di SKPD di Kabupaten Bantul Bulan Desember 2017

Hutang Tagihan Layanan Internet di SKPD merupakan hutang beban belanja barang dan jasa berupa beban tagihan telepon bulan Desember 2017 yang baru dibayarkan pada bulan Januari 2018. Antara lain ada pada SKPD

1	BAPPEDA	912,518.00	
2	DINAS PERTANAHAN & TATA RUANG	1,090,075.00	
3	PERTAHUT	293,000.00	
4	DINAS PPKB PMD	365,375.00	
5	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP	3,182,777.00	
6	DINKES	3,314,304.00	
7	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARJAS	823,850.00	
		9,981,899.00	

h) Hutang Belanja Operasional dan Jasa Layanan pada BLUD Puskesmas

	TA 2017		TA 2016	
	Operasional	Jasa Layanan	Operasional	Jasa Layanan
Bambanglipuro		33,050,396.00	1,908,761.00	27,677,833.00
Banguntapan I	18,662,800.00			2,543,770.00
Banguntapan II		19,535,825.00	3,873,147.00	125,043,730.00
Bantul I		27,598,353.00	301,500.00	
Bantul II			432,625.00	
Imogiri I		1,296,973.00		17,070,746.00
Imogiri II		102,679,673.00		
Dlingo I		95,574,888.00		
Jetis I		100,870,353.00		13,608,700.00
Jetis II		2,231,165.00		67,743,923.00
Kasihani I	3,445,000.00	45,898,229.00		
Kasihani II		84,448,053.00	3,980,550.00	2,815,438.00
Sewon I		11,348,900.00		
Kretek		3,692,105.00	1,730,400.00	94,538,350.00
Pandak I		71,484,525.00		114,296,386.00
Piyungan		37,744,600.00		193,106,000.00
Plret	808,000.00	1,354,842.00	2,965,000.00	
Pundong		7,093,506.00		153,937,982.00
Sedayu II		72,857,139.00		
Srandakan	1,300,000.00	29,799,500.00	11,002,350.00	
	24,215,800.00	748,559,025.00	26,194,333.00	812,382,858.00

65,802,366.00

i) Hutang Dinas Kesehatan dhi BLUD Puskesmas kepada Pihak Ketiga (Bidan Praktek swasta/ Prolanis / Proteza Gigi)

1	Pandak I		4,795,000.00
2	Bantul II		4,204,500.00
3	Imogiri II		5,246,000.00
4	Imogiri I	793,344.00	
5	bambanglipuro	4,257,000.00	
6	banguntapan III		
7	imogiri II		

8	Sewon I	4,724,000.00	
9	jetis i	1,720,000.00	-
	Kretek	3,647,419.00	
	Piyungan	2,163,700.00	
10	kasihan I	1,500,000.00	-
11	kasihan II	440,000.00	-
12	pleret	3,296,875.00	-
13	sedayu I	95,000.00	-
14	srandakan	500,000.00	-
	Jumlah	28,383,338.00	23,384,500.00

Dalam Kerjasama dengan BPJS perihal pelayanan kesehatan Puskesmas mempunyai tugas sebagai kemitraan Bidan Praktek Swasta dalam

j) Hutang Belanja Pegawai di SKPD di Kabupaten Bantul Bulan Desember 2017

Hutang belanja Pegawai di SKPD merupakan hutang beban belanja barang dan jasa berupa Belanja Pegawai bulan Desember 2017 yang baru dibayarkan pada bulan Januari 2018. Antara lain ada pada SKPD

1	KESEHATAN		11,980,000.00
2	DIKDAS		886,432.00
3	DISPERINDAGKOP		764,932.00
4	BPKPPP		7,021,916.00
5	JETIS		1,953,500.00
6	Puskesmas Sanden	11,750,000.00	
7	Puskesmas Pleret	270,000.00	
8	RSUD	407,349,500.00	
	Jumlah	419,369,500.00	22,606,780.00

6) Utang Jangka Pendek Lainnya.

Jumlah tersebut adalah utang/kewajiban di beberapa dinas intansi yang belum dipertanggungjawabkan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

			-
Jumlah			-

b. Kewajiban Jangka Panjang

1) Utang Jangka Panjang Lainnya

			-
			-
			-

5.4.3 EKUITAS

a. Ekuitas Dana Lancar

Jumlah tersebut merupakan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai Kewajiban jangka pendek 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 dengan perhitungan sebagai berikut:

1)	SILPA	247,225,967,225.39	252,116,629,105.54
2)	Pendapatan yang Ditangguhkan	-	-
3)	Cadangan Piutang	168,112,414,678.80	139,605,198,463.12
4)	Cadangan Persediaan	49,634,079,006.70	48,774,707,769.70
5)	Dana Lancar Lainnya (Dana lancar diluar Silpa)		44,190,994,576.00
6)	Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(13,928,880,598.80)	(9,041,496,683.93)
7)	Dana yang harus disediakan untuk Penyisihan Aset	(95,199,175,540.93)	(82,152,557,543.52)
8)	Dana yang harus disediakan untuk Amortisasi aset Aset		
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar	-	-

Saldo SILPA per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 terdiri atas:

-	Kas di Kas Daerah	229,851,336,932.90	221,268,668,753.62
-	Kas di Bendaharawan Pengeluaran	833,005,672.00	73,492,848.00
-	Kas di BLUD	13,541,504,539.49	30,269,625,119.92
-	Kas di Penerimaan	713,824,537.00	460,910,384.00
-	Kas di Pengelola Dana Bergulir	4,710,000.00	43,932,000.00
-	Kas di Pengelola Bosnas	2,281,585,544.00	
-	Kelebihan setor PFK		
		247,225,967,225.39	252,116,629,105.54

Saldo Pendapatan ditangguhkan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 terdiri dari ;

		340,095.00	
-	Kas di Bendahara Penerimaan	713,824,537.00	460,910,384.00
-	Kas di Pengelola Dana Bergulir	4,710,000.00	43,932,000.00
		718,534,537.00	504,842,384.00

Dana Lancar Lainnya

Dana Lancar Lainnya merupakan dana berupa kas yang masih terdapat pada pengelola kegiatan tetapi bukan bagian dari Silpa Kas daerah terdapat pada beberapa pengelola kegiatan antara lain

-	Kas dan Perhitungan di Pengelola Dana BOS Dikmenof		5,285,217,325.00
-	Kas dan Perhitungan di Pengelola Dana BOS Dikdas	2,281,585,544.00	12,068,065,125.00
-	Kas dan Perhitungan di Pengelola Blockgrant	-	26,837,712,126.00
	Jumlah	2,281,585,544.00	44,190,994,576.00

		-	-
<hr/>			
b.	Ekuitas Dana Investasi		
	Jumlah tersebut merupakan selisih antara nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan jumlah nilai Kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 dengan perhitungan sebagai berikut:		
	1) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	248,569,576,110.98	229,152,262,959.40
	2) Diinvestasikan dalam Aset Tetap	4,312,395,107,796.35	4,206,338,471,224.80
	3) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	20,917,541,955.89	24,765,730,709.89
	4) Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	-	-
	5) Akumulasi Penyusutan	(1,906,017,516,032.73)	(1,832,245,167,833.67)
	Jumlah Ekuitas Dana yang Diinvestasikan	-	-
<hr/>			
5.5	Komponen-Komponen Laporan Arus Kas		
5.5.1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
	1) Arus Kas Masuk	2,083,798,919,490.45	1,999,444,063,969.84
	Arus kas masuk dari aktivitas operasi merupakan penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah selama tahun anggaran 2017 dan 2016, terdiri atas:		
	a) Pendapatan Pajak Daerah	165,560,147,687.37	133,303,897,101.22
	b) Pendapatan Retribusi Daerah	30,868,837,013.00	26,323,114,533.67
	c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20,130,437,131.20	21,068,269,986.18
	d) Lain – Lain PAD yang Sah	274,539,576,560.40	222,869,319,741.00
	e) Dana Bagi Hasil Pajak	30,047,703,100.00	34,632,858,847.00
	f) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	4,823,475,870.00	4,705,557,041.00
	g) Dana Alokasi Umum	982,250,842,000.00	999,814,365,000.00
	h) Dana Alokasi Khusus	270,134,241,588.00	292,199,996,275.00
	i) Dana Penyesuaian	131,691,087,000.00	99,912,945,000.00
	j) Dana Tunjangan Pendidikan	-	-
	k) Pendapatan Bagi Hasil Pajak	145,068,714,991.48	137,137,204,944.77
	l) Bantuan Keuangan dr Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	18,085,091,821.00	21,327,800,000.00
	m) Pendapatan Hibah	10,598,764,728.00	6,148,735,500.00
	k) Pendapatan Lainnya	-	-
	Jumlah Arus Kas Masuk	2,083,798,919,490.45	1,999,444,063,969.84
	2) Arus Kas Keluar	1,744,122,897,609.46	1,732,483,446,312.16
	Arus kas keluar dari aktivitas operasi merupakan pengeluaran untuk belanja operasi, transfer dan belanja tak terduga selama tahun anggaran 2017 dan 2016, terdiri atas:		
	a) Belanja Pegawai	895,282,390,666.00	1,077,184,056,432.00
	b) Belanja Barang	541,568,682,551.46	420,218,336,647.16
	c) Bunga	-	-
	d) Hibah	66,409,792,624.00	33,558,135,500.00
	e) Bantuan Sosial	1,650,300,000.00	3,267,350,000.00
	f) Belanja Bantuan Keuangan kpd Prop/Kab/kota/Pemerintah Desa	222,760,211,526.00	185,304,699,853.00
	g) Belanja tak Terduga	2,121,325,557.00	520,872,300.00
	h) Belanja Bagi Hasil Kpd Kab/kota/Pemerintah Desa	14,330,194,685.00	12,429,995,580.00
	i) Bagi Hasil Retribusi	-	-
	Jumlah Arus Kas Keluar	1,744,122,897,609.46	1,732,483,446,312.16
	3) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	339,676,021,880.99	266,960,617,657.68
	Jumlah tersebut merupakan selisih antara arus kas masuk dengan arus kas keluar dari aktivitas operasi tahun anggaran 2017 dan 2016.		
5.5.2	Aliran Kas dari Aktivitas Investasi		
	1) Arus Kas Masuk	79,950,000.00	1,771,065,800.00
	Arus kas masuk dari aktivitas investasi merupakan penerimaan kas dari:		
	a) Pencairan Dana Cadangan	-	-
	b) Penjualan atas Tanah	-	-
	c) Penjualan atas Peralatan/Perlengkapan kantor yang tdk terpakai	46,650,000.00	22,500,000.00
	d) Penjualan atas Kendaraan Dinas Roda Dua yang tdk terpakai	-	15,260,000.00
	e) Penjualan atas Kendaraan Dinas Roda Empat dan roda enam yang tdk terpakai	-	73,782,000.00
	f) Penjualan atas Penjualan Bahan-bahan bekas bangunan	33,300,000.00	317,650,000.00
	g) Penjualan atas Penjualan Hasil Penebangan Pohon	-	-
	h) Penjualan atas Penjualan Hasil Peternakan	-	-
	i) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	1,341,873,800.00
	2) Arus Kas Keluar	349,769,265,453.14	300,105,532,661.95
	Jumlah arus kas keluar dari aktivitas investasi tersebut merupakan pengeluaran untuk belanja aset tetap dan aset lainnya selama tahun anggaran 2016 dan 2015 dengan rincian sebagai berikut:		
	a) Pembentukan Dana Cadangan	-	-
	b) Belanja Tanah	5,353,603,817.22	11,654,412,824.00
	c) Belanja Peralatan dan Mesin	84,538,385,071.70	61,664,752,510.95
	d) Belanja Gedung dan Bangunan	59,099,807,740.32	71,594,199,804.00
	e) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan.	165,077,171,647.90	136,453,446,503.00
	f) Belanja Aset Tetap Lainnya	18,059,083,376.00	2,270,581,020.00
	g) Belanja Aset Tetap Lainnya	491,213,800.00	423,140,000.00

h) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	17,150,000,000.00	16,045,000,000.00
Jumlah Arus Kas Keluar	349,769,265,453.14	300,105,532,661.95
g) Penyertaan Modal		
PD BPR Bank Pasar Bantul	2,250,000,000.00	1,500,000,000.00
PD Aneka Dharma	1,900,000,000.00	-
PDAM	5,500,000,000.00	4,500,000,000.00
Bank BPD DIY	7,500,000,000.00	10,045,000,000.00
Sub Jumlah	17,150,000,000.00	16,045,000,000.00

Dalam rangka penyajian kembali saldo awal LAK menyesuaikan format laporan berdasarkan PP 71 Tahun 2010 maka penyertaan modal yang LAK Audited masuk dalam aktivitas pembiayaan, ditampilkan kembali dalam saldo awal ke aktivitas investasi

3) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(349,689,315,453.14)	(298,334,466,861.95)
---	----------------------	----------------------

Jumlah tersebut merupakan selisih antara arus kas masuk dengan arus kas keluar dari aktivitas investasi tahun anggaran 2017 dan 2016.

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan th 2017 dan Pembiayaan th 2016

1) Arus Kas Masuk	6,612,602,016.00	8,666,584,768.00
-------------------	------------------	------------------

Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan merupakan penerimaan kas yang antara lain berasal dari pinjaman, penjualan obligasi, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, selama tahun 2017 dan 2016.

a) Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat		
b) Penerimaan Kembali Dana Bergulir	6,612,602,016.00	8,666,584,768.00

2) Arus Kas Keluar	7,214,800,000.00	8,707,000,000.00
--------------------	------------------	------------------

Jumlah arus kas keluar dari aktivitas pendanaan tersebut merupakan pengeluaran untuk pemberian pinjaman (dana bergulir) dan pembayaran pokok hutang selama tahun 2016 dan 2015 dengan rincian sebagai berikut:

a) Pembentukan Dana Cadangan		
b) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat		
c) Pemberian Pinjaman		
Pinjaman Daerah (Dana Bergulir)	7,214,800,000.00	8,707,000,000.00
d) Pembayaran Pokok Hutang	-	-
e) Penyertaan Modal		
PD BPR Bank Pasar Bantul		
PD Aneka Dharma		
PDAM		
Bank BPD DIY		
Jumlah	7,214,800,000.00	8,707,000,000.00

3) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan dan Pembiayaan	(602,197,984.00)	(40,415,232.00)
--	------------------	-----------------

Jumlah tersebut merupakan selisih antara arus kas masuk dengan arus kas keluar dari aktivitas pendanaan tahun anggaran 2017 dan 2016

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2017 dan Non Anggaran Tahun 2016

1) Arus Kas Masuk	28,701,843,908.00	74,261,569,411.00
-------------------	-------------------	-------------------

Arus kas masuk dari aktivitas transitoris merupakan penerimaan kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan dan pembiayaan selama tahun 2017 dan 2016 terdiri atas:

a) Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (Potongan Wajib PNS)	10,585,170,830.00	57,859,192,326.00
1 Iuran Wajib Pegawai	17,729,823.00	52,175,931,894.00
2 PPh Pasal 21	1,344,948,994.00	4,617,135,676.00
3 Taperum	832,098,000.00	1,051,113,000.00
4 Askes Terusan	8,390,394,013.00	15,011,756.00
l) Penerimaan Pengesahan SP2D Nihil untuk Penggunaan Uang Persediaan Tahun 2017 dan 2016	16,614,668,981.00	13,309,269,627.00
m) Pengembalian Sisa Uang Persediaan Tahun 2017 dan 2016	1,502,004,097.00	3,093,107,458.00
s)	-	-

Jumlah Arus Kas Masuk	28,701,843,908.00	74,261,569,411.00
-----------------------	-------------------	-------------------

2) Arus Kas Keluar	10,585,510,925.00	57,859,192,326.00
--------------------	-------------------	-------------------

Arus kas keluar dari aktivitas transitoris merupakan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi belanja dan pembiayaan selama tahun 2017 dan 2016 terdiri atas:

a) Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (Potongan Wajib PNS)	10,585,510,925.00	57,859,192,326.00
1 Iuran Wajib Pensiun	17,729,823.00	52,175,931,894.00
2 PPh Pasal 21	1,344,948,994.00	4,617,135,676.00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

3 Taperum	832,098,000.00	1,051,113,000.00
4 Askes Terusan	8,390,734,108.00	15,011,756.00

Dalam pos pengeluaran PPh pasal 21 terdapat penerimaan potongan yang bukan berasal dari potongan PPh 21 Gaji PNS tetapi penerimaan potongan PPh 21 dari Tunjangan Sertifikasi Guru

Dalam pos pengeluaran Askes terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 340.095,00 dan telah dikompensasi pada pembayaran askes pada bulan Maret 2018

i) Pengeluaran Uang Persediaan Tahun 2017 dan 2016	18,949,678,750.00	16,467,000,183.00
Jumlah Arus Kas Keluar	29,535,189,675.00	74,326,192,509.00

3) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris dan Pembiayaan

Jumlah tersebut merupakan selisih antara arus kas masuk dengan

Kenaikan (Penurunan) Kas	(11,448,837,323.15)	(31,478,887,534.27)
--------------------------	---------------------	---------------------

Saldo Awal Kas (BUD dan BLUD)	252,116,629,105.54	283,017,181,407.81
-------------------------------	--------------------	--------------------

Saldo Awal Kas BOS	2,725,049,690.00	
--------------------	------------------	--

Saldo Akhir Kas (BUD dan BLUD)	243,392,841,472.39	251,538,293,873.54
--------------------------------	--------------------	--------------------

Penjelasan saldo akhir kas Pemerinatah Kabupaten Bantul

Saldo akhir kas terdiri dari :

a) Saldo Silpa	247,225,967,225.39	252,116,629,105.54
Saldo Akhir Kas di BUD	229,851,336,932.90	221,268,668,753.62
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran yang disetor tahun 2018	833,005,672.00	73,492,848.00
Kas Dibendahara Dana Bergulir	4,710,000.00	43,932,000.00
Kas di Pengelola Dana Bosnas	2,281,585,544.00	
Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember yang disetor Tahun berikutnya tetapi merupakan bagian dari Pendapatan tahun 2017	713,824,537.00	460,910,384.00
Saldo Akhir Kas di BLUD	13,541,504,539.49	30,269,625,119.92
		221,847,003,985.62
b) Saldo non Silpa	-	44,192,156,176.00
e) Kas dibendahara pengeluaran yang bukan merupakan hak pemda yaitu pajak belum disetor dan dana pihak ketiga yang belum diambil	-	1,161,600.00
k) Sisa Kas Dana BOS Nasional dan Bos Propinsi di Sekolah -Sekolah Lingkup Dinas Pendidikan Dasar dan beban belanja modal yang telah direalisasikan di tahun 2015	-	12,068,065,125.00
l) Sisa Kas Dana BOS Nasional dan Bos Propinsi di Sekolah -Sekolah Lingkup Dinas Pendidikan Menengah dan non formal dan beban belanja modal yang telah direalisasikan di tahun 2015	-	5,285,217,325.00
m) Sisa Kas Dana Blockgrant di Sekolah -Sekolah di tahun 2015	-	26,837,712,126.00

Saldo Akhir Kas	247,225,967,225.39	296,308,785,281.54
-----------------	--------------------	--------------------

Silpa pada LRA sebesar Rp247.226.307.320,39 didalamnya masih terdapat angka kelebihan pembayaran BPJS sebesar Rp340.095,00 yang dikompensasi pada tahun 2018

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

EKUITAS AWAL	3,021,504,772,747.33	2,321,478,261,639.50
SURPLUS/DEFISIT-LO	306,895,598,426.64	181,586,796,970.83
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan (Pematangan lahan)		7,401,814,738.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap		
Koreksi ekuitas lainnya	(296,691,256,572.32)	511,037,899,399.00
Pengungkapan atas koreksi ekuitas untuk beban penyusutan tahun sebelumnya		
EKUITAS AKHIR	3,031,709,114,601.65	3,021,504,772,747.33

Ekuitas Akhir dalam Laporan perubahan ekuitas yang ditampilkan dalam LKD 2016 merupakan Ekuitas akhir audited ditambah dengan perhitungan surplus/defisit Laporan operasional dikurangi koreksi ekuitas lainnya



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

BAB VI INFORMASI NON KEUANGAN

1. Bentuk Hukum Pemerintah Kabupaten
Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panembahan Senopati
RSUD Panembahan Senopati sejak tahun 2009 menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan – Badan Layanan Umum Daerah (PPK- BLUD) berdasarkan Keputusan Bupati nomor: 195 tahun 2009 tanggal 2 Juli 2009 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD/PPK BLUD pada RSUD Panembahan Senopati. Pelaksanaan Penerapan PPK BLUD dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan baik dalam tata kelola pengelolaan maupun aturan-aturan yang membawahi pelaksanaan penerapan PPK BLUD
3. Pengelolaan Keuangan SIMDA dan Pengelolaan barang Daerah (SIMDA Barang)
Dalam rangka melaksanakan penatausahaan keuangan yang semakin rumit dan harus terintegrasi maka Pemerintah Kabupaten Bantul Dhi DPPKAD mengadakan Mou dengan BPKP Perwakilan Pusat dengan no 350/perj/bt/2011 tanggal 28 oktober 2011 yang bertujuan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melalui implementasi Sistem Informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA) dan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah (SMDA Barang) yang dilaksanakan secara bertahap.
4. Dalam rangka melaksanakan peraturan perundangan tentang jaminan kesehatan masyarakat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat antara lain Perpres no 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah dan Permenkes no 19 tahun 2014 tentang penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul menindaklanjuti dengan merubah fungsi Puskesmas menjadi BLUD Puskesmas sebagai unit kerja dibawah Dinas Kesehatan dengan Keputusan Bupati No 5240 Tahun 2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Penerapan PPK-BLUD pada UPT Puskesmas.
5. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka Pemerintah Kabupaten Bantul menindaklanjuti dengan Perda No 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Berikut bagan perbandingan SKPD sesuai PP 41 dengan OPD baru sesuai dengan PP 18 Tahun 2016



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

KELEMBAGAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KAB. BANTUL PP 41 vs PP 18

PP 41	PP 18
Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
Asisten Pemerintahan	Asisten Pemerintahan
Bagian Tata Pemerintahan	Bagian Administrasi Pemerintahan
Bagian Pemerintahan Desa	Bagian Administrasi Pemerintahan Desa
Bagian Hukum	Bagian Hukum
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Bagian Administrasi Pembangunan	Bagian Administrasi Perekonomian
Bagian Kerjasama dan Pengembangan Potensi Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan
Bagian Hubungan Masyarakat	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Asisten Administrasi Umum	Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat
Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
Bagian Umum	Bagian Umum
Bagian Protokol	Bagian Humas dan Protokol
	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

KELEMBAGAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KAB. BANTUL PP 41 vs PP 18

PP 41	PP 18
Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
Inspektorat	Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A,
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A,

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Daerah

Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe B,
Kantor Kesbangpol	Kantor Kesbangpol
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	BPBD
RSUD Panembahan Senopati	RSUD
Kecamatan (17 Kecamatan)	Kecamatan (17 Kecamatan)

KELEMBAGAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KAB. BANTUL PP 41 vs PP 18

PP 41	PP 18
Dinas Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe A
Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal	
Kantor Pemuda dan Olahraga	
Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan Tipe A
Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B
Dinas Sumber Daya Air	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tipe B
Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B
Dinas Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B,
Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan Tipe B
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B
Badan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Tipe B
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan Tipe B
	Dinas Pariwisata Tipe B
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Tipe A
Dinas Perijinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tipe A
Kantor Pengelolaan Pasar	Dinas Perdagangan Tipe B

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Dinas Pertanian dan Kehutanan	Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tipe B,
Dinas Kelautan dan Perikanan	
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	
Badan KK, Pemberdayaan Perempuan dan KB	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A
Kantor PMD	
Kantor Pengelolaan Data Telematika	Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B
Kantor Perpustakaan Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B,
Kantor Arsip	

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

**BAB VII
INFORMASI LAINNYA****7. 1. Dana Tugas Pembantuan**

Kabupaten Bantul dalam tahun 2017 mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat melalui Dana Tugas Pembantuan yang dilaksanakan langsung oleh dinas/instansi tanpa melalui prosedur APBD, dengan rincian sebagai berikut :

REALISASI DANA TP/UB TA 2017

DINAS / INSTANSI		ANGGARAN	REALISASI	%
I	Dinas Pertanian dan Kehutanan	3,105,000,000	2,955,610,662	95.19
i	Ditjen Holtikultura	3,105,000,000	2,955,610,662	95.19
-	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	3,000,000,000	2,889,732,000	96.32
-	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Ditjen Hortikultura	105,000,000	65,878,662	62.74
JUMLAH		3,105,000,000	2,955,610,662	95.19

7. 2. PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA SEKOLAH (BOSNAS)

Sesuai dengan amanat SE mendagri No 910/106/SJ tertanggal 11 Januari 2017 perihal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/kota pada APBD, maka untuk anggaran dan realisasi Pelaksanaan dan BOSNAS di sekolah negeri untuk Tahun 2017 telah dimasukkan dalam APBD Kabupaten Bantul baik secara Pendadapatan, belanja maupun silpa/sisa BOSNA Tahun 2016 yang dimasukkan melalui pos pembiayaan.

Pelaksanaan BOSNAS Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan penganggarnya maka SP3B dan SP2B diterbitkan atas nama SKPD penganpu bukan setiap sekolah. Dalam rangka pengesahan tersebut wajib dilampiri Surat Pernyataan tanggungjawab dari Kepala Sekolah (SD dan SMP Negeri) selaku Pelaksana dan penanggungjawab kegiatan BOSNAS sekolah.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

7.3.PENERIMA BLOCKGRANT DAN ASET YANG DIPEROLEHNYA

Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal ini Sekolah Negeri di lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan mendapat Dana Blockgrant dari Pemerintah Pusat yang tranfernya langsung ke Sekolah dan Kelompok tani tanpa melalui mekanisme Kas Daerah. Daftar Sekolah dan Kelompok tani yang menerima antara lain:

**Rekap Penerima Blockgrant dan Aset yang diperolehnya
per 31 Desember 2017**

NO	URAIAN	REALISASI BELANJA		
		PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA	MODAL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				
A	Pengadaan sarana pembelajaran berbasis TIK			
1	SD 2 KRETEK			46.380.400
2	SD 1 DINGKIKAN			46.370.400
3	SD 2 PEDES			46.370.400
4	SD 2 SALAKAN			46.380.400
5	SD 2 SUMBERAGUNG			46.380.400
6	SD 2 SUNGAPAN			46.370.400
7	SD 3 KADIPIRO			46.380.400
8	SD GUWOSARI			46.370.400
9	SD JARANAN			46.380.400
10	SD JOMBOR			46.380.400
11	SD KALANGAN			46.380.400

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

12	SD KARANGGAYAM		46.380.400
13	SD SENDANGSARI		46.370.400
14	SD SINDET		46.380.400
15	SD TANGKIL		46.380.400
16	SD TIRTOMULYO		46.380.400
17	SD TUNJUNGAN		46.380.400
B	Rehab ruang kelas		
	SD SAMBI KEREK		77.349.429
C	Pengadaan ruang perpustakaan		
	SD GUNUNG MULYO		147.217.782
D	Rehab ruang kelas		
	SMP 1 DLINGO		200.000.000
	SMP 2 IMOIRI		200.000.000
Jumlah			1.412.984.011
DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN			
A	Irigasi perpipaan/perpompaan		
1	kelompok tani sido katon		80.000.000
2	kelompok tani sumber alam		80.000.000
B	Rehab jaringan irigasi		
1	P3A "Pamioro Tirta"		33.000.000
2	Kelompok Tani "Tirtoyoso III"		38.500.000
3	P3A "Sedyo Rukun"		38.500.000
	P3A "Dwi Makmur"		

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

4			44.000.000
5	P3A "Tani rejo III"		33.000.000
6	Kelompok Tani "Mekar Sari"		38.500.000
7	Kelompok Tani "Sumber rejeki"		38.500.000
8	Kelompok Tani " Angratani"		33.000.000
9	Kelompok Tani "Bulu Lestari "		27.500.000
10	Kelompok Tani "Sido Maju "		38.500.000
11	Kelompok Tani "Rukun"		44.000.000
12	Kelompok Tani "Rambu Makmur"		33.000.000
Jumlah			600.000.000
Total			2.012.984.011

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

7.4. DATA RENCANA DAN REALISASI DANA DESA DI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

Dalam rangka melaksanakan penyaluran dana desa yang diberikan kepada Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten telah melaksanakan transfer dana tersebut dan telah dilaksanakan oleh Pemerintah desa. Ringkasan realisasi transfer dan penggunaan kami lampirkan sebagai berikut:

REKAP PENCAIRAN DANA DAERAH KE DESA TAHUN 2017

NO	DESA	PENCAIRAN RETRIBUSI		PENCAIRAN PAJAK		PENCAIRAN DANA DESA		PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA	
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
	PUNDONG								
1	SELOHARJO	19,495,500.00	19,495,500.00	101,889,660.00	101,889,660.00	1,112,977,000.00	1,112,977,000.00	1,793,028,000.00	1,793,028,000.00
2	PANJANGREJO	19,755,800.00	19,755,800.00	114,008,260.00	114,008,260.00	1,017,694,000.00	1,017,694,000.00	1,656,615,500.00	1,656,615,500.00
3	SRIHARDONO	22,272,400.00	22,272,400.00	109,891,260.00	109,891,260.00	1,021,824,000.00	1,021,824,000.00	1,698,881,000.00	1,698,881,000.00
	PANDAK		-		-		-		-
4	WIJIREJO	23,291,000.00	23,291,000.00	114,209,260.00	114,209,260.00	1,024,870,000.00	1,024,870,000.00	1,317,298,500.00	1,317,298,500.00
5	GILANGHARJO	23,041,300.00	23,041,300.00	121,632,260.00	121,632,260.00	1,175,501,000.00	1,175,501,000.00	1,922,648,000.00	1,922,648,000.00
6	TRIHARJO	20,536,900.00	20,536,900.00	112,780,260.00	112,780,260.00	1,193,059,000.00	1,193,059,000.00	1,667,603,500.00	1,667,603,500.00
7	CATURHARJO	20,385,700.00	20,385,700.00	114,683,260.00	114,683,260.00	1,080,108,000.00	1,080,108,000.00	1,501,208,000.00	1,501,208,000.00
	KASIHAN		-		-		-		-
8	TIRTONIRMOLO	36,367,400.00	36,367,400.00	271,257,260.00	271,257,260.00	1,104,098,000.00	1,104,098,000.00	1,639,816,500.00	1,639,816,500.00
9	TAMANTIRTO	22,099,100.00	22,099,100.00	465,747,260.00	465,747,260.00	1,170,219,000.00	1,170,219,000.00	1,736,185,500.00	1,736,185,500.00
10	BANGUNJIWO	21,057,700.00	21,057,700.00	371,657,260.00	371,657,260.00	1,350,607,000.00	1,350,607,000.00	2,548,390,000.00	2,548,390,000.00
11	NGESTIHARJO	24,019,200.00	24,019,200.00	494,777,260.00	494,777,260.00	1,161,980,000.00	1,161,980,000.00	1,687,624,500.00	1,687,624,500.00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

	SANDEN		-		-		-		-
12	GADINGSARI	35,657,900.00	35,657,900.00	109,811,260.00	109,811,260.00	1,047,317,000.00	1,047,317,000.00	1,651,764,000.00	1,651,764,000.00
13	MURTIGADING	20,797,300.00	20,797,300.00	110,398,260.00	110,398,260.00	967,031,000.00	967,031,000.00	1,479,193,000.00	1,479,193,000.00
14	GADINGHARJO	19,495,500.00	19,495,500.00	104,384,660.00	104,384,660.00	948,732,000.00	948,732,000.00	1,050,575,000.00	1,050,575,000.00
15	SRIGADING	31,053,200.00	31,053,200.00	113,578,260.00	113,578,260.00	992,769,000.00	992,769,000.00	1,533,752,000.00	1,533,752,000.00
	BANTUL		-		-		-		-
15	SABDODADI	20,276,600.00	20,276,600.00	124,152,260.00	124,152,260.00	905,967,000.00	905,967,000.00	854,468,000.00	854,468,000.00
17	PALBAPANG	22,072,500.00	22,072,500.00	144,922,260.00	144,922,260.00	1,006,670,000.00	1,006,670,000.00	1,396,640,000.00	1,396,640,000.00
18	RINGINHARJO	19,755,800.00	19,755,800.00	124,655,260.00	124,655,260.00	951,245,000.00	951,245,000.00	1,012,295,500.00	1,012,295,500.00
19	BANTUL	48,478,700.00	48,478,700.00	185,234,260.00	185,234,260.00	983,776,000.00	983,776,000.00	1,252,742,000.00	1,252,742,000.00
20	TRIRENGGO	28,735,400.00	28,735,400.00	152,314,260.00	152,314,260.00	1,092,102,000.00	1,092,102,000.00	1,728,615,000.00	1,728,615,000.00
	SEWON		-		-		-		-
21	PANGGUNG HARJO	22,359,500.00	22,359,500.00	386,307,260.00	386,307,260.00	1,119,349,000.00	1,119,349,000.00	1,906,057,000.00	1,906,057,000.00
22	PENDOWO HARJO	21,057,700.00	21,057,700.00	191,003,260.00	191,003,260.00	1,051,605,000.00	1,051,605,000.00	1,770,539,000.00	1,770,539,000.00
23	BANGUN HARJO	22,099,100.00	22,099,100.00	412,757,260.00	412,757,260.00	1,120,383,000.00	1,120,383,000.00	2,004,198,000.00	2,004,198,000.00
24	TIMBUL HARJO	22,242,800.00	22,242,800.00	295,227,260.00	295,227,260.00	1,119,529,000.00	1,119,529,000.00	1,964,812,500.00	1,964,812,500.00
	BANGUNTAPAN		-		-		-		-
25	WIROKERTEN	20,016,200.00	20,016,200.00	213,517,260.00	213,517,260.00	1,019,509,000.00	1,019,509,000.00	1,326,192,000.00	1,326,192,000.00
26	POTORONO	20,797,300.00	20,797,300.00	290,947,260.00	290,947,260.00	975,645,000.00	975,645,000.00	1,298,398,000.00	1,298,398,000.00
27	JAGALAN	19,755,800.00	19,755,800.00	120,127,260.00	120,127,260.00	879,176,000.00	879,176,000.00	610,220,500.00	610,220,500.00
28	JAMBIDAN	20,016,200.00	20,016,200.00	174,751,260.00	174,751,260.00	1,019,952,000.00	1,019,952,000.00	1,238,022,500.00	1,238,022,500.00
29	TAMANAN	20,276,600.00	20,276,600.00	248,927,260.00	248,927,260.00	968,786,000.00	968,786,000.00	1,252,036,500.00	1,252,036,500.00
30	BANGUNTAPAN	26,265,000.00	26,265,000.00	698,007,260.00	698,007,260.00	1,164,235,000.00	1,164,235,000.00	2,004,944,500.00	2,004,944,500.00
31	BATURETNO	22,317,900.00	22,317,900.00	287,217,260.00	287,217,260.00	949,829,000.00	949,829,000.00	1,164,174,500.00	1,164,174,500.00
32	SINGOSAREN	20,016,200.00	20,016,200.00	140,065,260.00	140,065,260.00	861,885,000.00	861,885,000.00	568,120,500.00	568,120,500.00
	IMOGIRI		-		-		-		-
33	KEBONAGUNG	19,495,500.00	19,495,500.00	102,071,360.00	102,071,360.00	885,241,000.00	885,241,000.00	710,967,000.00	710,967,000.00
34	KARANGTALUN	22,336,700.00	22,336,700.00	100,705,360.00	100,705,360.00	850,430,000.00	850,430,000.00	742,569,000.00	742,569,000.00
35	KARANGTENGAH	19,495,500.00	19,495,500.00	101,237,660.00	101,237,660.00	968,103,000.00	968,103,000.00	1,091,430,500.00	1,091,430,500.00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

36	SELOPAMIORO	22,147,300.00	22,147,300.00	104,726,560.00	104,726,560.00	1,188,188,000.00	1,188,188,000.00	2,245,681,500.00	2,245,681,500.00
37	IMOGIRI	39,013,800.00	39,013,800.00	103,384,560.00	103,384,560.00	841,431,000.00	841,431,000.00	675,940,500.00	675,940,500.00
38	WUKIRSARI	20,797,300.00	20,797,300.00	108,647,260.00	108,647,260.00	1,186,838,000.00	1,186,838,000.00	2,072,863,000.00	2,072,863,000.00
39	GIRIREJO	20,055,600.00	20,055,600.00	99,841,860.00	99,841,860.00	937,866,000.00	937,866,000.00	817,219,000.00	817,219,000.00
40	SRIHARJO	20,016,200.00	20,016,200.00	101,681,860.00	101,681,860.00	1,004,666,000.00	1,004,666,000.00	1,345,411,500.00	1,345,411,500.00
	DLINGO		-		-		-		-
41	TERONG	20,797,300.00	20,797,300.00	101,108,860.00	101,108,860.00	953,647,000.00	953,647,000.00	1,159,568,000.00	1,159,568,000.00
42	TEMUWUH	20,016,200.00	20,016,200.00	100,452,260.00	100,452,260.00	1,009,464,000.00	1,009,464,000.00	1,431,337,000.00	1,431,337,000.00
43	MUNTUK	20,016,200.00	20,016,200.00	101,253,460.00	101,253,460.00	1,018,630,000.00	1,018,630,000.00	1,431,778,500.00	1,431,778,500.00
44	MANGUNAN	45,627,200.00	45,627,200.00	100,602,260.00	100,602,260.00	970,715,000.00	970,715,000.00	1,205,121,000.00	1,205,121,000.00
45	DLINGO	20,847,300.00	20,847,300.00	101,246,660.00	101,246,660.00	1,018,180,000.00	1,018,180,000.00	1,334,329,500.00	1,334,329,500.00
46	JATIMULYO	19,495,500.00	19,495,500.00	100,099,760.00	100,099,760.00	1,091,684,000.00	1,091,684,000.00	1,482,130,000.00	1,482,130,000.00
	SRANDAKAN		-		-		-		-
47	TRIMURTI	23,391,400.00	23,391,400.00	120,830,260.00	120,830,260.00	1,142,805,000.00	1,142,805,000.00	1,743,521,000.00	1,743,521,000.00
48	PONCOSARI	55,814,000.00	55,814,000.00	117,928,260.00	117,928,260.00	1,076,817,000.00	1,076,817,000.00	1,875,092,500.00	1,875,092,500.00
	KRETEK		-		-		-		-
49	PARANGTRITIS	491,038,500.00	491,038,500.00	112,819,260.00	112,819,260.00	927,651,000.00	927,651,000.00	1,310,343,000.00	1,310,343,000.00
50	DONOTIRTO	24,735,300.00	24,735,300.00	111,804,260.00	111,804,260.00	933,057,000.00	933,057,000.00	1,320,811,000.00	1,320,811,000.00
51	TIRTOSARI	19,755,800.00	19,755,800.00	102,481,960.00	102,481,960.00	933,950,000.00	933,950,000.00	1,053,733,500.00	1,053,733,500.00
52	TIRTOMULYO	19,495,500.00	19,495,500.00	103,974,960.00	103,974,960.00	927,806,000.00	927,806,000.00	1,339,601,500.00	1,339,601,500.00
53	TIRTOHARGO	19,755,800.00	19,755,800.00	106,701,960.00	106,701,960.00	917,587,000.00	917,587,000.00	937,937,000.00	937,937,000.00
	JETIS		-		-		-		-
54	SUMBERAGUNG	24,787,400.00	24,787,400.00	123,153,260.00	123,153,260.00	1,070,527,000.00	1,070,527,000.00	1,753,507,000.00	1,753,507,000.00
55	CANDEN	20,271,100.00	20,271,100.00	115,290,260.00	115,290,260.00	1,044,216,000.00	1,044,216,000.00	1,583,063,000.00	1,583,063,000.00
56	PATALAN	20,536,900.00	20,536,900.00	127,580,260.00	127,580,260.00	983,907,000.00	983,907,000.00	1,668,397,000.00	1,668,397,000.00
57	TRIMULYO	20,420,200.00	20,420,200.00	122,201,260.00	122,201,260.00	1,076,851,000.00	1,076,851,000.00	1,672,720,000.00	1,672,720,000.00
	PAJANGAN		-		-		-		-
58	GUWOSARI	26,847,500.00	26,847,500.00	139,038,260.00	139,038,260.00	1,103,803,000.00	1,103,803,000.00	1,713,754,500.00	1,713,754,500.00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

59	SENDANGSARI	20,536,900.00	20,536,900.00	119,668,260.00	119,668,260.00	1,208,020,000.00	1,208,020,000.00	1,992,509,500.00	1,992,509,500.00
60	TRIWIDADI	19,755,800.00	19,755,800.00	109,202,260.00	109,202,260.00	1,229,160,000.00	1,229,160,000.00	2,185,422,000.00	2,185,422,000.00
	PIYUNGAN		-		-		-	-	-
61	SRIMULYO	39,034,000.00	39,034,000.00	150,500,260.00	150,500,260.00	1,060,886,000.00	1,060,886,000.00	1,867,368,000.00	1,867,368,000.00
62	SITIMULYO	20,536,900.00	20,536,900.00	187,052,260.00	187,052,260.00	1,024,708,000.00	1,024,708,000.00	1,697,533,000.00	1,697,533,000.00
63	SRIMARTANI	20,016,200.00	20,016,200.00	129,725,260.00	129,725,260.00	1,089,251,000.00	1,089,251,000.00	1,733,379,000.00	1,733,379,000.00
	SEDAYU		-		-		-	-	-
64	ARGODADI	20,898,500.00	20,898,500.00	124,552,260.00	124,552,260.00	1,170,223,000.00	1,170,223,000.00	1,862,060,500.00	1,862,060,500.00
65	ARGOMULYO	20,794,985.00	20,794,985.00	160,605,760.00	160,605,760.00	1,034,208,000.00	1,034,208,000.00	1,632,187,500.00	1,632,187,500.00
66	ARGOREJO	22,163,000.00	22,163,000.00	158,198,260.00	158,198,260.00	1,048,611,000.00	1,048,611,000.00	1,619,622,000.00	1,619,622,000.00
67	ARGOSARI	20,016,200.00	20,016,200.00	132,462,260.00	132,462,260.00	998,220,000.00	998,220,000.00	1,323,261,500.00	1,323,261,500.00
	PLERET		-		-		-	-	-
68	WONOKROMO	27,019,100.00	27,019,100.00	179,137,260.00	179,137,260.00	1,023,036,000.00	1,023,036,000.00	1,396,120,000.00	1,396,120,000.00
69	PLERET	22,918,200.00	22,918,200.00	146,770,260.00	146,770,260.00	997,193,000.00	997,193,000.00	1,388,700,500.00	1,388,700,500.00
70	WONOLELO	20,016,200.00	20,016,200.00	101,390,760.00	101,390,760.00	968,330,000.00	968,330,000.00	1,093,787,000.00	1,093,787,000.00
71	BAWURAN	19,495,500.00	19,495,500.00	105,598,660.00	105,598,660.00	982,657,000.00	982,657,000.00	1,074,567,500.00	1,074,567,500.00
72	SEGOROYOSO	20,016,200.00	20,016,200.00	105,219,360.00	105,219,360.00	992,498,000.00	992,498,000.00	1,193,616,000.00	1,193,616,000.00
	BAMBANGLIPURO		-		-		-	-	-
73	SIDOMULYO	21,804,500.00	21,804,500.00	112,829,260.00	112,829,260.00	1,139,398,000.00	1,139,398,000.00	1,827,063,000.00	1,827,063,000.00
74	SUMBERMULYO	22,064,900.00	22,064,900.00	114,479,260.00	114,479,260.00	1,107,251,000.00	1,107,251,000.00	1,811,880,500.00	1,811,880,500.00
75	MULYODADI	20,085,400.00	20,085,400.00	111,055,260.00	111,055,260.00	1,034,352,000.00	1,034,352,000.00	1,661,238,000.00	1,661,238,000.00
	JUMLAH	2,230,044,685.00	2,230,044,685.00	12,100,150,000.00	12,100,150,000.00	77,730,491,000.00	77,730,491,000.00	111,316,201,500.00	111,316,201,500.00

7.5 REKAPITULASI LAPORAN KEUANGAN DESA

Sebagai tambahan informasi mengenai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa berikut kami sampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Desa tahun 2017 yang diambil dari SISKEUDES pertanggal 31 Januari 2018:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA TAHUN 2017

NO	NAMA DESA	PENDAPATAN DESA			BELANJA DESA			PEMBIAYAAN DESA	
		Pendapatan Asli Desa	Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Penerimaan Pembiayaan	Pengeluaran Pembiayaan
1	DESA PONCOSARI	226,205,118.00	3,481,151,760.00	6,407,457.00	796,225,920.00	1,125,548,765.00	1,184,310,200.00	146,803,426.00	-
2	DESA TRIMURTI	78,182,413.00	3,959,172,510.00	6,030,000.00	1,088,454,600.00	660,454,864.00	1,878,816,952.00	749,289,428.00	-
3	DESA GADINGSARI	245,150,424.00	2,956,550,160.00	8,285,000.00	700,423,800.00	976,845,537.00	1,170,197,722.00	1,282,533,315.00	
4	DESA GADINGHARJO	138,082,716.00	2,148,187,160.00		484,952,640.00	751,910,657.00	925,200,470.00	188,520,046.00	
5	DESA SRIGADING	295,618,878.00	2,831,152,460.00		670,297,050.00	918,191,442.00	1,200,304,490.00	580,636,761.00	
6	DESA MURTIGADING	207,521,574.00	2,707,419,560.00		604,053,550.00	1,457,745,893.00	771,501,326.00	490,609,269.00	20,000,000.00
7	DESA TIRTOMULYO	151,045,559.00	2,390,877,960.00	131,517,500.00	517,355,010.00	686,461,421.00	1,374,412,985.00	665,462,500.00	
8	DESA PARANGTRITIS	237,138,229.00	3,363,601,760.00	5,233,750.00	588,631,280.00	1,103,375,550.00	1,979,357,064.00	3,135,047,682.00	
9	DESA DONOTIRTO	145,398,191.00	2,790,407,560.00		392,068,700.00	943,095,619.00	1,055,703,400.00	-	
10	DESA TIRTOSARI	621,668,308.00	2,109,921,260.00	42,500,000.00	512,652,000.00	820,470,900.00	978,278,909.00	305,801,428.00	61,077,800.00
11	DESA TIRTOHARGO	170,635,672.00	2,111,981,760.00	-	559,629,624.00	610,310,922.00	1,391,229,300.00	1,168,689,643.00	-
12	DESA SELOHARJO	35,905,182.00	3,467,390,160.00		683,076,000.00	493,136,789.00	1,574,077,376.00	207,847,335.00	
13	DESA PANJANGREJO	173,384,881.00	2,833,073,560.00	5,000,000.00	660,480,406.00	695,059,989.00	1,326,998,000.00	459,500,362.00	-
14	DESA SRIHARDONO	230,945,338.00	3,055,267,660.00		684,124,000.00	1,265,229,400.00	644,431,000.00	200,000,000.00	
15	DESA SIDOMULYO	585,433,422.00	3,701,094,760.00	6,000,000.00	736,074,000.00	1,479,554,336.00	1,937,125,475.00	1,650,009,738.00	
16	DESA MULYODADI	219,853,936.00	3,176,730,660.00		679,232,675.00	832,565,276.00	1,881,375,498.00	943,783,798.00	-
17	DESA								

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

	SUMBERMULYO	524,759,582.00	3,444,175,660.00	4,349,000.00	769,804,640.00	1,612,545,532.00	1,126,164,700.00	700,656,455.00	
18	DESA CATURHARJO	82,450,218.00	2,936,384,960.00	-	629,964,834.00	892,055,280.00	1,323,308,700.00	193,065,863.00	
19	DESA TRIHARJO	201,409,023.00	3,668,979,660.00		573,793,130.00	878,479,264.00	1,523,002,978.00	749,588,659.00	-
20	DESA GILANGHARJO	109,651,252.00	3,932,822,560.00	70,000,000.00	747,710,500.00	1,203,171,694.00	1,430,273,624.00	451,221,328.00	
21	DESA WIJIREJO	134,658,566.00	3,377,528,760.00	1,510,000.00	585,315,000.00	1,241,687,884.00	1,167,661,800.00	541,705,000.00	
22	DESA TRIWIDADI	196,111,734.00	4,140,995,160.00		700,160,400.00	858,600,295.00	2,258,308,563.00	555,088,674.00	-
23	DESA SENDANGSARI	41,480,344.00	3,869,404,060.00	19,300,200.00	775,886,742.00	1,127,488,645.00	1,202,257,890.00	155,057,372.00	
24	DESA GUWOSARI	53,278,604.00	3,128,443,260.00	28,038,200.00	676,240,088.00	857,364,090.00	1,681,929,400.00	695,280,203.00	50,000,000.00
25	DESA PALBAPANG	352,654,845.00	2,570,504,760.00		549,748,785.00	1,408,158,712.00	1,390,008,400.00	3,213,808,559.00	-
26	DESA RINGINHARJO	132,653,302.00	2,227,951,560.00		444,166,097.00	632,941,649.00	826,764,991.00	224,207,052.00	
27	DESA BANTUL	210,542,092.00	3,522,488,960.00		534,918,055.00	676,022,696.00	1,942,354,650.00	1,046,437,860.00	
28	DESA TRIRENGGO	364,993,207.00	3,624,766,660.00		741,291,478.00	1,333,056,935.00	1,265,320,400.00	516,465,800.00	
29	DESA SABDODADI	106,853,511.00	1,838,290,560.00		411,452,880.00	712,575,590.00	856,693,640.00	85,000,000.00	
30	DESA PATALAN	201,577,000.00	3,015,421,160.00	11,706,435.56	666,374,542.00	841,174,117.56	1,505,598,555.59	284,200,615.00	-
31	DESA CANDEN	118,734,884.00	2,929,860,360.00	2,477,060.00	583,084,500.00	908,654,621.00	1,601,176,885.00	559,050,863.00	
32	DESA SUMBERAGUNG	346,430,616.00	3,236,974,660.00	527,000.00	746,855,245.00	1,108,173,170.00	1,155,380,500.00	487,751,629.00	-
33	DESA TRIMULYO	312,073,715.00	3,042,192,460.00		832,464,925.00	1,498,649,391.00	1,136,104,500.00	1,350,898,917.00	
34	DESA SELOPAMIORO	114,362,211.00	4,343,243,360.00		830,193,816.00	1,883,248,232.00	1,630,011,630.00	596,924,332.00	25,000,000.00
35	DESA SRIHARJO	24,468,090.00	2,524,259,560.00		463,090,859.00	1,020,641,395.00	1,051,168,639.00	481,488,813.00	-
36	DESA WUKIRSARI	197,423,393.00	4,939,145,560.00		768,889,000.00	1,300,097,248.00	1,156,974,728.00	231,655,648.00	
37	DESA KEBONAGUNG	121,531,266.00	1,737,774,860.00		505,470,880.00	373,953,551.00	656,604,900.00	287,290,297.00	
38	DESA KARANGTENGAH	32,133,931.00	2,245,266,660.00		512,073,516.00	719,711,501.00	772,437,187.00	31,654,568.00	102,000,000.00
39	DESA GIRIREJO	25,324,996.00	2,112,999,031.00	44,000,000.00	519,227,500.00	1,120,648,100.00	602,039,800.00	-	
40	DESA								

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

	KARANGTALUN	57,385,860.00	1,746,041,060.00		472,472,798.00	445,291,268.00	894,116,650.00	225,692,956.00	
41	DESA IMOIRI	144,611,522.00	1,759,769,860.00		525,159,854.00	387,747,944.00	697,257,255.00	110,682,205.00	-
42	DESA MANGUNAN	59,323,662.00	3,413,671,460.00		501,818,000.00	519,669,401.00	2,421,716,750.00	129,900,671.00	
43	DESA MUNTUK	39,101,526.00	3,029,678,160.00	22,792,734.00	550,815,600.00	915,413,238.00	1,187,270,782.00	258,330,342.00	99,999,400.00
44	DESA DLINGO	30,521,773.00	2,582,803,960.00		555,495,300.00	880,919,000.00	891,263,960.00	119,650,539.00	50,000,000.00
45	DESA TEMUWUH	72,032,094.00	2,713,769,460.00		519,037,600.00	748,964,451.00	1,263,407,412.00	217,157,035.00	
46	DESA TERONG	68,274,123.00	2,410,121,160.00		527,102,269.00	690,210,164.00	953,925,152.00	130,707,002.00	
47	DESA JATIMULYO	42,389,193.00	3,441,659,260.00		564,453,200.00	938,761,235.00	1,331,629,479.00	471,890,170.00	
48	DESA BATURETNO	100,051,127.00	2,723,538,660.00	270,606,741.00	530,723,075.00	1,098,748,328.00	2,997,838,750.00	3,108,410,391.00	
49	DESA BANGUNTAPAN	1,229,094,935.00	4,383,451,760.00		1,688,050,767.00	1,169,745,232.00	1,927,625,533.00	392,702,122.00	
50	DESA JAGALAN	57,353,813.00	2,441,295,560.00		610,424,550.00	729,197,268.59	1,062,774,900.00	100,434,006.00	
51	DESA SINGOSAREN	66,452,183.00	1,597,731,825.00	42,107,287.00	335,896,002.00	576,724,034.00	497,129,867.00	109,436,953.00	
52	DESA JAMBIDAN	159,794,102.00	2,782,741,960.00	42,500,000.00	563,516,431.00	827,132,231.00	988,600,900.00	240,673,579.00	115,575,000.00
53	DESA POTORONO	240,050,655.00	3,080,787,560.00	6,542,201.00	610,428,552.00	1,556,261,344.00	1,735,359,494.00	1,894,457,511.00	100,000,000.00
54	DESA TAMANAN	203,658,292.00	2,586,359,234.00		546,321,172.00	996,897,034.00	1,115,903,389.00	337,135,156.00	
55	DESA WIROKERTEN	143,861,185.00	2,684,234,460.00	-	560,722,155.00	766,451,996.00	1,114,190,053.00	245,746,835.00	
56	DESA WONOKROMO	91,205,448.00	3,335,312,360.00		514,304,278.00	1,335,796,391.00	852,560,370.00	166,196,410.00	50,000,000.00
57	DESA PLERET	105,827,875.00	4,305,581,960.00	806,130,021.00	568,319,096.00	773,762,803.00	3,486,429,553.00	739,584,809.00	
58	DESA SEGOROYOSO	105,692,745.00	4,653,849,560.00		564,678,480.00	1,660,086,897.00	843,089,250.00	327,627,911.00	
59	DESA BAWURAN	27,343,829.00	2,542,318,660.00	-	520,819,475.00	631,286,513.00	1,022,624,402.00	214,103,077.00	
60	DESA WONOLELO	34,431,613.00	2,603,523,960.00	295,424.00	500,392,826.00	740,642,040.00	821,777,002.00	157,370,366.00	
61	DESA SITIMULYO	290,006,284.00	3,529,830,160.00	306,000,000.00	732,891,069.00	1,536,483,202.48	1,446,083,932.00	1,079,677,669.00	50,000,000.00
62	DESA SRIMULYO	2,897,103,328.00	3,597,788,260.00	-	3,000,990,927.00	1,849,349,342.00	1,100,451,505.00	294,371,892.00	-
63	DESA SRIMARTANI								



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

		138,831,750.00	3,567,113,460.00	125,958,263.00	818,511,000.00	1,036,446,700.00	1,326,166,500.00	365,202,393.00	45,000,000.00
64	DESA PENDOWOHARJO	292,038,193.00	3,064,204,960.00		824,082,357.00	1,300,432,013.00	1,207,609,067.00	483,111,567.00	85,000,000.00
65	DESA TIMBULHARJO	360,343,940.00	3,744,061,560.00		779,081,569.00	841,371,200.00	2,371,748,342.00	861,836,242.00	
66	DESA BANGUNHARJO	389,601,344.00	4,534,437,360.00	11,001,180.00	701,428,000.00	2,616,753,939.00	1,549,250,862.00	2,259,993,352.00	
67	DESA PANGGUNG HARJO	528,477,144.00	3,434,072,760.00	266,800,000.00	1,042,789,315.00	2,638,610,196.00	369,363,496.00	296,567,409.00	
68	DESA BANGUNJIWO	90,665,937.00	5,763,711,960.00	1,778,662.00	922,012,478.00	1,834,200,537.00	1,856,751,753.00	605,550,874.00	
69	DESA TIRTONIRMOLO	488,136,975.00	3,451,339,160.00	-	677,662,178.00	1,673,973,899.00	1,132,802,765.00	3,041,632,717.00	
70	DESA TAMANTIRTO	113,785,006.00	3,834,250,860.00	-	732,218,507.00	1,072,232,263.00	1,632,335,600.00	690,588,257.00	
71	DESA NGESTIHARJO	54,167,620.00	4,057,948,560.00		521,504,550.00	692,041,700.00	405,075,675.00	1,006,346,091.00	
72	DESA ARGODADI	229,074,343.00	3,392,734,260.00	6,477,000.00	753,085,000.00	1,029,226,745.00	1,965,540,950.00	586,835,121.00	-
73	DESA ARGOREJO	162,462,766.00	3,049,094,660.00		601,653,006.00	751,910,355.00	1,557,176,291.00	356,898,515.00	-
74	DESA ARGOSARI	273,251,319.00	2,533,959,960.00		604,440,580.00	485,752,850.00	3,562,747,480.00	5,207,005,402.00	
75	DESA ARGOMULYO	238,855,213.00	3,297,756,645.00	-	655,955,023.00	1,035,043,250.00	1,581,093,700.00	596,229,847.00	

Sumber data SISKEUDES Kabupaten data diambil per 31 Januari 2018

7.6 PENJELASAN REALISASI PENGADAAN TANAH PENGGANTI TANAH KAS DESA SECARA BERTAHAP

Pemerintah Kabupaten Bantul dari Tahun 2014 melakukan kegiatan pembelian tanah yang digunakan untuk keperluan umum, berdasarkan Peraturan Gubernur no 65 tahun 2013 tentang Tanah Kas Desa khususnya pasal 40 ayat (4) yang berbunyi selama proses pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa, dana pengadaan tanah pengganti tanah kas desa dititipkan pada bank oleh dan atas nama instansi yang memerlukan tanah. Sampai dengan pelaporan per 31 Desember 2017 sudah tidak ada kelanjutan dari kegiatan tersebut.

Dengan mendasarkan pada ::

1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Tanah Desa;
2. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pengelolaan rekening milik Satuan Kerja Perangkat Daerah;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Panitia kegiatan melakukan pemindah bukuan dan penutupan rekening yang ada di BPD DIY Cabang Bantul.

Adapun data rekening dilakukan pemindah bukuan dan penutupan tersebut adalah rekening pengadaan tanah kas desa sebagai berikut

NO	KEGIATAN	ATAS NAMA	NOMOR REKENING	REKENING TUJUAN PEMINDAH BUKUAN
1	PENGADAAN TANAH KAS DESA BATURETNO UNTUK PEMBANGUNAN JEMBATAN POTORONO	DANA PENGADAAN TANAH KAS DESA BATURETNO_TAPEM	004.221.035159	BANK BANTUL REKENING PENGADAAN TANAH A.N PEMERINTAH DESA BATURETNO NO REK 02.20.00/K00108
2	PENGADAAN TANAH KAS DESA POTORONO UNTUK PEMBANGUNAN JEMBATAN POTORONO	DANA PENGADAAN TANAH KAS DESA POTORONO_TAPEM	004.221.035156	BANK BANTUL REKENING PENGADAAN TANAH A.N PEMERINTAH DESA POTORONO NO REK 02.20.00/K00136
3	PENGADAAN TANAH KAS DESA PALBAPANG UNTUK PENGEMBANGAN SMA 1 BANTUL	DANA PENGADAAN TANAH KAS DESA PALBAPANG_TAPEM	004.221.035154	BANK BANTUL REKENING PENGADAAN TANAH A.N PEMERINTAH DESA PALBAPANG NO REK 02.20.00/K00001
4	PENGADAAN TANAH KAS DESA WONOKROMO UNTUK PEMBANGUNAN DAM PACAR	DANA PENGADAAN TANAH KAS DESA WONOKROMO_TAPEM	004.221.035157	BANK BANTUL REKENING PENGADAAN TANAH A.N PEMERINTAH DESA WONOKROMO NO REK 02.20.00/K00282
5	PENGADAAN TANAH KAS DESA TIRTONIRMOLO UNTUK PEMBANGUNAN PASAR NITEN	DANA PENGADAAN TANAH KAS DESA TIRTONIRMOLO_K.PASAR	004.221.035158	BANK BANTUL REKENING PENGADAAN TANAH A.N PEMERINTAH DESA TIRTONIRMOLO NO REK 02.20.00/K00248
6	PENGADAAN TANAH KAS DESA GADINGSARI UNTUK PEMBANGUNAN PASAR SOROBAYAN	DANA PENGADAAN TANAH KAS DESA GADINGSARI_K.PASAR	004.221.035160	BANK BANTUL REKENING PENGADAAN TANAH A.N PEMERINTAH DESA GADINGSARI NO REK 02.20.00/K00263
7	PENGADAAN TANAH KAS DESA BATURETNO UNTUK PEMBANGUNAN PASAR NGIPIK	DANA PENGADAAN TANAH KAS DESA BATURETNO_K.PASAR	004.221.035159	BANK BANTUL REKENING PENGADAAN TANAH A.N PEMERINTAH DESA BATURETNO NO REK 02.20.00/K00108
8	PENGADAAN TANAH KAS DESA PONCOSARI UNTUK PEMBANGUNAN JJLS	DANA PENGADAAN TANAH KAS DESA PONCOSARI_DINAS PU	004.221.035161	BANK BANTUL REKENING PENGADAAN TANAH A.N PEMERINTAH DESA PONCOSARI NO REK 02.20.00/K00055



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

7.7 LAPORAN PERKEMBANGAN ASET PT. BKM (DALAM LIKUIDASI)

Laporan perkembangan aset PT. BKM (dalam likuidasi) sampai dengan 31 Desember 2017, sebagai berikut:

1. Selama tahun 2017 PT. BKM (dalam likuidasi) stagnan, tidak dapat melakukan transaksi di karenakan masih dalam proses hukum.
2. Dengan kondisi tersebut di atas pada point 1 maka asset yang di miliki tidak mengalami perubahan yang signifikan
Berikut kami laporkan perkembangan sejak terbentuknya Tim Likuidasi
 - a. Aset tanah sebanyak 67 bidang sertifikat HGB luas 321.205 M2 berlokasi di?
 - Desa Guwosari , 42 sertifikat seluas : 151,741 M2
 - Desa Sendangsari, 23 sertifikat : 165.411 M2
 - Desa Bangunjiwo, 2 sertifikat : 4.053 M2
 - b. Uang dalam KasRp. 179.543,-
3. Perubahan Aset sampai dengan 31 Desember 2017, adalah:
 - a) Aset terjual 37 bidang luas : 141.238 M2 harga 17.976.932.000 namun masih ada yang belum terbayar lunas Rp.1.169.840.000,- jadi uang hasil penjualan Rp.16.807.092.000,-
 - b) Dari keseluruhan dana tersebut, telah dibagi sebanyak Rp.14.294.877.360,- yaitu ke Pemda Bantul (61%) Rp.8.719.875.190,-dan PerwitaKarya (39%)Rp.5.575.002.170,-
 - c) Selisih hasil penjualan setelah dikurangi pembagian kepemegang saham dipergunakan untuk cadangan membayar kewajiban seperti pajak: PPh, PPN, PBB dan operasional tim likuidasi.
 - d) Saldo kas per 31 Desember 2017, Rp.4.056.535,- dan saldo bank Rp.12.173.034,-
 - e) Untuk rencana pembangunan kampus UIN yang mempergunakan asset PT. BKM sampai saat ini masih dalam proses. Adapun asset yang telah disepakati sebanyak 12 bidang luas 37.037 M2dengan harga Rp.12.786.983.000,-
4. Tanah yang belum terjual sebanyak 18 bidang seluas 129.467 M2 nilai appraisal Rp.6.542.960.000

PT. BANTUL KOTA MANDIRI (DALAM LIKUIDASI)
LAPORAN KAS
PER 01 DESEMBER 2017 S/D 31 DESEMBER 2017

KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO (RP)
Saldokas			Rp.4.056.535,-
Saldo Bank			Rp.12.173.034,-
TOTAL			Rp. 16.229.569,-



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

7.8. INFORMASI ASET TETAP YANG TIDAK DI OPERASIONALKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

DATA TANAH MILIK SULTAN YOGYAKARTA YANG DIPAKAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

NO	LOKASI	NOMOR KEKANCINGAN	LUAS (m2)	PERUNTUKAN	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	Trirenggo	belum ada	3,800	SD Bantul Timur	-	
2	Pendowoharjo	belum ada	2,436	SD Cepit		
3	Bangunharjo	belum ada	1,350	SD Wojo		
4	Sumberagung	belum ada	5,000	SD Sawahan		
5	Pendowoharjo	belum ada	2,436	SD Bakalan		
6	Patalan	belum ada	2,500	SD Bakulan		
7	Mulyodadi	belum ada	1,575	SD Sribit		
8	Sidomulyo	belum ada	1,866	SD I panggang		
		belum ada	2,212	SD I panggang		
9	Srimulyo	belum ada	2,000	SD Kaligatuk		
10	Ngestiharjo	belum ada	1,750	SD Kadipiro I		
11	Tamantirto	belum ada	1,700	SD Kasihan		
12	Argomulyo	belum ada	1,960	SD Pedes		
13	Trimurti	belum ada	2,050	SD 1 Srandakan		
14	Murtigading	belum ada	5,390	SD Piring		
15	Panggunharjo	belum ada	2,750	Kantor Kec. Sewon		
16	Wijirejo	belum ada	4,425	Kantor Kec. Pandak		
17	Trimurti	belum ada	-	Kantor Kec. Srandakan		berdasarkan surat ket.
18	Sendangsari	belum ada	-	Kantor Kec. Pajangan		berdasarkan surat ket.
19	Srigading	belum ada	1,300	Kantor UPT Sanden		
20	Palbapang	Proses	5,581	Terminal		
21	Palbapang	belum ada	-	Kantor DPUPKP		
			52,081			

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

DAFTAR REKAPITULASI BMD KABUPATEN BANTUL YANG DIKUASAI PIHAK KETIGA TAHUN 2017**Tanah secara Pinjam Pakai**

No.	PEMINJAM PAKAI	NAMA GEDUNG & BANGUNAN	ALAMAT	PEMANFAATAN	MASA BERLAKU	KETERANGAN
1	KPUD Bantul	Tanah EksTuti Tengah	Jl. Wakhid Hasyim Sumuran, Palbapang, Bantul	Kantor KPUD Bantul	24 Maret 2015 s/d 23 Oktober 2018	
2	Pemda DIY	Tanah	Wijirejo, Pandak, Bantul	Pembibitan Pertanian	1 April 2015 s/d 31Maret 2020	
3	Kodim	Tanah Eks Disperindagkop	Jl. Pramuka No. 3 Bantul	Sekretariat Pepabri	21 Januari 2016 s/d 20 Januari 2021	

Tanah secara Sewa

No.	PENYEWA	NAMA GEDUNG & BANGUNAN	PEMANFAATAN	MASA BERLAKU	KETERANGAN
1	PT. BPD DIY	Tanah di Komplek Perkantoran Manding	Kantor Kas BPD DIY Cab. Bantul	14 Desember 2015 s/d 13 Desember 2020	
2	PWNU DIY	Tanah eksTransito	UNU Yogyakarta	13 Desember 2016 s/d 12 Desember 2018	
3	Yayasan KBTK Bhakti AnnisaWanita Islam Bantul	Sebagian Tanah EksDinasPerijinanKab. Bantul	KBTK Bhakti Annisa	29 Desember 2016 s/d 28 Desember 2021	
4	PT. Bank BPD DIY	Sebagian Tanah di KompleksParasamya	Bangunan ATM dan Kantor Kas BPD DIY	28 Desember 2017 s/d 27 Desember 2022	

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Gedung secara Pinjam Pakai

No.	PEMINJAM PAKAI	NAMA GEDUNG & BANGUNAN	ALAMAT	PEMANFAATAN	MASA BERLAKU	KETERANGAN
1	Rupbasan Bantul	GedungEksTuti Barat	Jl. Srandakan, PandakBantul	Kantor Rupbasan	15 Mei 2016 s/d 14 Mei 2021	
2	KPUD Bantul	GedungEksTuti Tengah	Jl. WakhidHasyimSumuran, Palbapang, Bantul	Kantor KPUD Bantul	24 Maret 2015 s/d 23 Oktober 2018	
3	Kodim	Gedung Eks Disperindagkop	Jl. Pramuka No. 3 Bantul	Sekretariat Fepabri	21 Januari 2016 s/d 20 Januari 2021	
4	Pemda DIY	SebagianGedungEks Kantor Pora	Jl. RA KartiniBantul	Kantor Balai Pendidikan Menengah Kab. Bantul	25 Januari 2017 s/d 25 Januari 2022	

Gedung secara Sewa

No.	PENYEWA	NAMA GEDUNG & BANGUNAN	PEMANFAATAN	MASA BERLAKU	KETERANGAN
1	PWNU DIY	Gedung eks Transito	UNU Yogyakarta	13 Desember 2016 s/d 12 Desember 2018	
2	Yayasan KBTK Bhakti AnnisaWanita Islam Bantul	Sebagian Gedung Eks Dinas Perijinan Kab. Bantul	KBTK Bhakti Annisa	29 Desember 2016 s/d 28 Desember 2021	
3	SMP Unggulan Aisyiah Bantul	Gedung Eks Dikmenof	SMP UnggulanAisyiahBantul	21 Nop. 2017 s/d 20 Nop. 2022	
4	PT. Bank BPD DIY	SebagianGedung di KompleksParasamya	Bangunan ATM dan Kantor Kas BPD DIY	28 Desember 2017 s/d 27 Desember 2022	

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Peralatan dan mesin berupa Pinjam Pakai Kendaraan Dinas secara Pinjam Pakai

No.	NAMA BARANG	PEMINJAM PAKAI	NO. RANGKA	NO. MESIN	NO. POLISI	JANGKA WAKTU
1	Toyota New Avanza	Kantor Pelayanan pajak (Samsat)	MIBA2J6 K 0017889	K 3DB7 3565	AB 86 B	2 Nopember 2015 s/d 1 Nopember 2020
2	Toyota Avanza E M/T	Rumah Tahanan Negara	MHFM1BA 2J7K 008 060	DC 47169	AB 1016 IB	15 Desember 2015 s/d 14 Desember 2020
3	Toyota KijangInnova G	Polres Bantul	MHFXX42G0E2278346	1TR-7709838	AB 1310 UB	30 Juni 20014 s/d 29 Juni 2019
4	Honda GL 200 CW RI	Polres Bantul	NHIMC22129KO17291	MC22E17237	AB 2383 UB	25 November 2015 s/d 24 November 2020
5	Honda GL 200 CW RI	Polres Bantul	NHIMC22129KO18988	MC22E18941	AB 2374 UB	Sda
6	Honda GL 200 CW RI	Polres Bantul	NHIMC22189KO18400	MC22E18314	AB 2375 UB	Sda
7	Honda GL 200 CW RI	Polres Bantul	NHIMC22119KO21042	MC22E20945	AB 2376 UB	Sda
8	Honda GL 200 CW RI	Polres Bantul	NHIMC22149KO21049	MC22E20948	AB 2377 UB	Sda
9	Honda GL 200 CW RI	Polres Bantul	NHIMC22109KO20965	MC22E20977	AB 2378 UB	Sda
10	Honda GL 200 CW RI	Polres Bantul	NHIMC22169KO21005	MC22E21127	AB 2379 UB	Sda
11	Toyota Avanza G M/T	Polres Bantul	MHFM1BA 3JJK 061368	DC 4776	AB 1015 IB	Sda
12	Toyota Kijang STD KF 70 Short	Polres Bantul	MHF11KF7030040471	7K0607184	AB 27 UB	4 Februari 2015 s/d 3 Februari 2020
13	Toyota KijangInnova G	Kejaksaan Negeri Bantul	MHFXX42G9E2279530	1TR-7720145	AB 1311 U B	30 Juni 2014 s/d 29 Juni 2019
14	Honda Revo 110 Spoke	Kejaksaan NegeriBantul	NHIJE 106 3308	JBCIE 106 3308	AB 2414 UB	18Desember 2015 s/d 17Desember 2020
15	Honda Revo 110 Spoke	Kejaksaan NegeriBantul	NHIJBC II X9K044929	JBCIE 1058054	AB 2415 UB	Sda
16	Honda NF 100 SL	Kejaksaan NegeriBantul	MHIHB31135K150745	HB31E1156669	AB 695 EB	Sda
17	Honda NF 100 SL	Kejaksaan NegeriBantul	MHIHB31105K150749	HB31E1156690	AB 694 EB	Sda
18	Toyota KijangInnova G	Kodim 0729 Bantul	MHFXX42G2E2283659	1TR-7756492	AB 1312 UB	30 Juni 2014 s/d 29 Juni 2019
19	Honda GL 200 CW RI	Kodim 0729 Bantul	NHIMC22119KO21011	MC22E1021129	AB 2380 UB	25 November 2015 s/d 24 November 2020
20	Honda GL 200 CW RI	Kodim 0729 Bantul	NHIMC22149KO21018	MC22E1021130	AB 2381 UB	Sda
21	Honda GL 200 CW RI	Kodim 0729 Bantul	NHIMC22199KO21015	MC22E1021134	AB 2382 UB	Sda
22	Toyota Kijang Super KF	KPU	KF50114575	5K9106100	AB 1007 UB	9 Oktober 2015 s/d 23 September 2018
23	Honda Astrea C 86	KPU	MH1GGHA15XK019262	GGHE1019262	AB 2334 UB	Sda
24	Toyota KijangInnova G	Pengadilan Negeri Bantul	MHFXX42G9E2283464	1TR-7754926	AB 1304 UB	30 Juni 2014 s/d 29 Juni 2019

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Peralatan dan Mesin selain Kendaraan Dinas secara Pinjam Pakai

No.	NAMA BARANG	PEMINJAM PAKAI	MERK/TYPE	JUMLAH	JANGKA WAKTU
1	LCD Proyektor dan Layar	Kodim 0729 Bantul	Hitachi CP-X3021WN	1 Unit	24 Desember 2014 s/d 23 Desember 2019
2	Air conditioner (AC)	Kodim 0729	Panasonic 2 PK	1 Unit	24 Agustus 2015 s/d 23 Agustus 2020
3	Kamera Digital	PolresBantul	Canon IXUS 125 HS	1 Unit	25 Februari 2015 s/d 24 Februari 2020
4	Kursi Tamu	PolresBantul	-	1 Set	Sda
5	Lemari Arsip Dorong	BPN	Wifile MFB-6 BS 22	2 Buah	24 Februari 2015 s/d 23 Februari 2020
6	Komputer	BPN	ENVY 23 2245d Touch Smart AiO	5 Unit	10 september 2014 s/d 9 September 2019
7	Printer	BPN	Epson Stylus Photo 1390	3 Unit	Sda
8	Printer	BPN	LQ 2190	1 Unit	Sda
9	Printer	BPN	HP Laserjet Pro P1566	2 Unit	Sda
10	GPS	BPN	Maggellan Ex Plorist 510	4 Unit	Sda
11	Meja Kerja	Kodim0729 Bantul	-	25 Buah	20 Oktober 2016 s/d 19 Oktober 2021
12	Kursi Kerja	Sda	-	25 Buah	Sda
13	Meja Kerja	Kodim 0729 /PEPABRI	-	10 Buah	6 November 2017 s/d 5 November 2022
14	Kursi Kerja	Kodim 0729 /PEPABRI	-	10 Buah	Sda

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

DAFTAR REKAPITULASI PENGGUNAAN UNTUK DIOPERASIKAN PIHAK LAIN

No.	PENGGUNA	NAMA GEDUNG & BANGUNAN	PEMANFAATAN	MASA BERLAKU	KETERANGAN
1	Bagian Umum setda Kab. Bantul	Sebagian Gedung eks Disperindagkop Kab. Bantul	Pembinaan UKM di Kab. Bantul Oleh PT. BTN Yogyakarta	29 November 2016 s/d 28 November 2019	
2	Disdukcapil	Komputer PC	Pemerintah Desa se Kab. Bantul	Juli 2016 s/d Juli 2021	

DAFTAR PINJAM PAKAI BMD MILIK PEMERINTAH DAERAH DIY KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

No.	NAMA BARANG	PENGGUNAAN	LOKASI	MASA BERLAKU	KETERANGAN
1	Tanah	Kantor Kecamatan Sedayu, Kecamatan Sanden, Puskesmas Sanden dan SD Negeri 1 Sanden	Sedayudan Sanden	13Desember 2015 s/d 12Desember 2020	
2	Tanah dan Bangunan Eks UPT Kanwil Deperindag Prop. DIY	Pusat Diklat Kerajinan Gerabah/Keramikdan Training Center (Disperindagkop)	Kasihlan	5 Nopember 2014 s/d 4 Nopember 2019	
3	Tanah dan bangunan	Balai Benih Induk Perikanan Gesikan (DKP)	Pandak	5 Nopember 2014 s/d 4 Nopember 2019	
4	Tanah	Pasar Pijenan (KPP)	Pandak	9 Juli 2015 s/d 8 Juli 2020	
5	Tanah	Balai Penyuluh Pertanian	Sewon	24 Februari 2017 s/d 23 Februari 2022	
6	Tanah dan bangunan	Tempat Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	Bangunharjo, Sewon Bantul	01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2019	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

BAB VIII
PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas serta Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Bantul

Bantul, 28 Agustus 2018
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO